

CHARACTER BUILDING : PANCASILA



BINUSIAN

Oleh

Tim CBDC

**Character Building Development Center (CBDC)
Universitas Bina Nusantara Jakarta
2014**

DARTAR ISI

Bab I	: Pancasila Sebagai Sumber Nilai Bagi Pendidikan Karakter	3
Bab II	: Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara	11
Bab III	: Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa.....	27
Bab IV	: Pancasila Sebagai Dasar Etis Pengembangan IPTEK.....	37
Bab V	: Beriman Kepada Tuhan.....	53
Bab VI	: Toleransi dan Kerjasama Antarumat Beragama.....	70
Bab VII	: Kemanusiaan Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.....	86
Bab VIII	: Hak-Hak Asasi Manusia.....	91
Bab IX	: Multikulturalisme	97
Bab X	: Interaksi Antarbudaya.....	105
Bab XI	: Kepemimpinan Demokratis.....	113
Bab XII	: Demokrasi Pancasila.....	124
Bab XIII	: Keadilan Sosial.....	134

BAB I

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI BAGI PENDIDIKAN KARAKTER

A. Pengantar

Bagi orang Indonesia Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dan merasuk dalam kehidupan keseharian masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia sejak lama sekaligus merupakan ciri khas budaya dan peradaban manusia Indonesia yang harus terus dipelihara. Menjelang kemerdekaan Indonesia para *founding fathers* bangsa Indonesia berhasil menggali dan merumuskan nilai-nilai luhur masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia ke dalam lima (5) sila yang disebut Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai dasar negara republik Indonesia merdeka. Kelima sila atau dasar tersebut, pertama adalah nilai ketuhanan, kedua adalah nilai kemanusiaan, ketiga adalah nilai persatuan, keempat adalah nilai kerakyatan (demokrasi) dan kelima adalah nilai keadilan. Tanpa menyangkal adanya berbagai nilai lain yang tentu sangat penting dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, para pendiri bangsa ini telah menjadikan kelima sila ini, yang memuat kelima nilai-nilai luhur budaya dan peradaban suku-suku bangsa di bumi Nusantara sebagai dasar bagi terbentuknya negara yang disebut Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sangat penting bagi Indonesia, yang perlu selalu tertanam dalam hati sanubari masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kelima sila dalam Pancasila harus selalu menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dalam perannya sebagai dasar negara juga berperan sebagai pemersatu bangsa, pengikat seluruh keragaman suku dan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi persada Nusantara, Indonesia ini. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila tetap dihayati sebagai pengikat dan pemersatu sekalipun mereka tinggal berada di negara lain jauh dari wilayah teritorial republik Indonesia.

Pancasila, dengan kelima nilai yang terkandung di dalamnya harus terus diusahakan agar selalu tampil dalam keseharian praktek hidup orang-orang Indonesia, dan tidak hanya terbatas pada hal-hal tertentu yang secara sengaja dicari landasannya dalam sila-sila Pancasila, seperti dalam merumuskan kebijakan tertentu terkait pembangunan ekonomi umpamanya. Nilai-nilai Pancasila harus bisa kelihatan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam mengelola kehidupannya pribadi maupun dalam menjalani kehidupan sosialnya, dalam hubungan dengan sesama, dunia dan Tuhannya. Supaya hal itu bisa terjadi maka jiwa atau semangat sila-sila Pancasila harus menjadi pola pikir, paradigma, yang mendasari sikap dan perilaku keseharian orang-orang Indonesia, yang terbentuk melalui pembiasaan, sehingga menjadi budaya dan ciri khas nyata orang-orang Indonesia.

Dengan mengatakan sebagai ciri khas yang selalu tampak dalam kehidupan keseharian, yang terbentuk melalui pembiasaan, yang didorong oleh pola pikir dan paradigma nilai-nilai luhur, maka yang sesungguhnya mau dibangun sebenarnya tidak lain adalah *nation character* (karakter bangsa), jati diri yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hanya dengan berhasilnya Pancasila menjadi karakter bagi bangsa Indonesia, Pancasila betul-betul menjadi jiwa, semangat, pemersatu, penentu keindonesiaan kita. Maka usaha kita yang sangat penting adalah terus berusaha menggali dan menghayati serta membiasakan praktek berpikir dan berperilaku pancasilais dalam kehidupan keseharian. Salah satu caranya adalah dengan secara sengaja mendalami nilai-nilai luhur Pancasila itu serta mencari bentuk-bentuk konkrit penghayatannya dalam praktek rutin keseharian.

B. Pendidikan Karakter Berlangsung secara Formal dan Informal

Pendalaman nilai-nilai pancasila dan penghayatannya dalam kehidupan nyata tidak lain adalah sebuah usaha pembentukan karakter (*character building*) yang bersumberkan nilai yang jelas, warisan luhur para leluhur dari aneka suku bangsa di Indonesia. Dengan demikian maka menjadikan Pancasila sebagai mata kuliah formal itu berarti kita sedang berusaha menggali nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kita jadikan sebagai sumber pendidikan karakter bagi kita, pembentuk watak, yang kita yakini sebagai modal, kekayaan dan kekuatan utama untuk mampu menghayati keindonesiaan kita, baik dalam lingkup kebersamaan kita di dalam negara kita sendiri maupun dalam lingkup pergaulan kita di tengah-tengah bangsa dan negara dunia lain.

Secara formal (sebagai mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi) pendidikan karakter boleh dikatakan merupakan hal yang baru. Tapi itu tidak berarti pendidikan, pembentukan atau pembinaan karakter merupakan hal yang baru dimulai. Secara informal atau non formal pembentukan, atau pendidikan karakter sudah berlangsung sejak anak masih kecil dalam keluarga, dan itu berlangsung terus sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak melalui lingkungan yang semakin luas: lingkungan pergaulan, pertemanan, adat kebiasaan, budaya, agama, sekolah, dan lingkungan masyarakat secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pendidikan atau pembentukan karakter selain dapat berlangsung secara tidak formal dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang semakin luas di masyarakat, juga dapat dilakukan secara sengaja, formal dan sistematis dalam lingkungan pendidikan formal, di sekolah atau di perguruan tinggi. Pendidikan atau pembentukan karakter yang berlangsung dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat luas umumnya terjadi melalui contoh dan keteladanan, yang mudah dilihat dan kemudian ditiru oleh seorang anak, tanpa selalu disertai penjelasan dan pemahaman yang memadai oleh anak. Sedangkan dalam lingkungan sekolah formal, termasuk di perguruan tinggi, cara pendidikan atau pembentukan karakter mengalami pergeseran atau lebih tepat perkembangan. Kalau dalam lingkungan non formal atau informal kekuatan utama ada pada contoh, teladan, yang diperlihatkan oleh orang-orang dewasa, maka dalam lingkungan pendidikan formal, khususnya di sekolah menengah dan terutama di perguruan tinggi, tanpa mengabaikan unsur keteladanan, tekanan utamanya justru pada penanaman pemahaman dan refleksi kritis.

Untuk seorang anak yang masih kecil, hal yang paling berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya, termasuk karakternya adalah apa yang mereka saksikan, lihat atau dengarkan, walau yang mereka lihat, saksikan atau dengar itu belum tentu mereka mengerti. Akan tetapi karena hal itu sering mereka lihat dan saksikan (mengalaminya secara langsung) maka sangat mudah mempengaruhi mereka, menirunya, mengikutinya, melakukannya secara berulang, menjadi kebiasaan, lalu membentuk pola tingkah laku mereka, dan itulah yang akhirnya menjadi karakter mereka. Bagi orang dewasa, pemahaman dan pengertian memegang peranan penting, karena hal itulah yang menjadi dasar pertanggungjawaban yang harus mereka berikan atas sikap dan tindakan mereka. Bagi orang dewasa tidak cukup hanya mengandalkan contoh, yang mereka bisa lihat dan saksikan, lalu kemudian mereka menirunya begitu saja. Mereka harus punya dan menggunakan kemampuan kritis mereka untuk menilai sesuatu apakah baik atau buruk, pantas atau tidak pantas ditiru. Untuk mampu menilai seperti ini diandaikan mereka memiliki dasar pemahaman yang benar, yang menjadi kerangka acuan mereka dalam menentukan apa yang akan mereka lakukan.

Untuk seorang anak kecil, yang lebih banyak bertindak sesuai dengan apa yang mereka lihat, kita tidak bisa menuntut banyak atau bertanya mengapa dia bertindak seperti itu, karena mereka memang lebih banyak meniru atau terinspirasi oleh apa yang mereka lihat. Kalau contoh yang mereka lihat itu merupakan hal-hal baik dan terpuji tentu tidak masalah ketika mereka bisa menirunya. Tapi bagaimana kalau contoh yang mereka lihat dan saksikan atau dengar dari orang-orang dewasa di

sekitar mereka merupakan hal-hal buruk dan tidak terpuji, betapa bahayanya ketika hanya kemampuan meniru itu yang menjadi andalan.

Untuk seorang dewasa, yang dapat bahkan harus dimintai pertanggungjawaban atas sikap dan tindakannya, sangat diperlukan kemampuan yang harus melampaui kemampuan meniru. Orang dewasa tidak cukup hanya merujuk pada contoh yang mereka lihat. Mereka tetap harus bisa memilih dan menentukan apa yang mereka lakukan, termasuk pilihan sikap atau tindakan yang berbeda bahkan bertentangan dengan kebiasaan yang mereka lihat dan saksikan di sekitar mereka. Seorang dewasa perlu bahkan harus bisa menjelaskan mengapa dia bersikap atau bertindak seperti itu dan ini, begitu dan begini. Untuk itu diandaikan bahwa harus ada pemahaman atau pengertian atas pilihan sikap atau tindakan yang dilakukan, tidak cukup lagi hanya mengandalkan contoh atau kebiasaan yang nyata di lingkungan sekitar. Untuk pertanggungjawaban suatu pilihan sikap atau tindakan, selain harus adanya pemahaman juga harus ada kebebasan untuk memilih. Inilah kemampuan penting dan mendasar yang harus ada dalam diri seorang dewasa. Jadi orang dewasa harus bisa dimintai tanggung jawab atau mempertanggungjawaban perbuatannya.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka pendidikan atau pembentukan karakter yang dilakukan secara sengaja melalui lembaga formal, termasuk perguruan tinggi, menjadi sangat penting dan mendesak. Dalam dan melalui pendidikan formal tentang karakter, anak didik, khususnya mahasiswa, diajak untuk mendalami sesuatu, mencari tahu lebih dalam akar persoalan inti mengapa sesuatu tindakan itu harus atau tidak boleh dilakukan, tentang bagaimana sebaiknya bahkan seharusnya kita bersikap menghadapi suatu situasi sulit yang menghampiri kita. Sangat mudah untuk melihat contoh-contoh sikap atau tindakan atau respon orang terhadap sesuatu hal tertentu, namun memahami apakah sikap atau respon itu baik atau tidak, benar atau salah, tidak selalu mudah. Akan semakin rumit lagi ketika kita melihat sikap atau respon yang berbeda-beda dari orang ke orang, dari suatu budaya ke budaya lain atas suatu hal tertentu. Di sini sangat penting usaha mencari tahu secara lebih dalam tentang sikap atau respon apa yang akan kita berikan atas sesuatu hal yang dihadapkan kepada kita. Kemampuan kita untuk bisa menilai sikap atau respons apa yang sebaiknya kita berikan, serta kemampuan atau kebebasan memilih yang akan kita kedepankan sangat menentukan bobot pertanggungjawaban moral kita atas apa yang kita lakukan.

Dengan demikian maka di bangku sekolah, baik di sekolah menengah, dan terutama di perguruan tinggi, maksud atau tujuan pendidikan atau pembentukan karakter adalah untuk membantu anak didik dewasa mendapatkan pemahaman yang memadai serta mampu menggunakan kebebasan memilihnya untuk setiap tindakan yang akan mereka ambil, yang bisa mereka pertanggungjawabkan secara logis-rasional, terutama secara etis-moral. Di sinilah letaknya perbedaan pendidikan atau pembentukan karakter yang berlangsung ketika anak-anak masih kecil dalam lingkungan keluarga dengan yang berlangsung di lembaga formal, sekolah dan perguruan tinggi. Dalam lembaga formal, hal yang menjadi andalan utama untuk pembentukan karakter bukan lagi hanya contoh yang bisa dilihat, yang kemudian ditiru, melainkan kemampuan memahami dan menggunakan kebebasan untuk suatu pilihan tindakan yang akan kita lakukan.

Untuk mencapai hal ini maka bentuk pendidikan karakter terutama di perguruan tinggi adalah melakukan usaha untuk memperoleh pemahaman mendalam, melalui refleksi kritis (*critical thinking*), termasuk dengan diskusi atas kasus-kasus yang terkait dengan masalah karakter. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan atau praktek langsung sebagai bagian dari pembiasaan dari apa yang dipahami sebagai baik atau terpuji, yang kemudian merefleksikannya lagi untuk semakin menguatkan atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada. Di sini contoh atau keteladanan, kebiasaan berperilaku baik yang hidup di lingkungan sekitar memang bisa sangat membantu menguatkan pendidikan atau pembentukan karakter.

Lingkungan kondusif seperti itu sangat diperlukan dan sangat membantu. Tapi tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berperilaku baik hanya karena ketiadaan contoh atau kebiasaan baik di lingkungan di mana kita berada. Yang terutama menentukan pilihan sikap dan tindakan kita adalah pemahaman baik dan kebebasan kita untuk memilih. Hal ini menjadi semakin penting ketika tidak ada contoh atau kebiasaan baik yang mudah kita lihat di sekitar kita. Sehingga kita tidak lagi pada

posisi atau tahap menunggu contoh atau teladan itu melainkan kita tampil sebagai contoh dan teladan itu bagi lingkungan dan masyarakat kita.

C. Pendidikan dan Internalisasi Nilai sebagai Pendidikan Karakter

Manusia sejak lahirnya membawa serta sifat-sifat dan kecenderungan psikologi tertentu, yang mencirikan cara dia berpikir dan bertindak, termasuk dalam merespon hal tertentu yang dihadapkan kepadanya. Sifat-sifat bawaan ini ada yang disebut *types* dan *traits* atau ada yang menyebutnya temperamen. Hal-hal ini kurang-lebih sifatnya menetap dalam diri seseorang, yang mencirikan kepribadiannya. Seandainya tidak ada pengaruh lingkungan dari luar yang masuk mempengaruhi, tentu seseorang akan berkembang sesuai dengan sifat-sifat bawaan lahirnya itu saja. Tapi situasinya tidaklah seperti itu. Manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan dia sudah berada dalam lingkungan tertentu, yang pasti akan memberikan pengaruh pada perkembangan diri dan kepribadiannya.

Dilihat dari proses terbentuknya, karakter bukanlah bawaan lahir, sehingga tidak ada orang yang dilahirkan dengan karakter baik atau karakter buruk. Semuanya hanya membawa serta kecenderungan sifat tertentu, yang tetap terbuka untuk proses pembentukan selanjutnya. Semua orang terbuka untuk berkarakter baik atau juga berkarakter buruk. Disebut karakter buruk karena sikap-sikap dan perbuatan seseorang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan masuk akal sehat. Jadi kalau berbicara mengenai karakter selalu dalam arti baik, yang berkonotasi positif. Terbentuknya karakter merupakan sebuah hasil dari tertanamnya nilai-nilai tertentu dalam diri seseorang, yang prosesnya berlangsung lama namun bisa juga cepat. Perubahan cepat bisa terjadi ketika seseorang, khususnya bagi dewasa, menemukan pemahaman baru (semacam pencerahan) tentang sesuatu, sehingga hal itu tidak jarang menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dalam bahasa agama ini disebut pertobatan, perubahan sangat mendasar dari hidup seseorang, berbalik arah, mendapatkan suatu arah atau orientasi baru dalam hidupnya. Mendapatkan pemahaman atau pencerahan baru seperti itu tidak harus dengan suatu pengalaman yang spektakuler dan tiba-tiba, melainkan bisa juga secara pelan dalam suatu proses yang berlangsung agak lama dan berlangsung terus menerus, seperti dalam pendidikan formal di sekolah.

Dengan penjelasan ini maka tidak benar kalau dikatakan bahwa pendidikan atau pembentukan karakter di sekolah, apalagi di perguruan tinggi sudah tidak relevan lagi, dianggap sudah terlambat, karena pendidikan karakter itu sudah berlangsung dalam keluarga ketika anak masih kecil. Sejak kecil itu karakternya sudah terbentuk, dan tidak atau sulit untuk berubah lagi. Pandangan dan sikap pesimistis seperti ini kuranglah tepat malah keliru! Dalam agama juga kita bisa tahu ketika seseorang sudah bergelimang dosa cukup lama, hidupnya jauh dari Tuhan, tiba-tiba, dengan suatu pengalaman tertentu, yang sangat menyentuh nuraninya yang terdalam, dia berubah, bahkan berubah secara total. Mereka memulai hidup baru, hidup yang jauh berbeda dengan hidup lamanya, dan tidak jarang mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah kenyataan, baik dalam sejarah awal keagamaan maupun hingga zaman modern ini hal itu selalu saja muncul. Selain pertobatan yang terjadi secara tiba-tiba seperti itu, ada juga pertobatan atau perubahan hidup seseorang yang terjadi secara pelan dan berangsur, oleh suatu pembinaan atau pendampingan yang berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Kurang lebih gambaran seperti ini terjadi dalam hal *character building* (pembentukan karakter). Karakter seseorang bisa berubah atau diubah. Masalah ada pada seberapa serius kita melakukannya.

Kalau berbicara mengenai nilai-nilai, maka hal itu selalu dalam arti yang baik, yang berkonotasi positif. Proses internalisasi nilai-nilai tertentu, baik melalui contoh atau teladan yang dapat dilihat, melalui pembiasaan, pengalaman maupun selanjutnya melalui pemahaman, telah membentuk diri pribadi orang, khususnya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang secara lebih dominan diterima dari lingkungannya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan

agama, budaya, dsb. Yang disebut nilai dominan di sini adalah nilai-nilai yang sering dia terima, sering dihadapkan atau ditekankan untuk dia patuhi, sering dia lihat dan saksikan, dalam suatu proses pembiasaan, sehingga lebih banyak diserap dalam kehidupannya. Itu sebabnya orang bisa menunjukkan karakter yang berbeda (yang dapat dilihat melalui sikap dan perilakunya) karena mereka berasal dari keluarga, lingkungan (budaya, pendidikan, adat istiadat, agama, dan pengalaman) yang berbeda. Proses pembentukan karakter melalui pembiasaan dan pengalaman ini nantinya akan semakin diteguhkan atau dikoreksi melalui pemahaman dan pengalaman yang direfleksikan semakin kritis lewat lembaga pendidikan formal yang sengaja dilakukan untuk itu.

Dalam arti tertentu, karakter dapat disebut sebagai nilai tertentu yang sudah terinternalisasi sedemikian rupa dalam diri seseorang melalui suatu proses penerimaan dan pembiasaan, yang diperkuat oleh contoh dan pemahaman yang semakin baik serta pengalaman yang terus direfleksikan secara mendalam melalui suatu proses yang umumnya panjang dalam lingkungan di mana dia tumbuh dan berinteraksi. Dengan demikian maka pertumbuhan diri pribadi seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh sifat-sifat bawaan lahirnya, melainkan sudah dipoles oleh nilai-nilai tertentu, khususnya yang berkembang secara dominan dalam suatu lingkungan di mana seseorang hidup dan berada. Nilai-nilai tertentu ikut membentuk seseorang dengan segala kekhasan bawaan lahirnya. Sifat-sifat bawaan lahir ini bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan (penanaman nilai-nilai tertentu) melainkan juga kekhasan bawaan lahir ini ikut mempengaruhi/mewarnai penerimaan pengaruh nilai dari lingkungan. Sifat-sifat bawaan tertentu bisa menjadi lahan subur atau tidak subur yang ikut menentukan cepat-tidaknya dan kuat-lemahnya pengaruh nilai-nilai dari lingkungan tadi. Ada sifat-sifat bawaan lahir yang sangat membantu atau mempermudah seseorang bisa menyerap nilai-nilai tertentu dari lingkungannya, dan ada juga sifat-sifat bawaan lahir tertentu yang membuat proses internalisasi nilai-nilai ini berjalan kurang lancar.

Dari kajian di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter, khususnya di lembaga pendidikan tinggi adalah suatu usaha sengaja, sistematis dan metodologis yang dirancang untuk membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai tertentu melalui suatu proses peningkatan pemahaman, penciptaan pengalaman dan merefleksikannya serta pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Apa yang dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi bukan merubah apa yang barangkali sudah tertanam baik dalam diri seseorang khususnya melalui lingkungan keluarganya, melainkan memperkuat hal yang sudah baik itu melalui usaha menemukan pemahaman yang semakin benar dan baik atas apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Selain memperkuat, pemahaman baru itu bisa juga mengoreksi pemahaman dan terutama kebiasaan yang sudah dimiliki sebelumnya sejauh hal itu dipahami kemudian sebagai kurang baik atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat dari cakupannya yang begitu spesifik, maka pendidikan karakter tidak tepat bila dilakukan hanya dengan metode ceramah atau menggurui saja. Perlu ada penciptaan pengalaman, penyediaan waktu untuk merefleksikan pengalaman, pembiasaan, diskusi pendalaman dalam kelompok. Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman sendiri, yang dilakukan secara langsung oleh peserta didik, melainkan bisa juga dengan menggunakan pengalaman orang lain berupa kisah tertentu atau menggantinya lewat sebuah tayangan film tertentu yang dengan sangat baik mempromosikan nilai/karakter tertentu. Diharapkan anak didik (mahasiswa) mampu mengendalikan tindakannya berdasarkan pemahamannya dan kebebasan memilih yang dimilikinya, dan tidak lagi sekedar ikut-ikutan bertindak sesuai dengan kebiasaan di lingkungannya. Dia lebih matang untuk bisa mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral, di hadapan Tuhan dan sesamanya, bahkan juga terhadap dirinya sendiri.

D. Urgensinya Pendidikan Karakter

Dilihat dari kondisi masyarakat kita, mulai dari diri pribadi para pemimpin dan berpendidikan di negara kita, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa pendidikan atau pembentukan karakter merupakan hal sangat mendesak. Ada cukup banyak perilaku tidak terpuji bahkan sangat keji terjadi

di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak penyalahgunaan kekuasaan, bertindak merugikan bahkan berperilaku tidak berperikemanusiaan. Ketidak-jujuran dan korupsi terjadi di mana-mana, praktek ketidakadilan dan pelanggaran hak azasi manusia sudah bukan merupakan hal langka untuk ditemukan. Pelanggaran aturan, pengrusakan lingkungan, perbuatan melanggar susila sudah semakin kasat mata. Semakin banyak orang dengan mudah mengabaikan tanggung jawabnya, hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya, dan banyak lagi hal-hal buruk lain yang dilakukan di mana-mana di seantero negeri ini. Para pelaku hal-hal buruk dan tidak terpuji ini terutama justru orang-orang yang berpendidikan baik dan memiliki jabatan tinggi dan pengaruh di dalam masyarakat. Padahal orang-orang seperti ini seharusnya memikul tanggung jawab besar memperbaiki keadaan masyarakat yang masih banyak tertinggal dalam banyak aspek pembangunan bangsa.

Kerusakan karakter seperti diungkapkan sebagian di atas sudah sangat jelas mengindikasikan tentang mendesaknya pendidikan atau pembentukan karakter, karena masalah-masalah yang disebutkan itu bukan terkait masalah kurangnya keahlian atau keterampilan, melainkan lebih sebagai masalah kurangnya kepemilikan karakter yang baik. Perlu pertimbangan antara kemampuan yang baik di berbagai bidang dengan kepemilikan karakter yang baik pula. Hanya dengan itu orang-orang terdidik diharapkan lebih sadar akan tanggungjawabnya, mewujudkan harapan mulia masyarakat yang dibebankan di atas pundak mereka.

Para mahasiswa, yang merupakan calon-calon pemimpin yang akan memainkan peran banyak dan menentukan di masyarakat di masa depan, selain disiapkan untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang mereka masing-masing, perlu juga dibekali dengan kepemilikan karakter yang baik. Hanya dengan cara itu diharapkan mereka bisa menjadi pembaharu, tumpuan harapan masyarakat, yang akan menciptakan perubahan ke hal yang semakin baik. Untuk itu pendidikan atau pembentukan karakter bahkan pada tingkat perguruan tinggi merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan yang mutlak dijalankan. Pendidikan karakter yang dilakukan harus bisa menggugah kesadaran dan membangun pemahaman baik dalam diri mahasiswa tentang nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Pemahaman dan kesadaran ini perlu disuburkan dengan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengekspresikan dan mengeksplisitkan karakter yang baik. Refleksi mendalam dan terus menerus atas pengalaman langsung maupun tidak langsung itu dapat menjadi sentuhan yang kuat untuk selalu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk yang sangat tidak sejalan dengan predikat yang mereka sandang di tengah-tengah masyarakat, yakni insan terdidik, yang *Smart and Good*.

E. Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai Sumber Pendidikan Karakter

Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang merupakan endapan warisan budaya yang hidup dan berkembang cukup lama dalam kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia. Ketika Indonesia hendak memproklamkan kemerdekaannya, para *founding fathers* menggali hal-hal sangat mendasar yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang dijadikan sebagai modal, landasan, sekaligus sebagai kekuatan pemersatu bangsa Indonesia menuju pintu kemerdekaannya, yang kemudian dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia, yang akan terus mengikat soliditas seluruh warga Negara Indonesia ke depan.

Pancasila yang berhasil dirumuskan dengan baik, singkat dan padat, yang terdiri atas lima sila, tidak lain adalah rumusan dari nilai-nilai luhur yang digali dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia, sekaligus merupakan modal utama yang membuat Indonesia akhirnya mampu memproklamkan kemerdekaannya. Nilai-nilai luhur itulah yang menjadi kekuatan, bukan saja dalam mencapai kemerdekaan, melainkan juga yang diyakini menjadi kekuatan yang tetap dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan itu serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, menjadi Negara yang sejahtera, adil dan makmur.

Sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah seharusnya hal itu terus terinternalisasikan dalam hati dan diri pribadi setiap orang Indonesia di manapun dia berada. Namun hal itu tidak selalu terjadi, terutama untuk generasi muda di zaman sekarang ini dan di masa depan. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya tantangan kemajuan zaman yang menawarkan nilai-nilai lain yang sepertinya lebih menggugah, lebih menarik minat, mudah dan praktis, sehingga mudah mengikutinya. Namun demikian nilai-nilai baru tersebut tidak selalu dapat menjamin kekokohan diri pribadi individu dan juga pribadi bangsa, karena kebanyakan sifatnya semu dan instan. Daya tawar nilai-nilai baru yang dengan mudah sampai kepada kita melalui berbagai bentuk propaganda yang dikemas dalam wujud samar dan bahkan terang-terangan, melalui berbagai media sosial yang sangat mudah diakses, sangat berpotensi meruntuhkan dengan mudah nilai-nilai luhur bangsa kita yang sudah teruji kekokohan dan kegunaannya yang sangat hakiki dalam kehidupan kita.

Berhadapan dengan nilai-nilai baru, yang sangat potensial menggerogoti nilai-nilai luhur bangsa kita sebagaimana tertuang dalam Pancasila, maka kita, sambil tetap terbuka bagi nilai-nilai baru produk kemajuan zaman dan peradaban, kita harus tetap memelihara identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Kita perlu terus mencari cara-cara baru yang sesuai dengan kondisi zaman menghidupi nilai-nilai luhur bangsa kita sebagai ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkristal dalam Pancasila selain sebagai endapan nilai-nilai mulia bangsa kita, juga kita ketahui bahwa nilai-nilai tersebut sungguh bersifat universal, diakui keluhurannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Cara agar nilai luhur Pancasila itu terus bisa hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan bangsa kita dari generasi ke generasi berikutnya, maka kita perlu terus mendalaminya, membicarakan dan mengkajinya, serta menerapkan semangat nilai-nilai itu dalam peri dan perjuangan hidup kita sehari-hari. Kita perlu melestarikan, melanggengkan dan mengabadikan nilai-nilai filosofi Pancasila dalam praksis hidup kita, setiap orang yang menyandang predikat warga negara Indonesia.

Untuk semakin akrab dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dan terutama cara penerapannya dalam praktek hidup konkrit kita sehari-hari, maka kita perlu mendalaminya bersama, sila per sila, mencari makna hakiki dari setiap nilai yang terkandung dalam sila-sila itu, berusaha mencari cara penerapannya yang pas dalam kehidupan, sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sebelum sampai pada penerapan itu tentu kita mantapkan lebih dulu keyakinan dan penerimaan kita atas nilai-nilai tersebut, sehingga terbentuklah paradigma dan pola pikir kita bahwa inilah nilai-nilai luhur bangsa kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nilai-nilai tersebut mesti terus kita pelihara, junjung tinggi, hidupi dan wariskan turun-temurun kepada anak cucu kita. Dari paradigma dan pola pikir yang terbentuk dan diikat oleh nilai-nilai itu, barulah kita kemudian turunkan ke ranah sikap dan perilaku nyata kita, yang mencerminkan secara jelas semangat dan sekaligus kekuatan serta urgensinya nilai-nilai dasar Negara kita itu.

Terdapat lima nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, tertuang secara eksplisit dalam sila-silanya. Nilai ke-1 adalah nilai ketuhanan, terkandung dalam sila pertama. Nilai ke-2 adalah nilai kemanusiaan, terkandung dalam sila kedua. Nilai ke-3 adalah nilai persatuan, terkandung dalam sila ketiga. Nilai ke-4 adalah nilai demokrasi, terkandung dalam sila keempat. Dan nilai ke-5 adalah nilai keadilan, terkandung dalam sila kelima. Inilah kelima nilai dasar dan luhur yang tertuang dalam Pancasila, yang merupakan dasar Negara kita, bahkan juga merupakan ideologi Negara kita Indonesia tercinta ini. Kelima nilai inilah yang terus kita perdalam dan kembangkan pemahamannya serta penghayatannya dalam sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Pembahasan, pendalaman, dan upaya mengkonkritkan penerapan dan penghayatan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan kita bisa dilakukan dalam berbagai cara dan kesempatan, secara formal, informal, dan bahkan non formal. Untuk di lembaga-lembaga pendidikan pelaksanaannya akan dilakukan secara formal, menjadi bagian dari pembelajaran, namun yang harus diikuti dengan penerapan, pembiasaan, yang kemudian direfleksikan lagi, sehingga pemahaman dan penghayatannya jauh lebih bermutu dan berdaya pikat kuat.

F. Tugas

Buatlah sebuah tulisan refleksif (renungan) yang menunjukkan bahwa Pancasila yang dimiliki oleh kita orang Indonesia ini sungguh dapat diandalkan sebagai sumber nilai bagi pendidikan karakter (*character education*) kita sebagai anak bangsa. Identifikasikan nilai-nilai umum apa saja yang terdapat di dalam Pancasila itu? Uraikan!

BAB II

PANCASILA SEBAGAI DASAR

DAN IDEOLOGI NEGARA¹

A. Pendahuluan

Dasar Negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pengumpulan pemikiran para pendiri negara (*The Founding Fathers*) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif (2002: 5) menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintesis aneka ideologi dalam rangka membentuk “blok historis” atau (blok nasional) bersama demi mencapai kemerdekaan.

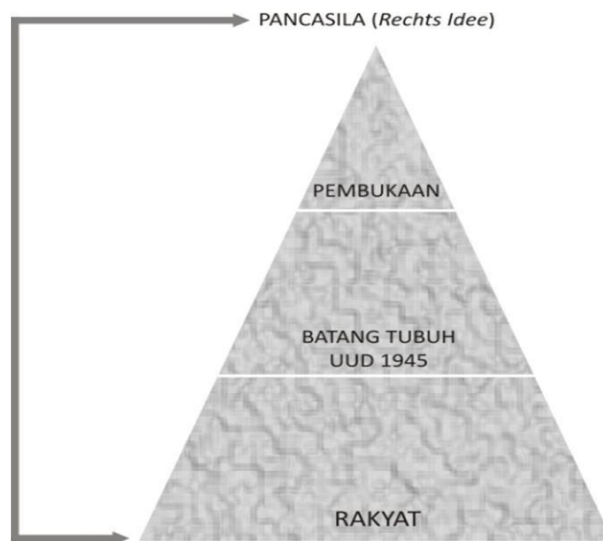
BPUPKI yang selanjutnya disebut dalam bahasa Jepang sebagai *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dibentuk pada 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, termasuk Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Itibangase Yosio (anggota luar biasa yang berkebangsaan Jepang) dan R. Pandji Soeroso (merangkap Tata Usaha) masing-masing sebagai wakil ketua Pembicaraan mengenai rumusan dasar negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI berlangsung dalam dua babak, yaitu: pertama, mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan kedua, mulai 10 Juli sampai 17 Juli 1945.

Pengumpulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia bermula dari permintaan Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua BPUPKI pada 29 Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Dari sinilah kemudian Pancasila mulai dibahas tahap demi tahap oleh para perumus.

B. Hubungan Pancasila dengan UU NRI Tahun 1945

Berdasarkan ajaran *Stufen theory* dari Hans Kelsen (Abdullah:1984, 71), hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

¹ Uraian Materi ini diadaptasi dari Buku Modul Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013, halaman 24-72.



Gambar yang berbentuk piramida di atas menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum (*Rechts idee*) yang berada di puncak segi tiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*recht-idee*), baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan di antara sesama warga bangsa.

Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPRNo.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan (2000: 90-91), menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam

perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Menurut Kaelan (2000: 91), Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua (2) macam kedudukan, yaitu: 1) sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; 2) memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Hal ini disebabkan karena kedudukan hukum Pembukaan berbeda pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI tahun 1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan atau eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

C. Penjabaran Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945.

Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif.

Sesuai dengan Penjelasan UUD NRI tahun 1945, Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Ke-4 pokok pikiran tersebut:

- 1) Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’, yaitu; “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- 2) Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’, yaitu; “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.
- 3) Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’, yaitu; “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”.
- 4) Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, yaitu; “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka persatuan merupakan dasar negara yang

utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.

Pokok pikiran kedua merupakan *causa finalis* dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis, yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010: 209), aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan sebagai berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010:210).

MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak empat kali yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Menurut Rindjin (2012: 245-246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara; *kedua*, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; *ketiga*, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

D. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara

Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Aspek

pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan (Bakry,2010: 276).

pasal 30

Pasal 26 ayat (1) dengan tegas mengatur siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara dapat juga menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pada pasal 29 ayat (3) dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini, ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu: hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat.

Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Notonagoro (1975: 23) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek Negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan (2000:238) bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.

Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak.

Pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan pada ayat (2) ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada ayat (3) ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (1) pada pasal ini menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian, sedangkan ayat (2) menetapkan adanya hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan pernyataan ayat (5) pasal ini, maka pelaksanaan seluruh ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan dalam ayat (2) ini menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial.

Adapun pada pasal 34 ayat (4) ditetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini, selanjutnya diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan pada ayat (5) pasal 34 ini.

Pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebagaimana dikutip Kaelan (2000: 239), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Undang-Undang Dasar, ayat (1) pasal 29 ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dalam pasal 29 ayat (2) ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama.

Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini diperoleh pemahaman bahwa mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat (3) pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat (4) pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat (5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat (2) pasal 32 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Koentowijoyo, seperti dikutip Kaelan (2000: 240), sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk: 1).universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur; dan 2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan Negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik sosial yang pada gilirannya menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, seperti kebersamaan atau gotong royong dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan suku, agama, dan ras harus dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan beradab.

Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Pada ayat (2) pasal 30 ini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pada ayat (3) pasal 30 ini juga dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam ayat (4) pasal 30 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat (5) pasal 30 menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 di atas adalah penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga Negara dan untuk melindungi hak-hak warga negara.

Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (Sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila keempat), dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks Negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan Negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

E. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, menurut Prof. W. Howard Wriggins, berfungsi sebagai sesuatu yang *"confirm and deepen the identity of their people"* (sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya). Namun, ideologi di negara-negara tersebut, menurutnya, sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi ialah alat untuk mendefinisikan aktivitas

politik yang berkuasa, atau untuk menjalankan suatu politik “*cultural management*”, suatu muslihat manajemen budaya (Abdulgani, 1979: 20). Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi dalam kehidupan di setiap negara. Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan disalah-gunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Ideologi, menurut Oesman dan Alfian (1990: 6), berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga (3) dimensi yang terkandung di dalam dirinya. *Pertama*, adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. *Kedua*, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya (Oesman dan Alfian, 1990: 7-8). Menurut Soerjanto Poespowardojo (1990), ideologi mempunyai fungsi memberikan:

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma yang menjadi pedoman/pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Oesman dan Alfian, 1990: 48).

Dalam konteks Indonesia, Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta (1926-1931) di Belanda, sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat prinsip: persatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi dan kemandirian (*selfhelp*) (Latif, 2011: 5).

Sekitar tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia). Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Keterlibatannya dengan organisasi komunis internasional tidak melupakan kepekaannya untuk memperhitungkan kenyataan-kenyataan nasional dengan kesediaannya untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur revolusioner lainnya. Dia pernah mengusulkan kepada Komintern (Komunisme Internasional) agar komunisme di Indonesia harus bekerjasama dengan Pan-Islamisme karena, menurutnya, kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa

diabaikan begitu saja. Hampir bersamaan dengan itu, Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi (Latif, 2011: 6).

Soepomo, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, memberikan tiga pilihan ideologi, yaitu: (1) paham individualisme, (2) paham kolektivisme dan (3) paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Paham integralistik merupakan kerangka konseptual makro dari apa yang sudah menjiwai rakyat kita di kesatuan masyarakat yang kecil-kecil itu (Moerdiono dalam Oesman dan Alfian (ed), 1990: 40).

Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu (Latif, 2011: 47). Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya.

F. Pancasila dan Ideologi Dunia

1. Pancasila dan Liberalisme

Periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia Barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini, seperti PRRI dan Permesta pada tahun 1957 (Bourchier dalam Dodo dan Endah (ed), 2010:40). Keadaan tersebut mengakibatkan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan bernegara.

Pada 1950-1960 partai-partai Islam sebagai hasil pemilihan umum 1955 muncul sebagai kekuatan Islam, yaitu Masyumi, NU dan PSII, yang sebenarnya merupakan kekuatan Islam di Parlemen tetapi tidak dimanfaatkan dalam bentuk koalisi. Meski PKI menduduki empat besar dalam Pemilu 1955, tetapi secara ideologis belum merapat pada pemerintah. Mengenai Pancasila itu dalam posisi yang tidak ada perubahan, artinya Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia meski dengan konstitusi 1950 (Feith dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 40).

Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme Barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan makhluk sosial (Alfian dalam Oesman dan Alfian, 1990: 201).

Negara demokrasi model Barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia (Kaelan, 2012: 254). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kaelan yang menyebutkan bahwa negara liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis, bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler (Kaelan, 2000: 231). Berbeda dengan Pancasila, dengan rumusan Ketuhanan Yang

Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara (Kaelan, 2000: 220).

Tentang rahasia negara-negara liberal, Soerjono Poespowardojo mengatakan bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum (Soeprapto dalam Nurdin, 2002: 40-41). Karena alasan-alasan seperti itulah antara lain kenapa Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme.

2. Pancasila dan Komunisme

Dalam periode 1945-1950 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk menfokuskan diri terhadap agresi asing apakah pihak Sekutu atau NICA yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Di pihak lain, terjadi pergumulan yang secara internal sudah merongrong Pancasila sebagai dasar negara, untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI/TII yang akan mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam dan Pemberontakan PKI yang ingin mengubah RI menjadi negara komunis (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1982/83 kemudian dikutip oleh Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 39).

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, berarti kembali ke Pancasila. Pada suatu kesempatan, Dr. Johannes Leimena pernah mengatakan, “Salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat”. Oleh karena itu, menurut Dr. Johannes Leimena, harus ada usaha-usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pedesaan. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah dijejek oleh rayuan-rayuan komunisme. Bagi orang Kristen, ajaran komunisme bisa menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan falsafah Pancasila (Pieris, 2004: 212).

Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu Negara. Sedangkan Indonesia sebagai Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektis inkorporatif. Artinya pilihan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia (Kelan, 2012: 254-255).

Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang (Poespowardojo, 1989: 203-204).

Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam Tap MPR No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme yang diperkuat dengan Tap MPR No. IX/MPR/1978 dan Tap MPR No VIII/MPR/1983.

3. Pancasila dan Agama

Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui *The Founding Fathers* Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan *local genius* bangsa Indonesia (Ayathrohaedi dalam Kaelan, 2012). Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998: 36).

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2012: 47), asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan (*Kausa Materialis*) yang menyatakan bahwa “bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, ...yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia”.

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen (Latif, 2011: 57). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua*, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda (Hartono, 1992: 5).

Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan (Latif, 2011: 67). Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh *founding fathers* negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) yang menyatakan, “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih (Yesus Kristus-Red), yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan” (Zoelva, 2012).

Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. *Pertama* pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang, menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaik-baiknya”. *Kedua*, posisi negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan bahwa “negara kita akan ber-Tuhan”. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal

ini relevan dengan ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUD 1945 (Ali, 2009: 118). Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran *tauhid* dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan *causa prima* atau sebab pertama itu (meskipun istilah *causa prima* tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya), sejalan dengan beberapa ajaran *tauhid* Islam, dalam hal ini ajaran tentang *tauhidus-shifat* dan *tauhidul-af'al*, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia (Thalib dan Awwas, 1999: 63).

Prinsip ke-Tuhanan Ir. Soekarno itu didapat dari atau sekurang-kurangnya diilhami oleh uraian-uraian dari para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Ir. Soekarno dalam Badan Penyelidik itu, dikuatkan dengan keterangan Mohamad Roem. Pemimpin Masyumi yang terkenal ini menerangkan bahwa dalam Badan Penyelidik itu, Ir. Soekarno merupakan pembicara terakhir; dan membaca pidatonya orang mendapat kesan bahwa pikiran-pikiran para anggota yang berbicara sebelumnya telah tercakup di dalam pidatonya itu, dan dengan sendirinya perhatian tertuju kepada (pidato) yang terpenting. Komentar Roem, "Pidato penutup yang bersifat menghimpun pidato-pidato yang telah diucapkan sebelumnya" (Thalib dan Awwas, 1999: 63).

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdikan kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan mengalahkan *ilah-ilah* atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan kalimat "Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa". Di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua tuan, hanya satu tuannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdikan kepada satu Tuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Kitab Ulangan 6:4-5, Matius 6:24, Lukas 16: 13, Quran surat: Al Mu'minin [23]: 23 dan 32) (Mulyantoro, 2012).

Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari Negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting untuk dicatat karena Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme yang secara jelas menyerukan untuk memisahkan agama dan politik atau menegaskan bahwa negara harus tidak memiliki agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara dan dari komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter. Namun, dengan hanya mengakui lima agama (sekarang menjadi 6 agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu) secara resmi, negara Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga negara. Pandangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang yang menganut agama tersebut, tetapi tidak bagi mereka yang tidak menganutnya.

Pemahaman ini juga memasukkan kalangan sekuler yang menganut agama tersebut, tapi tidak memasukkan kalangan sekuler yang tidak menganutnya. Seperti yang telah ditelaah Madjid, meskipun Pancasila berfungsi sebagai kerangka yang mengatur masyarakat di tingkat nasional maupun lokal, sebagai individu orang Indonesia bisa dan bahkan didorong untuk memiliki pandangan hidup personal berdasarkan agama (An-Na'im, 2007: 439).

Gagasan asas tunggal menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahun diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang mengharuskan mendaftarkan ulang bagi semua ORMAS dan sekaligus mengharuskan semua ORMAS menerima asas tunggal yang diberi batas akhir sampai tanggal 17 Juli 1987. Golongan yang kontra bukan menolak Pancasila dan UUD 1945, melainkan ada kekhawatiran bahwa dengan menghapuskan asas "Islam", Pancasila akan menjadi "agama baru" (Moesa, 2007: 123-124). Dalam

perkembangannya, kyai yang tergabung dalam organisasi NU yang pertama kali menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal. KH. As'ad Syamsul Arifin menegaskan bahwa sebagian besar kyai dan umat Islam Indonesia menerima Pancasila hukumnya wajib (Moesa, 2007: 124) .

Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya Kiai Achmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010:79).

Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Dalam kalimat Menteri Agama (1983-1993), H. Munawir Sjadzali, “Kata-kata ‘negara menjamin’ tidak dapat diartikan sekuler karena apabila demikian, negara atau pemerintah harus *hands off* dari segala pengaturan kebutuhan hukum bagi para pemeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di negara sekuler Pemerintah tidak akan mendirikan tempat-tempat ibadah (Ahmad, 1996: 9-10).

Agama-agama dimandatkan oleh GBHN 1988 bahwa semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila (Soetarman, 1996: 64). Dalam konteks pelaksanaan mandat GBHN ini (meskipun GBHN secara formal sudah tidak berlaku tapi spirit hubungan agama dan pembangunan masih sesuai), maka agama-agama harus mampu mengembangkan kerja sama dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang dihadapi bersama (Soetarman, 1996: 65).

Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama (Eksan, 2000). Abdurrahman Wahid (Gusdur) pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali (Oesman dan Alfian, 1990: 167-168).

Moral Pancasila bersifat rasional, objektif dan universal dalam arti berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Moral Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula diletakkan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya, karena secara *de facto* nilai-nilai Pancasila berasal dari agama-agama serta budaya manusia Indonesia. Hanya saja nilai-nilai yang hidup tersebut tidak menentukan dasar-dasar Pancasila, tetapi memberikan bantuan dan memperkuat (Anshoriy, 2008: 177) posisi Pancasila.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dalam Sambutan pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2005. “Bangsa kita adalah bangsa yang religius; juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Karena itu, setiap umat beragama hendaknya memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, kita akan menempatkan falsafah negara di posisinya yang wajar. Saya berkeyakinan sedalam-dalamnya bahwa lima sila di dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. Dengan demikian, kita dapat menghindari adanya perasaan kesenjangan

antara meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah negara (Yudhoyono dalam Wildan (ed.), 2010: 172).

Dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama mana pun di Indonesia. Penerimaan sadar ini memerlukan waktu lama tidak kurang dari 40 tahun dalam perhitungan Maarif, sebuah pergulatan sengit yang telah menguras energi kita sebagai bangsa. Sebagai buah dari pergumulan panjang itu, sekarang secara teoretik dari kelima nilai Pancasila tidak satu pun lagi yang dianggap berlawanan dengan agama. Sila pertama berupa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dikunci oleh sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” dari sudut pemahaman saya sebagai seorang Muslim, sejalan dan senyawa dengan doktrin tauhid yang menuntut tegaknya keadilan di muka bumi (Maarif, 2012).

Bilamana dirinci, maka hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2012: 215-216):

- a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia itu ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya tiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- c. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
- d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, inter pemeluk agama serta antarpemeluk agama.
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga.
- f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
- g. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
- h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan “...berkat rahmat Allah yang Maha Esa”.

Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila (Wahyudi (ed.), 2009: 58), dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

G. Penutup

Rodee dkk (1995: 54) menyatakan bahwa homogenitas kebudayaan adalah suatu kekuatan luar biasa yang bekerja atas nama identitas nasional. Pada paparan selanjutnya, secara implisit Rodee menyatakan bahwa identitas nasional akan berpengaruh terhadap kestabilan negara. Realitas negara dan bangsa Indonesia teramat heterogen secara budaya, bahkan paling heterogen di dunia, lebih dari itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi tersebut mensyaratkan hadirnya ideologi negara yang dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa.

Implikasinya, fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain terutama yang bangsanya homogen. Bagi bangsa Indonesia, ideologi sebagai identitas nasional merupakan prasyarat kestabilan negara, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen.

Hadirnya ideologi Pancasila, paling tidak akan berfungsi untuk: 1) menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak; 2) menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika; dan 3) menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.

Ada hal-hal yang amat penting dalam melaksanakan ideologi negara Pancasila, agar ideologi tidak disalahgunakan terutama dijadikan alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan oleh elit politik. Maka untuk itu, bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila yaitu taat asas terhadap nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945.

H. Tugas

1. Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi Negara Indonesia? Apa pentingnya ideologi Pancasila ini bagi kita orang Indonesia di zaman sekarang ini?
2. Uraikan bagaimana sebaiknya kita menghidupi ideologi Pancasila dalam kaitannya dengan ideologi-ideologi dunia luar misalnya kapitalisme global, sekularisme profan, westernisasi dan tren arus materialisme dunia global yang mungkin saja berpotensi mengancam ideologi negara kita Pancasila ini? Jelaskan!

Kepusatakaan:

Buku Modul Kuliah Pendidikan Pancasila Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun (2013). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

BAB III

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA²

A. Pendahuluan

² Uraian Materi ini diadaptasi dari Buku Modul Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013, halaman 1-22.

Presiden Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan “*Historia Vitae Magistra*”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan guru kehidupan”.

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “*No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization*” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42).

Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar “*confirm and deepen*” identitas Bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu. Ia adalah identitas Bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan identitas yang *dormant*, yang “tertidur” dan yang “terbius” selama kolonialisme” (Abdulgani, 1979: 22).

B. Sejarah Lahirnya Pancasila

1. Pancasila Pra Kemerdekaan

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4). Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya.

Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori Negara, yaitu: 1) Teori negara perseorangan (individualis), 2) Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri dari: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan) (Kaelan, 2000: 37-40).

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir Soekarno mengatakan, “Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “*Philosofische grond-slag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische grond-slag* itulah

pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi”(Bahar, 1995: 63).

Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, “Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalan daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala” (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut:

1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2000: 29).
2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno, 1993: 20-21).
3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah (Suwarno, 1993: 23-24). Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978: 6).

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah

mengalami kehidupan yang *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja* (Darmodihardjo dkk, 1991: 21). Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda.

Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: *socio-nationalisme*, *socio democratie* dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu “Gotong Royong” karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-19). Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila (di samping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih) (Notosusanto, 1981: 21). Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya Ir. Soekarno diakhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.

Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan *legowo* demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu (Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010: 37).

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka (Ali, 2009: 17). Inilah perjalanan *The Founding Fathers* yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.

2. Pancasila Era Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua

dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik.

Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (Yamin, 1954: 16). Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7 (tujuh) kata dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. *Pertama*, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschauung* bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojokusarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.

3. Pancasila Era Orde Lama

Terdapat dua pandangan besar terhadap Dasar Negara yang berpengaruh terhadap munculnya Dekrit Presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi “anjuran” Presiden/Pemerintah untuk “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945” dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui ‘kembali ke Undang-Undang Dasar 1945’, tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante (Anshari, 1981: 99).

Majelis (baca: konstituante) ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka (Anshari, 1981: 99-100). Dekrit Presiden tersebut berisi:

1. Pembubaran konstituante;

2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi *prelude* penting bagi upaya selanjutnya; Pancasila dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN (Ali, 2009: 30). Manifesto politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara (Ismaun, 1978:105).

Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik “gerilya” di dalam kekuasaan Ir. Soekarno. Mereka menggunakan jargon-jargon Ir. Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama (Ali, 2009: 33). Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu payung besar, bernama Pancasila.

Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Ir. Soekarno pun dilengserkan sebagai Presiden Indonesia, melalui sidang MPRS.

4. Pancasila Era Orde Baru

Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamankan (Setiardja, 1994: 5).

Jadi, Pancasila dijadikan sebagai *political force* di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak *loyo*, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42).

Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

- Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa
- Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Tiga : Persatuan Indonesia

Empat :Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.

Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) yang salah satu pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan, “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

Nilai dan norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan *tepo seliro*.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Cinta tanah air dan bangsa.
- d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

- g. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. Bersikap adil.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak-hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak bersifat boros.
- h. Tidak bergaya hidup mewah.
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j. Suka bekerja keras.
- k. Menghargai hasil karya orang lain.
- l. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut, kemudian pada tahun 1994 disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu: Sila Kesatu, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh) butir; Sila Ketiga, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat, menjadi 10 (sepuluh) butir; dan Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir.

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangundangan di negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan, “Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945” (Ali, 2009: 37).

Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak *reinforcing* oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan Pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai *comparatist ideology*. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 43). Selanjutnya pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan “Azas Tunggal” yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 43-44).

Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup dan manipulasi politik yang sekaligus

mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed), 2010: 45).

5. Pancasila Era Reformasi

Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana Negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000: 245).

Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi (Ali, 2009: 50).

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan *libido dominandi* atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat, 2012).

Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan, “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.

Semakin mudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004 Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandemen UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta (Ali, 2009: 51). Selain keadaan di atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006 (Ali, 2009: 52). Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Lebih dari itu MPR-RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”, yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Akan tetapi, istilah “Empat Pilar Kebangsaan” ini menurut Kaelan (2012: 249-252) mengandung; 1) *linguistic mistake* (kesalahan linguistik) atau dapat pula dikatakan kesalahan terminologi; 2) ungkapan tersebut tidak mengacu pada realitas empiris sebagaimana terkandung dalam ungkapan bahasa, melainkan mengacu pada suatu pengertian atau ide, ‘berbangsa dan bernegara’ itu dianalogikan bangunan besar (gedung yang besar); 3) kesalahan kategori (*category mistake*), karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesiadan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah merupakan kategori yang sama. Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitasatau hakikat pengetahuannya, wujud pengetahuan, kebenaran pengetahuannya serta koherensipengetahuannya.

Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hal tersebut berkorelasi bahwa Undang-Undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu hal tersebut tidak cukup. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali, sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

C. Penutup

Kita sudah bersama menyelidik sejarah lahirnya Pancasila dari awal hingga di zaman kontemporer ini. Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.

D. Tugas

Coba deskripsikan secara garis besar sejarah lahirnya Pancasila itu! Anda belajar makna apa dari sejarah Pancasila itu untuk hidup Anda sendiri sebagai mahasiswa? Jelaskan!

Kepustakaan

Buku Modul Kuliah Pendidikan Pancasila Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun (2013). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIS PENGEMBANGAN IPTEK

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah banyak mendominasi kehidupan manusia, termasuk interaksinya dengan alam sekitar dan sesamanya. Kemajuan Iptek banyak dijadikan sebagai tolok ukur utama untuk menilai maju-tidaknya peradaban umat manusia di berbagai belahan dunia. Tidak mengherankan kalau akhirnya ilmu

pengetahuan dan teknologi diagung-agungkan, dan setiap bangsa berlomba untuk memilikinya. Tapi pertanyaan yang muncul adalah: Apakah Iptek merupakan pilihan satu-satunya bagi pengembangan peradaban manusia, bagi pemenuhan kebutuhannya dan untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapinya? Dan apakah Iptek sama sekali tidak membawa serta sisi-sisi negatif bagi manusia dan kehidupan pada umumnya? Dari kenyataan yang terjadi hingga sekarang ini, semakin disadari bahwa kemajuan yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, selain membawa manfaat besar bagi kehidupan, juga membawa serta di dalamnya masalah-masalah etis yang serius. Itulah ambivalensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bangsa Indonesia ini juga tidak luput dari dampak-dampak persoalan Iptek. Bagaimana kita harus menyikapi persoalan Iptek yang semakin kompleks dewasa ini? Kita membutuhkan dasar, fondasi dalam bertindak secara etis dan terarah. Pancasila adalah fondasi kita sebagai ilmuwan dalam mengembangkan dan menggunakan Iptek. Pancasila dapat diandalkan dan dijadikan sebagai referensi utama orang Indonesia dalam mengembangkan ilmu dan teknologi untuk kebaikan diri, sesama, bangsa dan negara.

B. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan³

1. Kemampuan menalar

Pengetahuan manusia dapat berkembang karena kemampuan menalar yang dimilikinya. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya secara sungguh-sungguh dan tidak hanya sekedar menyangkut kelangsungan hidupnya, seperti halnya pada binatang. Dengan pengetahuannya, manusia mampu mengembangkan kebudayaan, membuat sejarah dan mengembangkan peradabannya, mampu memberi makna kepada kehidupan, dan bahkan mampu memberi jawaban atas panggilan Tuhan terhadapnya. Hal terpenting yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya adalah karena dia mampu menalar atau berpikir. Dengan menalar atau berpikir dimaksudkan kegiatan akal budi untuk “mengolah” pengetahuan yang telah diterima melalui panca indera, dan ditunjukkan untuk mencapai kebenaran. Dengan penalaran, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu, mampu menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, untuk akhirnya menghasilkan satu kesimpulan yang bersifat ilmiah. Karena kemampuan menalar yang dimilikinya maka manusia mengalami kemajuan dalam pengetahuan. Binatang dapat diakui mampu berpikir, namun tidak mampu berpikir nalar. Insting binatang jauh lebih peka dari insting seorang insinyur geologi; mereka sudah jauh-jauh berlindung ke tempat yang aman sebelum gunung meletus. Namun binatang tidak bisa menalar tentang gejala tersebut: tentang mengapa gunung meletus, faktor apa yang menyebabkannya, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak dari kejadian tersebut terhadap lingkungan, dan sebagainya.

Selain kemampuan menalar atau berpikir, hal lain yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya adalah bahasa. Manusia memiliki bahasa yang sangat kaya perbendaharaannya, dan mampu menjadi sarana efektif untuk mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Seekor rusa dapat saja memberikan informasi kepada kelompoknya bahwa ada seekor harimau datang menghampiri mereka, namun dia tidak bisa mengkomunikasikan lebih jauh dari itu, tentang apa yang ada dalam pikirannya, dan tidak dapat membagikan pengalaman itu

³ Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari (2005). Relasi dengan Dunia (Alam, Iptek dan Kerja). Jakarta: Elex Media Komputindo-Universitas Bina Nusantara, hal. 137-150.

kepada kelompok rusa lainnya. Hanya manusia, karena kemampuan bahasanya, mampu membagikan dan mewariskan dengan baik tentang apa saja yang diketahui dan dipikirkannya. Dengan bahasa, manusia dapat melestarikan budayanya.

Sebagai suatu kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama adalah adanya suatu pola berpikir tertentu, yang dapat disebut logika, dan yang kedua adalah sifatnya yang analitik. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis-analitis. Artinya, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah, yang menggunakan suatu pola berpikir tertentu, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang menurut tolok ukur tertentu disebut sah. Akan tetapi, selain berpikiran logis ilmiah, manusia juga adalah makhluk yang berpikir sederhana (tidak bersifat logis analitis, merasa dan mengindera). Walau hal ini tidak termasuk dalam penalaran, namun merupakan sumber-sumber penting bagi terbentuknya pengetahuan manusia. Bahkan kita juga mengenal adanya intuisi dan wahyu, yang merupakan sumber pengetahuan lain bagi manusia. Perasaan juga merupakan suatu penarik kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Demikian juga intuisi tidak merupakan penalaran, melainkan merupakan kegiatan berpikir yang non-analitik, yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola berpikir tertentu.

2. Subjek dan obyek pengetahuan

Dalam proses terjadinya pengetahuan, dua hal harus ada, yakni yang mengenal dan yang dikenal, atau disebut juga, subyek dan obyek. Keduanya dapat dipisahkan dengan jelas, namun untuk bisa terbentuknya pengetahuan, keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, untuk ada pengetahuan, keduanya harus ada. Persoalan tentang mana yang lebih pokok dan lebih dulu dari antara keduanya, yang membuat terjadinya pengetahuan, telah memunculkan perdebatan berkepanjangan sepanjang sejarah filsafat pengetahuan. Persoalannya adalah, manakah yang lebih pokok antara keduanya, apakah subyek (manusia dengan akal budinya), atau obyek, yaitu kenyataan yang dialami di luar diri manusia. Pada bagian lain muncul juga persoalan serupa: Apakah pengetahuan manusia berasal dari akal budi manusia ataukah dari pengalaman manusia akan realitas obyektif di luar dirinya. Perdebatan inilah yang telah melahirkan aliran pemikiran filsafat, *rasionalisme* dan *empirisme*, atau istilah lain yang berkaitan dengan itu, pengetahuan *apriori* dan pengetahuan *aposteriori*.

Yang pertama adalah pengetahuan atau pengenalan akal budi yang tidak berdasarkan pada pengalaman, sedangkan yang terakhir adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Yang pertama menggunakan metode *deduksi* (dari yang umum ke khusus) sedangkan yang terakhir memakai metode *induksi* (dari yang khusus ke umum).

Walaupun perdebatan tentang hal di atas telah menyita perhatian pemerhati filsafat pengetahuan, namun bagi kita, yang tidak bisa disangkal adalah kedua unsur tersebut sangatlah penting. Untuk terjadinya pengetahuan si subyek haruslah terarah pada obyek, dan obyek juga diandaikan terbuka atau terarah pada subyek. Hanya dengan keterbukaan dan keterarahan ini pengetahuan dimungkinkan terjadi. Akan tetapi, dalam pembicaraan mengenai pengetahuan, manusia sebagai subyek pengetahuan memiliki peran sangat penting. Untuk memiliki pengetahuan maka manusia harus terbuka dan menangkap obyek sebagaimana adanya. Hal ini bisa terjadi hanya karena manusia sebagai subjek adalah bagian dari obyek, yaitu realitas di alam semesta ini. Artinya, manusia hanya mampu menangkap obyek yang ada di sekitarnya karena tubuh jasmani manusia adalah bagian dari realitas alam semesta. Hal ini yang memungkinkan manusia mengenal dunia dan segala isinya. Pada tingkat inilah pengetahuan manusia dianggap bersifat temporal, bersifat

kongkret, jasmani-inderawi. Tetapi karena manusia tidak hanya terdiri atas jasmani, melainkan terdiri atas jiwa yang mengatasi tubuh jasmaninya yang terbatas, maka dengan bantuan unsur rohaninya (akal budi), manusia mampu mengangkat pengetahuan yang temporal dan konkrit tadi ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat abstrak dan universal. Dengan akal budinya manusia mampu melakukan abstraksi, perbandingan, mampu melakukan refleksi dan penggalian lebih dalam dari apa yang diketahuinya secara inderawi-jasmani, untuk sampai pada pengetahuan yang bersifat umum dan berlaku universal. Artinya, pengetahuan manusia tidak hanya berkaitan dengan obyek kongkret khusus yang dikenalnya melalui pengamatan inderanya, melainkan juga melalui itu dimungkinkan untuk sampai pada pengetahuan abstrak tentang berbagai obyek lain, yang secara teoretis dapat dijangkau oleh akal budi manusia, dan karena itu berlaku umum bagi obyek mana saja, yang bisa dijangkau akal budi manusia pada tempat dan waktu manapun.

Berkat keistimewaannya manusia tidak hanya tahu tentang sesuatu melainkan juga tahu bahwa ia mengetahui tentang sesuatu itu. Manusia tahu atau sadar bahwa ia tahu. Dengan kesadarannya manusia melakukan refleksi atas apa yang diketahuinya. Berkat refleksi ini maka pengetahuan yang semula bersifat langsung dan spontan, kemudian diatur dan dibakukan secara sistematis sedemikian rupa, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan, atau dapat dikritik dan dibela. Dengan cara inilah lahir apa yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan muncul karena apa yang sudah diketahui secara spontan dan langsung tadi, disusun dan diatur secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat baku.

Pengetahuan manusia yang bersifat abstrak umum dan universal itulah yang memungkinkannya untuk dirumuskan dan dikomunikasikan dalam bahasa yang bersifat umum dan universal, untuk bisa dipahami oleh siapa saja, pada waktu dan tempat mana saja. Melalui bahasa, pengetahuan manusia yang konkret dan abstrak dibakukan, dikomunikasikan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari situlah kemudian orang dapat mempelajari, mempersoalkan, mendalami, mengubah dan mengembangkan lebih lanjut pengetahuan tersebut untuk mendapatkan pengetahuan baru, yang mungkin lebih melengkapi yang sudah ada.

Dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya, secara langsung ataupun tak langsung. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan yang telah dibakukan secara sistematis. Pengetahuan lebih bersifat spontan, sedangkan ilmu pengetahuan lebih bersifat metodis dan sistematis. Dilihat dari situ, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan jauh lebih luas daripada ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara sistematis. Pengetahuan mencakup penalaran, penjelasan dan pemahaman manusia tentang segala sesuatu. Juga mencakup praktek atau kemampuan teknis dalam memecahkan berbagai persoalan hidup yang belum dibakukan secara sistematis dan metodis.

3. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan

Berbicara mengenai ilmu pengetahuan, kita tidak boleh melupakan tahap-tahap awal mulai berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Tahap awal yang dimaksud adalah filsafat. Semua ilmu pengetahuan berawal dari filsafat, sehingga filsafat disebut sebagai induk semua ilmu pengetahuan. Meminjam pemikiran Will Durant, filsafat dapat diibaratkan

pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri adalah pengetahuan, yang di antaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Baru sesudahnya ilmu yang membelah gunung dan merambah hutan, menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan. Setelah penyerahan dilakukan maka filsafat pun pergi. Dia kembali menjelajah laut lepas, berspekulasi dan meneratas.

Filsafat, yang sudah berjalan selama lebih dua ribu tahun, sepertinya tidak ada kemajuan. Hal itu harus dimengerti, karena filsafat bukanlah pengetahuan yang bersifat memerinci, yang sampai pada pembuktian empiris. Filsafat adalah marinir yang merupakan pionir. Sesudah suatu daerah dia menangkan, dia menyerahkan daerah itu kepada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, untuk menyelidiki bagian-bagian dari daerah itu secara rinci dan empiris. Dari asumsi-asumsi dan spekulasi filsafat mulailah penelusuran untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan positif, yang dapat diverifikasi secara empiris. Namun demikian, semua ilmu, baik itu ilmu-ilmu alam, maupun ilmu-ilmu sosial merupakan pengembangan lebih rinci dari bentuknya yang semula sebagai filsafat. Issac Newton (1642-1727) menulis hukum-hukum fisiknya sebagai *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1686), dan Adam Smith (1723-1790), bapak ilmu ekonomi menulis buku *The Wealth of Nations* (1776) dalam fungsinya sebagai Professor of Moral Philosophy di Universitas Glasgow. Nama asal fisika adalah filsafat alam (*natural philosophy*), dan nama asal ekonomi adalah filsafat moral (*moral philosophy*).

Filsafat, yang dari awal terdiri atas beberapa cabang saja, kemudian berkembang dan memecah ke dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan, yang kemudian memecah lagi ke dalam spesifikasi yang semakin menyempit. Jadi, dalam perkembangan filsafat menjadi ilmu, terdapat taraf peralihan. Peralihan itu terjadi ketika penjelajahan mulai dipersempit dan tidak lagi menyeluruh. Umpamanya, ilmu ekonomi, di sini orang tidak lagi memperlakukan moral secara keseluruhan melainkan dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada taraf ini ilmu tadi secara konseptual masih mendasarkan diri pada norma-norma filsafat, dengan metode normatif dan deduktif, berdasarkan azas-azas moral filsafati. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bentuk penerapan etika (filsafat moral) dalam kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Tinjauan khusus untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip etis dalam kegiatan ekonomi, muncul dalam bentuk etika terapan, yang biasa disebut sebagai *Business Ethics*. Jadi, pada taraf peralihan dari filsafat ke ilmu pengetahuan, ilmu masih mendasarkan diri pada norma-norma yang seharusnya, sedangkan pada tahap selanjutnya ilmu menyatakan diri otonom dari konsep-konsep filsafat, dan mendasarkan sepenuhnya pada penemuan alamiah sebagaimana adanya. Dalam penyusunan pengetahuan tentang alam dan isinya, manusia tidak lagi mempergunakan metode yang bersifat normatif dan deduktif, melainkan kombinasi antara deduktif dan induktif, dengan jembatan yang berupa pengajuan hipotesis yang dikenal sebagai metode *logico-hypothetico-verifikatif*. Auguste Comte (1798-1857) pernah membuat pembagian ke dalam tiga tingkat perkembangan pengetahuan, yakni: tahap religius, tahap metafisik dan tahap positif. Dalam tahap pertama maka azas religilah yang dijadikan postulat ilmiah dan menentukan kebenaran. Di sini ilmu merupakan deduksi atau penjabaran dari ajaran religi, dan semua kebenaran ilmu dikembalikan pada kebenaran religi sebagaimana diterima dalam suatu kepercayaan. Sementara pada tahap kedua, orang mulai berspekulasi tentang keberadaan wujud yang menjadi objek penelaahan yang tidak terikat lagi dari dogma religi, dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisika (filsafat pertama, ontologi, yang

berbicara tentang ada sejauh ada).

Tahap ketiga adalah tahap pengetahuan ilmiah (ilmu), di mana azas-azas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang obyektif.

Apa itu filsafat? Sulit dijawab secara singkat. Filsafat pertama-tama adalah sikap, yakni sikap mempertanyakan atau bertanya tentang segala sesuatu. Dan tentu saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan ada jawaban yang diberikan. Namun bagi filsafat, jawaban itu dipertanyakan lagi, dan demikian seterusnya, sehingga filsafat bertanya tiada akhir. Itulah sebabnya filsafat dianggap sebagai sesuatu yang bermula dari pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Inilah hakikat dari filsafat, yakni bertanya terus menerus, maka filsafat adalah sikap bertanya itu sendiri.¹⁰ Sebuah pertanyaan dapat digolongkan sebagai pertanyaan filosofis apabila pertanyaan itu menyangkut hakikat dari sesuatu, suatu pertanyaan yang tidak bisa diverifikasi secara matematis atau empiris. Ketika suatu pertanyaan dapat dijawab dengan jawaban yang dapat diverifikasi secara empiris, maka jawaban itu sudah merupakan jawaban final, dan tidak perlu dicari jawaban lain lagi, maka pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan filosofis. Filsafat mengajukan pertanyaan yang menyangkut hakikat dari sesuatu secara menyeluruh. Tujuan yang ingin dicapai dari pertanyaan filsafat adalah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang sesuatu. Walau jawaban-jawaban yang diberikan atas suatu pertanyaan filosofis tidak menuntut verifikasi secara empiris, namun usaha mencari jawaban mendalam atas suatu pertanyaan filosofis harus dilakukan secara metodis dan sistematis, untuk menghasilkan penjelasan atau jawaban yang memenuhi tuntutan rasionalitas. Itu sebabnya filsafat dapat diartikan sebagai refleksi kritis, sistematis, analisis dan metodis, tentang keseluruhan kenyataan, dengan maksud untuk memperoleh paham (*insight*).

Filsafat, dengan hakikatnya bertanya, mau mencapai suatu kebenaran mendasar dan menyeluruh. Kebenaran yang dimaksud dalam filsafat bukanlah kebenaran akhir, karena apa yang pada titik tertentu diyakini sebagai kebenaran, selalu akan diliputi oleh tanda tanya. Walau kebenaran yang dicapai dalam filsafat bukanlah kebenaran final, namun dengan bertanya, termasuk mempertanyakan kembali jawaban yang sudah ada, orang akan semakin memahami makna segala sesuatu, termasuk hidup ini. Dengan bertanya, orang akan semakin mengambil sikap terhadap realitas, terhadap kehidupan seluruhnya. Dengan bertanya, orang menghadapi realitas kehidupan sebagai sebuah masalah, sebuah pertanyaan, sebuah tugas untuk digeluti. Dari pergumulan ini akhirnya orang sampai pada pemahaman menyeluruh, kebenaran yang memenuhi tuntutan akal sehat, yang memampukan seseorang mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan tentang hidup ini. Sekali kebenaran telah dicapai, maka sambil berpegang pada kebenaran itu, seseorang mempertanyakannya kembali, karena bagi filsafat, setiap jawaban yang ada hanyalah jawaban sementara, yang akan terus dipertanyakan dan dikritik terus menerus. Itulah sebabnya filsafat disebut sebagai ilmu yang tak pernah selesai, suatu pencarian tanpa akhir, sebuah ilmu tanpa batas.

Filsafat sesungguhnya mengajak orang untuk mempertanyakan, mempersoalkan, mengkaji, dan mendalami hidup ini dari segala aspek. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sokrates (seorang filsuf Yunani kuno) bahwa, "Hidup yang tidak dikaji tidak layak dihidupi". Artinya, menjalani kehidupan ini tanpa mempersoalkannya (bertanya tentangnya), sama dengan hidup sebagai orang buta. Dengan demikian, filsafat merupakan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini, dengan terus mempertanyakannya, dengan tidak puas hanya menerima jawaban-jawaban dan penjelasan yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk membantu seseorang dalam menentukan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalani hidup ini.

4. Pengetahuan dan keyakinan

Walau antara pengetahuan dan keyakinan terdapat kaitan erat, namun keduanya tidaklah sama. Pengetahuan dan keyakinan sama-sama merupakan pengakuan seseorang akan obyek tertentu sebagai yang ada atau terjadi. Perbedaannya terletak pada ada-tidaknya obyek itu dalam kenyataan. Dalam hal pengetahuan, obyek yang diakui sebagai ada itu harus ada dalam kenyataannya; sedangkan dalam hal keyakinan, obyek itu bisa saja dalam kenyataannya tidak ada. Dengan demikian, pengetahuan berkaitan dengan kebenaran, yang ditunjang dengan buktibukti yang memadai. Tindakan yang didasarkan pada pengetahuan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Keyakinan seorang hakim bahwa seorang terdakwa bersalah, tidak cukup sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman atasnya. Diperlukan bukti -bukti, fakta, saksi yang jelas untuk menyimpulkan bahwa hakim itu tahu bahwa si terdakwa bersalah, dan dengan demikian dapat memutuskan hukuman atasnya.

Walau kita tahu banyak hal, tetapi ketika kita tidak sadar akan apa yang kita ketahui itu, hal tersebut belumlah merupakan pengetahuan bagi kita. Pengetahuan selalu mensyaratkan adanya kesadaran bahwa si subyek itu sendiri tahu bahwa dia tahu sesuatu, tanpa keraguan. Maka supaya ada pengetahuan, penting bahwa apa yang diklaim sebagai diketahui itu harus ada dalam kenyataan; dan di pihak lain dituntut juga bahwa si subyek sendiri harus sadar bahwa dia tahu tentang apa yang diklaimnya sebagai diketahui itu. Apa yang merupakan pengetahuan itu biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau proposisi. Umpamanya "Besi kalau dipanaskan memuai". Dan pengetahuan yang diungkapkan dalam proposisi itu hanya sah dianggap sebagai pengetahuan kalau proposisi itu memang dalam kenyataannya benar sebagaimana yang diungkapkan.

C. Ambivalensi Kemajuan Iptek⁴

1. Optimisme kemajuan ilmu

Tidak dapat disangkal bahwa ilmu p pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa kemudahan dalam kehidupan manusia. Ada cukup banyak hal sebelumnya tidak terbayangkan, sekarang menjadi kenyataan. Hal ini terjadi di banyak bidang kehidupan, seperti misalnya di bidang transportasi dan komunikasi, yang kini sangat memudahkan setiap orang untuk pergi atau melakukan komunikasi kepada banyak orang. Di bidang pelayanan kesehatan terjadi kemajuan sangat pesat yang telah membuat hidup bisa lebih berkualitas dan meningkatkan umur harapan hidup. Hal yang utama bertambah dengan kemungkinan-kenungkinan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemampuan manusia itu sendiri. Filsuf Inggris, Francis Bacon (1561-1623) sudah menyadari aspek penting ini dengan menekankan bahwa *knowledge is power*. Dan filsuf Perancis, Rene Descartes (1596-1650) menuliskan sebuah keyakinannya di bagian akhir salah satu bukunya, bahwa umat manusia bisa menjadi "penguasa dan pemilik alam". Kepercayaan akan kemajuan ilmu pengetahuan menjadi sangat kentara dalam pemikiran filsuf Perancis, Auguste Comte (1798-1857), yang memandang zaman ilmiah – yang disebutnya "zaman positif" – sebagai puncak dan titik akhir seluruh sejarah.

Pandangan optimistis manusia akan kemajuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung terus, dan mencapai puncaknya dalam abad ke-19. Ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai kunci utama untuk memecahkan

⁴ Ibid., Antonius Atosokhi Gea, hal. 156-163.

berbagai kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Namun, pandangan yang begitu optimistis ini harus segera ditinjau kembali. Dengan berbagai kenyataan yang ada, kita harus berani melakukan penilaian, bukan hanya atas segi positif dari iptek itu sendiri, melainkan juga atas sisi negatifnya. Sejalan dengan hal-hal positif yang dibawakannya, ternyata banyak juga sisi negatif yang terkait dengan konotasi etis, yang dibawa serta oleh kemajuan iptek itu sendiri dalam kehidupan. Kalau sebelumnya hanya terdapat kekaguman terhadap kemajuan luar biasa dari iptek, maka ketika bom atom pertama dijatuhkan di atas kota Hiroshima, 6 Agustus 1945, disusul tiga hari kemudian di atas kota Nagasaki, kesadaran umat manusia akan sisi negatif dari kemajuan Iptek, menjadi terbuka. Ini adalah hasil dari kemajuan penguasaan fisika nuklir. Dari penguasaan yang semakin baik di bidang fisika dan kimia telah dikembangkan berbagai persenjataan, termasuk persenjataan pemusnah massal. Sudah berapa banyak yang telah menjadi korban dari persenjataan seperti itu. Dan sekarang umat manusia senantiasa dihantui oleh ketakutan dan kecemasan berkepanjangan, kapan hidupnya diakhiri oleh senjata-senjata maut itu. Berbagai fakta juga menunjukkan bahwa perkembangan pesat dalam penguasaan teknologi tanpa batas dalam industri modern telah membawa kerusakan besar pada lingkungan hidup. Begitu juga dalam dunia ilmu kedokteran dan biomedis, di mana telah banyak bermunculan aneka persoalan etis yang serius bagi manusia. Inilah yang dimaksud ambivalensi kemajuan iptek, yakni bahwa iptek itu sendiri membawa serta, baik sisi positif maupun sisi negatif bagi kehidupan.

2. Masalah bebas nilai

Hal yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah: apakah ilmu itu bebas nilai, artinya tidak ada hubungan dengan nilai-nilai? Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ada pro dan kontra mengenai kaitan antara ilmu dan moral atau dengan nilai.

Metode ilmu pengetahuan memang otonom dan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Tidak ada instansi lain yang berhak menyensor dan menentukan penelitian ilmiah. Dan memang kini sudah semakin diterima tanpa keberatan bahwa ilmu adalah otonom dalam mengembangkan metode dan prosedurnya. Tidak ada hak atau kuasa dari instansi lain, entah itu terjadi atas nama nilai moral, nilai kagamaan, pertimbangan nasional, atau alasan apa pun juga. "Kami mencari kebenaran dan bukan sesuatu yang lain" sudah lama menjadi semboyan banyak ilmuwan.

Campur tangan instansi lain dalam metode ilmiah tidak saja merugikan ilmu, tapi merugikan juga instansi itu sendiri, karena kredibilitasnya bisa berkurang, lebih-lebih bila terbukti kemudian bahwa apa yang dihasilkan oleh ilmu itu merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Contoh klasik adalah tentang seorang ilmuwan Italia, Galileo Galilei, yang pada tahun 1633 dipaksa oleh Gereja Katolik untuk menarik kembali teorinya bahwa bumi mengelilingi matahari dan tidak sebaliknya, karena dinilai oleh Gereja bertentangan dengan Kitab Suci. Ternyata kemudian, apa yang dikemukakan oleh Galileo Galilei itu, benar. Dalam abad ke-20 ini masih terjadi kasus yang sejenis di mana dalam hal ini negara campur tangan dalam menentukan kebenaran atau ketidakbenaran penemuan ilmiah. Di Uni Soviet, ahli biologi dan genetika, T.D. Lysenko, berhasil meyakinkan pemerintah Stalin bahwa teori genetika Mendel yang tradisional itu bersifat anti-Marxistis dan bahwa teorinya sendiri sesuai dengan ajaran komunis dan akan memungkinkan loncatan maju di bidang pertanian. Ternyata di kemudian hari terbentuk pendapat umum di kalangan ilmuwan bahwa teori Lysenko itu tidak benar. Tapi, dengan wibawa kekuasaan yang ada di tangannya, Stalin memenangkan Lysenko dan para pengikutnya, sedangkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak sependapat disingkirkan. Seorang ahli genetika terkemuka, N.I.

Vavilov, yang ternyata berani mengkritik teori Lysenko, meninggal dalam kamp konsentrasi sebagai “martir” demi ilmu pengetahuan yang otonom.

Pada tempatnyalah bahwa metode ilmu pengetahuan itu otonom dalam mencari kebenaran. Akan tetapi, perlu diakui juga bahwa ilmu, dan terutama teknologi – sebagai penerapan ilmu teoretis – akan berhadapan dengan nilai-nilai. Sebenarnya, selama seorang ilmuwan bergumul dengan pertanyaan “bagaimana” (bagaimana struktur materi, bagaimana caranya membuat mesin mobil yang irit bahan bakar, bagaimana membuat mesin komputer berkecepatan tinggi, dan sebagainya) mungkin dia hanya mencari kebenaran murni. Atas pertanyaan “bagaimana” itu bisa jadi teori ilmiah dan penerapannya dalam teknik memberi jawaban. Namun, pertanyaan tidak berhenti hanya sampai di situ. Dan itu adalah pertanyaan penting, yakni “untuk apa”? Dan kalau ditelusuri lebih dalam, maka kenyataan memperlihatkan bahwa pertanyaan terakhir itu tidak terlepas dari pertanyaan pertama. Sebenarnya seorang ilmuwan dapat membatasi diri hanya dalam lingkup pertanyaan “bagaimana” dan tidak berpikir tentang “untuk apa”. Ini dapat kita temukan dalam diri seorang ilmuwan Amerika yang ikut serta dalam “Manhattan Project”, suatu proyek yang mengembangkan bom atom pertama pada awal tahun 1940-an. Ketika dia ditanya tentang implikasi lebih lanjut dari proyek ilmiah itu, ia menjawab: *After all, it is superb physics*, “Bagaimanapun juga, inilah fisika yang luar biasa”. Si ilmuwan ini tidak keluar dari ruang lingkup pertanyaan “bagaimana”, dia membatasi diri pada segi ilmiah saja. Hal yang sama bisa terjadi untuk bidang-bidang lain, di mana seorang ilmuwan benar-benar hanya membatasi diri untuk mencari kebenaran murni, tanpa ada maksud-maksud lain di luar itu, umpamanya mau menggunakan untuk apa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pekerjaan ilmuwan tadi, yang hanya bermaksud mengungkap kebenaran ilmiah dari suatu fisika yang luar biasa itu, tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi beberapa waktu kemudian di kota Hiroshima dan Nagasaki. Di sinilah hal yang tidak dipikirkan sebelumnya menjadi kenyataan, yakni kebenaran ilmiah yang berhasil diungkap itu digunakan untuk tujuan tertentu.

3. Kemenangan ilmu pengetahuan

Pada awal mulai berkembangnya, ilmu pengetahuan sudah dihadapkan dengan masalah-masalah moral, yang sebagian besarnya bersumber dari ajaran agama. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain berkembang keinginan agar ilmu didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran lain di luar bidang keilmuan. Itulah yang terjadi pada diri Galileo yang terpaksa menjalani pengadilan inkuisisi²² pada tahun 1633. Dapat dikatakan, kurang lebih dua setengah abad sejak pengadilan inkuisisi Galileo, peristiwa itu telah mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa, di mana terjadi semacam pertarungan antara ilmu yang ingin terbebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan yang ingin menjadikan nilai-nilainya sebagai penafsiran metafisik keilmuan. Dalam suasana pengaruh yang sangat kuat dari agama (Gereja), para ilmuwan tetap berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya. Setelah pertarungan selama kurang lebih dua ratus lima puluh tahun itu akhirnya ilmu pengetahuan mendapatkan kemenangan. Sejak saat itu ilmu memperoleh otonomi dalam melakukan penelitian-penelitian dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya.

Mendapatkan pelepasan dari kungkungan segenap nilai yang bersifat dogmatik-gerejani maka ilmu dengan leluasa dapat mengembangkan dirinya. Berbagai pengembangan konseptual pemikiran yang bersifat kontemplatif dilanjutkan dengan penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah-masalah praktis. Dengan

demikian konsep-konsep ilmiah yang bersifat abstrak menjelma dalam bentuk yang semakin konkrit, yakni teknologi. Jadi teknologi di sini kita artikan sebagai penerapan konsep ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah praktis, baik yang berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Dalam tahap ini ilmu tidak saja bertujuan menjelaskan gejala-gejala alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman, namun lebih jauh lagi, bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Perkembangan ini, Bertrand Russell menyebutnya sebagai peralihan ilmu dari kontemplasi ke manipulasi.

D. Peluang Penyalahgunaan Iptek⁵

Ada besar sekali kemungkinan penyalahgunaan atas kemajuan iptek. Tidak sedikit kejadian di mana iptek digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Kasus di bawah ini bisa melukiskan kepada kita contoh penyalahgunaan Iptek oleh insan-insan tidak bertanggung jawab di republik ini.

INDONESIA PERINGKAT PERTAMA PELAKU KEJAHATAN INTERNET

Indonesia menduduki peringkat tertinggi sebagai pelaku cyber crime atau kejahatan internet. Sebesar 90 persennya adalah kejahatan carding atau pemalsuan kartu kredit. Kecenderungan ini diduga akan terus meningkat. Hal itu disampaikan anggota Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V Infotek-Cyber Crime Komisaris Polisi Idam Wasiadi pada Seminar Nasional sehari Information Technology Security di Hotel Horison Bandung, Selasa (13/9). Menurut Idam, tahun 2004 kejahatan carding mencapai 177 dari 192 kasus kejahatan internet. Tahun sebelumnya, kejahatan carding 145 dari 153 kasus kejahatan internet. "Angka itu dipastikan akan meningkat pada tahun ini. Tahun 2003 Indonesia di posisi kedua di bawah Ukraina, dan tahun lalu Indonesia di peringkat satu", ujar Idam. Kenyataan ini dibenarkan oleh ahli telematika Roy Suryo Notodiprodjo. Roy menegaskan, kejahatan carding tahun 2002 sudah tin ggi, yaitu 152 dari 155 kejahatan internet. Hampir seluruhnya bermotifkan ekonomi, bahkan pelakunya sebagian besar adalah mahasiswa. "Pasalnya, 48 persen pen gguna internet adalah usia 22-25 tahun, kebanyakan mereka mahasiswa. Terbanyak kedua usia 18-21 tahun, sekitar 28 persen", katanya. Daerah Jogjakarta menduduki peringkat tertinggi untuk kasus kejahatan carding, disusul dengan Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Riau. Amerika Serikat adalah negara korban yang paling sering menjadi sasaran kejahatan carding dari Indonesia, sekitar 84 persen.

Idam mengakui, sumber daya manusia di kepolisian belum menguasai teknologi dengan maksimal. Sampai saat ini Markas Besar Kepolisian RI masih berperan sebagai penyelia untuk kasus di daerah. Sementara Roy mengakui, meningkatnya kejahatan ini disebabkan belum adanya undang-undang tentang kejahatan internet di Indonesia, ditambah lagi kemajuan teknologi yang pesat. "IT Crime itu didukung sendiri oleh kemajuan teknologinya", kata Roy. Ketiadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebenarnya dihambat oleh sikap masyarakat yang apatis terhadap masalah ini. RUU ITE yang sudah tiga tahun diajukan belum juga disetujui DPR.

⁵ Ibid., Antonius Atosokhi Gea, hal. 190-201.

1. Penyalahgunaan komputer

Penyalahgunaan atau kejahatan komputer, walau umumnya lebih terbatas pada kalangan tertentu (yang menguasai kemampuan untuk itu) sudah banyak terjadi. Pelaku kejahatan komputer cenderung cerdas dan memandang eksploitasi mereka sebagai tantangan intelektual. Berbeda dengan bentuk kejahatan lain, terminal komputer secara fisik dan psikologis jauh dari kontak tatap muka secara langsung dengan korban kejahatan tersebut. Juga tidak seperti penjahat dengan kekerasan, penjahat komputer mudah menipu diri sendiri bahwa mereka tidak merugikan orang lain, khususnya bila mereka memandang perbuatan mereka tidak lebih daripada sekedar olok-olok saja. Keadaan ini semakin diperburuk oleh kurang memadainya perlindungan terhadap korban kejahatan komputer. Teknologi untuk mencegah kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan komputer selalu tertinggal di belakang implementasi aplikasi-aplikasi komputer baru. Yang jelas, kejahatan komputer telah banyak melanggar hak atas privasi, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun kelompok, baik untuk tujuan penyalahgunaan demi keuntungan diri sendiri atau kelompok, maupun hanya untuk sekedar membuat kekacauan.

1. Malpraktek

Kasus malpraktek termasuk di antara tindakan penyalahgunaan iptek. Setiap tindakan artifisial dalam mengubah bagian-bagian tubuh, di samping ada manfaatnya, terdapat juga efek buruknya. Di sini termasuk semua tindakan penggunaan obat untuk maksud yang sama, dan tidak hanya terbatas pada pembedahan atau tindakan operasi lainnya. Tapi lebih dari itu, tindakan mengubah bagian tubuh yang normal sesuai dengan selera ambisius seseorang dapat dikatakan sebagai ketidakpuasan atas karya dan anugerah Tuhan. Tindakan operasi plastik atau operasi lainnya, yang dimaksud untuk memperbaiki bagian tubuh yang cacat, entah karena bawaan lahir, karena penyakit atau kecelakaan, tentu pantas dipertimbangkan, dengan maksud utama adalah memperbaiki bagian yang rusak, agar sedapat mungkin bisa berfungsi kembali dengan baik. Penggunaan teknologi untuk hal yang terakhir ini telah banyak menolong para penderita. Ini suatu hal yang pantas disyukuri. Akan tetapi penyalahgunaan teknologi terjadi ketika tindakan - tindakan medis seperti itu digunakan di luar tujuan-tujuan seperti disebut di atas, bukan untuk menyembuhkan suatu penyakit atau cacat, melainkan untuk mengubah bentuk bentuk tubuh sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Dari pihak rumah sakit, perawat, dokter, atau petugas medis lainnya, terjadi juga kesalahan apabila mereka menyalahgunakan peluang yang ada untuk melakukan hal-hal yang membuat pasien jadi korban, seperti menjadikan pasien sebagai kelinci percobaan.

3. Eksploitasi terhadap dunia ketiga.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, dengan sendirinya telah menciptakan kebutuhan yang terus membengkak, dan telah memaksa orang-orang kaya, yang jumlahnya merupakan minoritas di antara penduduk dunia, untuk memenuhi kebutuhan ambisius mereka, dengan mengklaim hak-hak istimewa yang sebenarnya sudah tidak pada tempatnya. Akibatnya, berjuta-juta petani dan pengrajin telah terenggut dari tanah mereka, terusir dari sumber penghasilan mereka. Hal ini juga terjadi pada skala internasional yang sangat luas, di mana telah terjadi perlakuan yang tidak sepatutnya oleh negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin dan kurang berkembang. Adanya rencana-rencana

gila berselimutkan *appropriate technology*, di mana tanah garapan produktif negara miskin dikelola oleh *transnational corporations* dan elite setempat, yang tujuannya hanya untuk pemuasan sekelompok orang kaya dunia. Juga terjadi pengikisan orang-orang miskin yang sedang tumbuh dengan aktivitas produktif, melalui pemekaran bentuk-bentuk teknologi yang padat modal, yang membuat guncangan bagi orang-orang miskin karena ketiadaan pekerjaan.

4. Ancaman iptek terhadap budaya

Teknologi telah banyak berkembang termasuk dalam hal teknologi informasi, sehingga negara-negara mampu menyampaikan pesan-pesan apa saja ke negara-negara berkembang dan miskin, melalui beraneka media yang mudah digunakan dan didapatkan. Pesan-pesan itu cenderung menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi dunia terbelakang, sementara menguntungkan bagi negaranegara pengirim pesan. Pesan-pesan yang disampaikan dapat menimbulkan dalam hati para pendengar, harapan-harapan yang mungkin tidak bisa dicapai, sikap serta gaya hidup yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi dan tuntutan mendesak negara itu sendiri. Pengaruh dari pesan-pesan tadi bisa lebih buruk lagi di mana kreativitas kultural asli dari negara-negara berkembang dan miskin tertindih dan terkikis habis. Dengan demikian, negara-negara berkembang atau negara kurang berkembang menghadapi risiko bahwa statusnya secara berangsur -angsur akan surut sampai menjadi konsumen belaka dari produk pabrik maupun produk kebudayaan dari peradaban-peradaban lain. Kalau hal itu dibiarkan terus maka akan terjadi ketergantungan terus menerus negara-negara kurang berkembang kepada negara yang lebih maju.

E. Pancasila sebagai Dasar Etis Pengembangan Iptek

1. Etika Pancasila⁶

Etika Pancasila tidak memposisikan diri secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar etika dalam filsafat yang umum dikenal. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan

⁶ Baca lebih lanjut Buku Modul Kuliah Pendidikan Pancasila Dikti, hal. 100-103.

kasih sayang antarsesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan lain-lain

Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.

Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke-1), namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.

Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI menyetujui tujuh kata tersebut, namun memperhatikan kelompok yang sedikit (dari wilayah Timur) yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas 'dimenangkan' atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.

Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg (1995: 37), keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai *partner* yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain.

Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun, kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi.

Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan dll. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dll. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama dll.

2. Pancasila sebagai Solusi Persoalan Bangsa⁷

Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan dan lain-lain, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari badan-badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang *notabene* badan-badan inilah yang seharusnya mengemban amanat rakyat. Setiap hari kita disuguhi beritaberita *mal-amanah* yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya rakyat untuk menjalankan mesin pembangunan ini.

Sebagaimana telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warganegaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki, namun hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas memberi dasar, warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moralitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu moralitas individu, moralitas sosial dan moralitas mondial.

Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin belajar, rajin ibadah dan lain-lain. Moralitas ini muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar. Bahkan, dalam situasi amoral yang terjadi di luar dirinya, seseorang yang memiliki moralitas individu kuat akan tidak terpengaruh. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Adapun moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku di manapun dan kapanpun, moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi seorang yang moral individunya baik tapi moral sosialnya kurang, hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Sikap toleran, suka membantu seringkali hanya ditujukan kepada orang lain yang menjadibagian kelompoknya, namun tidak toleran kepada orang di luar kelompoknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa moral sosial tidak cukup sebagai kumpulan dari moralitas individu, namun sesungguhnya lebih pada bagaimana individu melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang sama.

Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas sosial, demikian pula sebaliknya. Seseorang yang moralitas individunya baik ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk dapat terpengaruh menjadi imoral. Kenyataan seperti ini seringkali terjadi pada lingkungan pekerjaan. Ketika lingkungan pekerjaan berisi orang-orang yang bermoral buruk, maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan atau diperlakukan tidak adil. Seorang yang moralitas individunya lemah akan terpengaruh untuk menyesuaikan diri dan mengikuti. Namun sebaliknya, seseorang yang memiliki moralitas individu baik akan tidak terpengaruh bahkan dapat mempengaruhi lingkungan yang bermoral buruk tersebut. Moralitas dapat dianalogikan dengan seorang kusir kereta kuda yang mampu mengarahkan ke mana kereta akan berjalan. Arah perjalanan kereta tentu tidak lepas dari ke mana tujuan hendak dituju. Orang yang bermoral tentu mengerti mana arah yang akan dituju, sehingga pikiran dan langkahnya akan diarahkan kepada tujuan tersebut,

⁷ Buku Modul Kuliah Pancasila, hal. 103-106.

apakah tujuannya hanya untuk kesenangan duniawi diri sendiri saja atau untuk kesenangan orang lain atau lebih jauh untuk kebahagiaan ruhaniah yang lebih abadi, yaitu pengabdian pada Tuhan.

Pelajaran yang sangat berharga dapat diteladani dari para pendahulu kita yang berjuang demi meraih kemerdekaan. Moralitas individu dan sosial yang begitu kuat dengan dipayungi moralitas mondial telah membuahkan hasil dari cita-cita mereka, meskipun mereka banyak yang tidak sempat merasakan buah perjuangannya sendiri. Dasar moral yang melandasi perjuangan mereka terabadikan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam alinea-alineanya.

Alinea pertama, “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Alinea ini menjadi payung moral para pejuang kita bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas kemerdekaan pada bangsa kita. Pelanggaran atas hak kemerdekaan itu sendiri merupakan pelanggaran atas moral mondial, yaitu perikemanusiaan dan perikeadilan. Apapun bentuknya penjajahan telah meruntuhkan nilai-nilai hakiki manusia. Apabila ditilik dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tampak jelas bahwa moralitas sangat mendasari perjuangan merebut kemerdekaan dan bagaimana mengisinya. Alasan dasar mengapa bangsa ini harus merebut kemerdekaan karena penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan (alinea I). Secara eksplisit *founding fathers* menyatakan bahwa kemerdekaan dapat diraih karena rahmat Allah dan adanya keinginan luhur bangsa (alinea III). Ada perpaduan antara nilai ilahiah dan nilai humanitas yang saling berkelindan. Selanjutnya, di dalam membangun negara ke depan diperlukan dasar-dasar nilai yang bersifat universal, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Moralitas, saat ini menjadi barang yang sangat mahal karena semakin langka orang yang masih betul-betul memegang moralitas tersebut. Namun dapat juga dikatakan sebagai barang murah karena banyak orang menggadaikan moralitas hanya dengan beberapa lembar uang. Ada keterputusan (*missing link*) antara alinea I, II, III dengan alinea IV. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar sekaligus tujuan negara ini telah digadaikan dengan nafsu berkuasa dan kemewahan harta. Egoisme telah mengalahkan solidaritas dan kepedulian pada sesama.

3. Pancasila sebagai Dasar Nilai dalam Strategi Pengembangan Iptek⁸

Karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara pada kehidupan manusia maka perlu mempertimbangan strategi atau cara-cara, taktik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat mensejahterakan dan memartabatkan manusia.

Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila sebagai suatu orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti, atau “*an unfinished journey*”. Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses dan produk. Dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis/metode berpikir dan tolok ukur kebenaran. Dimensi aksiologis, mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural.

⁸ Buku Modul Kuliah Pancasila Dikti, Hal. 133-135

Peran nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan Iptek adalah sebagai berikut:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu saja.
- 3) Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan sub-sistem. Solidaritas dalam sub-sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.
- 4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai dengan penerapan massal.
- 5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan filsuf klasik Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

F. Penutup

Iptek perlu didasarkan pada Pancasila. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya Pancasila dituntut terbuka atas kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada kesadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya.

G. Tugas

Carilah 1 kasus penyalahgunaan ilmu dan teknologi (Iptek) sesuai dengan Bidang/Jurusan kuliah Anda di Binus University dan gunakan Pancasila sebagai dasar etik untuk menyelesaikan kasus permasalahan keilmuan dimaksud! Anda belajar nilai apa dari kasus ini untuk hidup lebih baik menjadi ilmuwan yang Pancasila-lah di masa-masa mendatang? Jelaskan dan contohkan secara konkret!

Kepustakaan:

Antonius Atosokhi Gea dan Antonia P.Y Wulandari (2005). Character Building IV, Relasi dengan Dunia (Alam, Iptek & Kerja). Jakarta: Elex Media Komputindo.

Buku Modul Kuliah Pendidikan Pancasila (2013). Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Dikti.

TOPIK V

BERIMAN KEPADA TUHAN

Pengantar

Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptaannya. Pencipta itu adalah *Causa Prima* yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Dalam konteks bernegara, maka dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila, dengan sendirinya dijamin kebebasan memeluk agama masing-masing. Sehubungan dengan agama itu perintah dari Tuhan dan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka untuk menjamin kebebasan tersebut di dalam alam Pancasila seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama, atau orang memeluk agama dalam suasana yang bebas, yang mandiri. Oleh karena itu dalam masyarakat Pancasila dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama.

Jika ditilik secara historis, memang pemahaman kekuatan yang ada di luar diri manusia dan di luar alam yang ada ini atau adanya sesuatu yang bersifat adikodrati (di atas/di luar yang kodrat)

dan yang transeden (yang mengatasi segala sesuatu) sudah dipahami oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejak zaman nenek moyang sudah dikenal paham animisme, dinamisme, sampai paham politeisme. Kekuatan ini terus saja berkembang di dunia sampai masuknya agama-agama Hindu, Budha, Islam, Kristen ke Indonesia, sehingga kesadaran akan monotheisme di masyarakat Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu tepatlah jika rumusan sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa

Keberadaan Tuhan tidaklah disebabkan oleh keberadaan daripada makhluk hidup dan siapapun, sedangkan sebaliknya keberadaan dari makhluk dan siapapun justru disebabkan oleh adanya kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan adalah *Prima Causa* yaitu sebagai penyebab pertama dan utama atas timbulnya sebab-sebab yang lain. Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan diantara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini adalah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selain-Nya adalah terbatas.

A. Kepercayaan kepada Tuhan

1. Pengertian Tuhan

Dalam hukumnya yang berjudul *Philosophie*, Karl Jaspers.(1883) memberikan suatu batasan mengenai berbagai cara yang dapat menyebabkan manusia mempunyai keinsyafan tentang adanya Tuhan berdasarkan atas sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indra. Pertama-tama terdapat suatu cara yang formal, yang menunjukkan bahwa segenap pengertian hakiki dimiliki oleh manusia senantiasa menunjuk pada adanya sesuatu yang tidak terbatas.

Di samping itu, ada cara yang eksistensial, yang menyebabkan manusia menginsafi bahwa Tuhan terdapat jauh di lubuk hatinya. Juga terdapat cara simbolik yang menyebabkan orang meninsyafi tentang adanya Tuhan berdasarkan atas hal-hal yang terdapat di dalam mitos tulisan keagamaan. Ketiga cara tersebut, data lebih berpengaruh dan diikuti oleh manusia yang satu dibandingkan dengan manusia yang lainnya, namun sesungguhnya ketiga cara tersebut tidak pernah dapat sepenuhnya dipisahkan yang satu dengan yang lainnya (Surajiyo, 2005: 122).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia, sebagai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan lain sebagainya. Dalam berbagai rumusan keagamaan, **Tuhan** itu berarti zat tunggal yang paling tinggi kedudukannya. Ketinggian posisinya membuatnya bisa memerintah **makhluk**. Dalam kosakata **bahasa Indonesia** kata Tuhan adalah lawan dari kata makhluk. Tuhan dalam berbagai bahasa semuanya mengarah pada konsepsi ketunggalan dan kekuasaan. Semuanya juga merujuk kepada spiritualitas dan keluhuran.

Dalam bahasa Indonesia kedudukan paling tinggi yang disebut Tuhan tadi bisa ditempelkan juga pada benda lain. Sebagai contoh, ketika seseorang terlalu meninggikan pencapaian materi atau ke uang an, maka dia disebut menuhankan harta. Jika seseorang menjunjung tinggi kekuasaannya, dia disebut menuhankan jabatan. Itu berarti Tuhan bisa menjadi berbentuk apa saja menurut pengikut dan kepentingan pengikutnya. Bisa dikatakan Tuhan ada dan berwujud tergantung pada pencipta konsepsinya.

Tuhan tidak menginginkan apa-apa. Yang menginginkan adalah makhluknya. **Tuhan tidak mengenal kapan lahir dan kapan tiada**. Yang melahirkan dan mematikan Tuhan adalah makhluknya. Tuhan ada di dalam diri setiap makhluknya. Bahkan bagi orang yang tidak percaya

keberadaan Tuhan juga pasti mempunyai sesuatu yang paling tinggi dalam pandangan kehormatan dan kemuliaannya. Itulah Tuhan bagi dirinya.

Selain istilah Tuhan, orang Indonesia yang beragama Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan) menyebutnya dengan istilah Allah. Allah merupakan sebutan atau nama Tuhan yang (tidak ada Tuhan selain Allah - Islam); wujud tertinggi, terunik; Zat Yang Maha Mulia; daripada-Nya kehidupan berasal dan kepada-Nya kehidupan kembali. Para filsuf di zaman kuno menamai Allah antara lain dengan nama Pencipta, Akal Pertama, Penggerak Yang Tidak Bergerak, Puncak Cita, dan Wajib al-Wujud. Allah adalah tuntutan setiap jiwa manusia (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994: 123-124). Setiap suku dan bangsa manusia merasakan dan menyadari kehadiran-Nya sejak masa yang paling awal dan menamai-Nya menurut istilah-istilah yang mereka tentukan.

Secara kebahasaan, kata Allah sangat mungkin berasal dari kata *al-Ilah*. Kata itu mungkin pula berasal dari Aramea, *Alaha* yang artinya Allah. Kata Ilah (Tuhan yang disembah) dipakai untuk semua yang dianggap sebagai Tuhan atau sandang tertentu, maka kata Allah dari kata al-Ilah dimaksudkan sebagai nama Zat Yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Pencipta Alam Semesta. Kata Allah adalah satu-satunya istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan nama yang dipakai bagi Zat Yang Maha Suci. Nama-nama lain sekaligus mengacu pada sifat-sifat-Nya jika menunjukkan kealaman Zat Allah, seperti al-Aziz atau Yang Maha Perkasa, artinya Allah mempunyai sifat perkasa manusia (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994: 124).

Kata Allah sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Itu terlihat dari nama mereka yang mengandung kata tersebut, seperti nama Abdullah (*Abd Allah*). Sejarah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat orang-orang yang menganut agama wahyu sebelum Islam, yang hanya menyembah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Hanif.

Sedangkan dalam keyakinan penganut Hindu, Tuhan diberi sebutan Brahman atau Sanghyang Widi Wasa; dan dalam literature agama Budha, Tuhan itu adalah “Atthi Ajatam Abhutam Akatan Asamkhatam”, yang artinya; Suatu yang tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tidak diciptakan dan yang mutlak. Dengan demikian Tuhan itu tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apa pun. Dengan adanya yang mutlak, yang tak berkondisi (Asamkhata) maka manusia yang berkondisi (samkhata) dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupannya (sam-sara) dengan cara bermeditasi.

APA DAN SIAPAKAH TUHAN ITU?

Ketika seseorang bertanya kepada Guru, “Guru, kami banyak mendengar tentang Tuhan di sini. Katakanlah kepada kami Tuhan dan siapakah Dia sebenarnya.” Guru menjawab dengan berkata, “Pikirkanlah sekarang, sahabatku dan cintaku, sebuah hati yang memuat semua hati kalian, sebuah jiwa yang merengkuh semua jiwa kalian, sebuah suara yang membungkus semua suara kalian, dan sebuah kesunyian yang lebih dalam daripada semua kesunyian kalian, dan abadi. Carilah sekarang, untuk engkau bayangkan dalam kesadaranmu, sebuah keindahan yang lebih menarik dari semua yang indah, sebuah nyanyian yang lebih membahana dari nyanyian laut dan hutan belantara, sebuah singgasana megah sehingga Orion hanyalah sebuah bantal kaki, memegang sebuah tongkat kekuasaan di mana Pleides tak lebih dari cahaya redup tetes embun pagi. Dan, jika kata-kataku terlalu sulit dan berbelit, maka carilah, sesuatu yang membuat hatimu patah, dan ekingintahuan akan membawamu kepada cinta dan kebajikan Yang Maha Tinggi, yang manusia menyebutnya Tuhan”. (Kahlil Gibran dalam Antonius Atosokhi Gea dkk, 2006: 40)

2. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila merupakan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Sati, atau Tuhan yang jumlahnya satu. Untuk lebih memahami makna tersebut, mari kita kaji secara kebahasaan (etimologi). Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu.

Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran -an. Penggunaan awalan ke- dan akhiran -an pada suatu kata dapat merubah makna dari kata itu dan membentuk makna baru. Penambahan awalan ke- dan akhiran -an dapat memberi makna perubahan menjadi antara lain: mengalami hal sifat-sifat ...

Kata ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan -an bermakna sifat keadaan Tuhan, (segala sesuatu) yang mengenai Tuhan, dan kepercayaan (kebaktian) kepada Tuhan (WJS Poerwadarminta, 1999: 1094). Dengan kata lain ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan.

Kata maha dipergunakan pada kata majemuk dan sebutan yang berarti besar, amat, dan yang teramat. Sedangkan kata esa berarti tunggal atau satu (WJS Poerwadarminta, 1999: 278, 618).. Jadi mahaesa bermakna yang hanya satu (Allah, Tuhan Allah).

Dengan demikian makna sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu memahami dan mengimani Tuhan Yang Satu atau Tuhan yang jumlahnya satu (Allah atau Tuhan Allah). Mohammad Hatta, sangat menekankan pemahaman Tuhan Yang Maha Esa pada makna Allah Yang Maha Tunggal (Deliar Noer, 1983: 108). Dan pemahaman ini adalah pemahaman yang berkembang di masyarakat pada umumnya.

Selain pemahaman tersebut di atas, ada juga pemahaman yang sedikit berbeda. Perbedaan ini terletak pada pemaknaan kata esa. Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini” (this- Inggris). Sedangkan kata “satu” dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sansekerta atau bahasa Pali adalah kata “eka”. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka” bukan kata “esa”.

Dari penjelasan yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan Yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya Ketuhanan Yang Maha Esa berarti Sifat-sifat Luhur atau Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia, bukan Tuhannya.

Dari kedua pandangan di atas, manakah yang paling tepat? Kita tidak bisa menentukan itu, karena setiap orang punya alasan dan sudut pandang yang berbeda. Pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bisa dipisahkan dari sila-sila yang lainnya. Sayuti Melik cenderung melihat pancasila sebagai lima sila yang satu sama lain bisa berkaitan (Deliar Noer, 1983: 108). Dengan demikian makna dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa pemaknaannya harus harus dihubungkan dengan empat sila berikutnya.

Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara

Indonesia berdasarkan Ketuhanan Mang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Ada beberapa makna yang bisa dipahami dari sila pertama ini, Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu:

- a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
- d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
- e. Frasa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia harus memiliki agama monoteis namun frasa ini menekankanke-esaan dalam beragama.
- f. Mengandung makna adanya Causa Prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- h. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.
- i. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing.

Negara Republik Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...” dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.
- b. Pasal 29 UUD 1945 pada ayat 1 dan 2, yaitu:
 - 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, anti agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

Apa pun nama yang diberikan untuk Tuhan. kiranya bagi kita di Indonesia dengan berbagai agama yang sudah diakui secara resmi, tidak kesulitan untuk sama-sama menyebut kata “Tuhan”. Kata tersebut bisa dalam arti “Allah” sebagaimana dimengerti oleh orang Islam dan Kristen, atau dalam arti Sanghyang Widhi atau Brahman, sebagaimana dimengerti dalam agama Hindu dan Adi-Buddha dalam agama Buddha. Menarik bahwa kata “Tuhan” dapat kita serukan bersama dalam menyapa Dia, yang kita muliakan dan kita junjung tinggidalam kehidupan kita. Tapi perlu ditambahkan di sini juga bahwa ketika salah seorang di antara kita menyerukan nama “Allah”, itu tidak lain yang dia serukan adalah nama “Tuhan” juga, tidak beda dan tidak dimaksudkan sebagai

yang lain. Kata “Tuhan” kemudian dimakanai sebaga “Tuhan Yang Maha Esa”, yang dengan baik menunjukan kepercayaan monoteisme, yang percaya pada satu Tuhan. Umat Islam memegang dengan teguh ungkapan itu. Bagi orang Kristen (Katolik maupun Protestan) istilah tersebut dapat diterima dengan baik, karena orang Kristen mengakui adanya satu Tuhan. Kalaupun dalam agama Kristen dikenal dengan istilah Allah Bapak, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus, sesungguhnya satu adanya, yakni Allah yang satu dan sama, yang dapat disebut sebagai “Tuhan” atau “Allah” saja. Ketiganya adalah satu Allah, yang ada sejak kekal. Ketiga wujud pribadi Allah tersebut menjalankan tugas atau fungsi masing-masing: Allah Bapak sebagai pencipta, Allah Putera sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus sebagai penghibur, yang menjiwai dan membimbing kaum beriman kepada Kebenaran. Ketiganya adalah Allah atau Tuhan yang satu dan sama. Maka tidaklah benar apabila ada anggapan bahwa agama atau Kristen itu mengakui adanya tiga Allah atau Tuhan.

Hal yang sama terjadi juga dalam agam Hindu. Walau ada banyak nama yang diberikan, hal itu lebih dalam kaitan dengan fungsi atau tugas. Demikianlah Sanghyang Widhi, disebut Brahma pada waktu penciptaan alam semesta dengan segala isinya, disebut Wisnu pada waktu beliau memelihara semua ciptaan-Nya dengan penuh penuh cinta kasih, dan disebut Siwa pada waktu beliau mengembalikan segala ciptaan beliau itu ke asalnya. Dalam agama Buddha juga, walau ada banyak nama yang diberikan, namun nama-nama yang banyak itu lebih berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Yang Mutlak itu sendiri, yang kesemuanya tidak lain adalah Yang Maha Esa.

B. Konsep tentang Tuhan dalam Agama-agama

1. Jenis Kepercayaan Manusia kepada Tuhan

Teologi memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Adapun yang dimaksud teologi dalam ruang lingkup metafisika adalah filsafat Ketuhanan yang bertitik tolak semata-mata kepada kejadian alam (*theology naturalis*) (Surajiyo, 2005: 122).

Pembicaraan tentang Tuhan merupakan pembicaraan yang menyedot pemikiran manusia sejak jaman dahulu kala. Manusia senantiasa bertanya tentang siapa di balik adanya alam semesta ini. Apakah alam semesta terjadi dengan sendirinya atautkah ada kekuatan lain yang mengatur alam semesta ini. Bertitik-tolak dari keinginan manusia untuk mengetahui keberadaan alam semesta ini, maka manusia mencoba mengkajinya sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya. Hasil dari kajian-kajian yang dilakukan, manusia sejak jaman primitif sudah mempercayai adanya kekuatan lain di luar diri manusia yang disebut dengan Tuhan.

Namun, kepercayaan kepada adanya Tuhan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat kemampuan akal manusia. Menurut Ibnu Thufail yang menulis kisah novel Hayy bin Yaqdzan mengatakan bahwa manusia dengan akalnya mampu mengenal dan mempercayai adanya Tuhan (Abdul Maqsd Abdul Ghani Abdul Maqsd, 2000: 45-55). Tetapi pengenalan kepada Tuhan sangat ditentukan oleh kemampuan akal setiap orangnya.

Dalam perjalanan sejarah manusia, muncul berbagai macam kepercayaan terhadap Tuhan. Ada kepercayaan yang disebut ‘dinamisme’ yang berarti kepercayaan kepada kekuatan gaib yang misterius. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada

yang bersifat jahat. Benda yang mempunyai kekuatan gaib baik tentu akan disenangi, dipakai dan dimakan agar orang yang memakai atau memakannya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya. Sebaliknya, benda yang mempunyai kekuatan gaib jahat tentunya akan ditakuti dan dijaui.

Ada pula kepercayaan yang disebut dengan ‘animisme’ yang berarti kepercayaan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa mempunyai ruh. Tujuan mempercayai ruh ini adalah untuk mengadakan hubungan baik dengan ruh-ruh yang ditakuti dan dihormati itu dengan senantiasa berusaha menyenangkan hati mereka dan menjauhi perbuatan yang dapat membuat mereka marah.

Ada lagi kepercayaan yang disebut dengan ‘politeisme’, yakni kepercayaan kepada dewa-dewa. Dalam kepercayaan ini hal-hal yang menimbulkan perasaan takjub dan dahsyat bukan lagi dikuasai oleh ruh-ruh, tetapi oleh dewa-dewa. Kalau ruh dalam animisme tidak diketahui tugas-tugasnya yang sebenarnya, dewa-dewa dalam politeisme telah mempunyai tugas-tugas tertentu. Ada dewa yang bertugas memberikan cahaya dan panas ke permukaan bumi. Dewa ini dalam agama Mesir kuno disebut Ra, dalam agama India Kuno disebut Surya, dan dalam agama Persia Kuno disebut Mithra. Ada pula dewa yang tugasnya menurunkan hujan, yang diberi nama Indera dalam agama Mesir Kuno, dan Donner dalam agama Jerman Kuno. Selanjutnya ada pula dewa angin yang disebut Wata dalam agama India Kuno, dan Wotan dalam agama Jerman Kuno.

Dalam paham politeisme, tiga dari dewa-dewa yang banyak meningkat ke atas dan mendapat perhatian dan pujaan yang lebih besar dari yang lain. Dewa yang tiga itu mengambil bentuk Brahma, Wisnu, dan Syiwa. Dewa yang tiga ini dalam agama Veda disebut Indra, Vitra dan Varuna; dalam agama Mesir Kuno dikenal dengan Osiris dengan istrinya Isis dan anaknya Herus; dan dalam agama Arab Jahiliyah dikenal dengan al-Lata, al-Uzza, dan Manata (Harun Nasution, 1985: 14-15).

Selain itu, dalam paham politeisme, ada satu dari dewa-dewa itu yang meningkat di atas segala dewa yang lain, seperti Zeus dalam agama Yunani Kuno, Yupiter dalam agama Rumawi, dan Amor dalam agama Mesir Kuno. Paham ini belum menunjukkan adanya pengakuan terhadap satu Tuhan, tetapi baru pada pengakuan dewa terbesar di antara dewa yang banyak. Paham ini belum meningkat menjadi paham monoteisme, tetapi masih berada pada paham politeisme.

Begitu juga kalau dewa yang terbesar itu saja yang dihormati dan dipuja, sedang dewa-dewa lain ditinggalkan, maka paham demikian telah keluar dari politeisme dan meningkat kepada henoteisme. Henoteisme mengakui satu Tuhan untuk satu bangsa, dan bangsa-bangsa lain mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Henoteisme mengandung paham Tuhan nasional.

Dalam masyarakat yang sudah maju, kepercayaan yang dianut bukan lagi dinamisme, animisme, politeisme, atau henoteisme, tetapi kepercayaan monoteisme, baik monoteisme praktis, monoteisme spekulatif, monoteisme teoritis, maupun monoteisme murni (lihat dalam Tim Penulis Rosda, 1995: 132-133).

Monoteisme praktis adalah kepercayaan yang tidak mengingkari dewa-dewa lain, tetapi hanya satu Tuhan saja yang diarah dan dipuja. Monoteisme spekulatif adalah kepercayaan yang terbentuk karena bermacam gambaran dewa-dewa lebur menjadi satu gambaran yang akhirnya dianggap sebagai satu-satunya dewa. Monoteisme teoritis ialah paham yang mempercayai bahwa Tuhan itu Esa dalam teori, tetapi dalam praktek dipercayai lebih dari satu Tuhan. Terakhir

monoteisme murni adalah paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu Esa dalam jumlahnya dan sifat, dalam teori dan praktek, dan dalam pemikiran dan penghayatan.

Kepercayaan manusia kepada Tuhan, secara singkat tergambar pada Pemikiran August Comte (1798-1857) yang menempatkan tahap teologis berada pada tahap pertama dalam teori perkembangan pemikiran manusia. Dalam tahap teologis ini ditegaskan bahwa orang mengarahkan rohnya kepada hakikat “batiniah” segala sesuatu, kepada “sebab pertama” dan “tujuan terakhir” segala sesuatu. Pada taraf pemikiran ini terdapat tiga lagi tahap (Harun Hadiwijono, 1990: 110-111), yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap yang paling bersahaja atau primitive, ketika orang menganggap bahwa segala benda berjiwa (animisme).
- b. Tahap ketika orang menurunkan kelompok hal tertentu masing-masing diturunkannya dari suatu kekuatan adikodrati yang melatar belakangnya, sedemikian rupa sehingga tiap kawasan gejala memiliki dewa-dewanya sendiri (politeisme).
- c. Tahap yang tertinggi, ketika orang mengganti dewa yang beraneka ragam itu dengan satu tokoh tertinggi, yaitu dalam monoteisme. Selain bentuk kepercayaan tersebut di atas, pada masyarakat maju juga ada kepercayaan yang tidak mengakui adanya Tuhan, seperti para evolusionis yang mengatakan bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan dari kondisi bumi yang primitif.

Kepercayaan ini mendapatkan perlawanan dari kalangan ilmuwan. Mereka mengatakan bahwa terlalu berlebihan untuk menduga bahwa organisasi alam yang begitu halus dan harmonis adalah hasil kebetulan belaka seperti yang diungkapkan oleh Robert Boyle yang mengatakan bahwa sistem besar dunia yang teratur, struktur tubuh binatang dan panca-inderanya yang demikian menakjubkan dan lainnya yang ada di muka bumi ini, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Oleh karena itu, para filosof mengakui dan mempercayai bahwa Tuhan sebagai pengarang atau pencipta struktur-struktur yang mengagumkan ini.

Demikian pula, percobaan laboratorium dan perhitungan probabilitas secara gamblang menjelaskan bahwa asam amino yang merupakan sumber kehidupan tidak dapat dibuat secara kebetulan. Sel yang dikira timbul secara kebetulan dalam kondisi yang primitif dan tak terkontrol menurut para evolusionis, masih tidak bisa disintesis, sekalipun di laboratorium dengan teknologi tercanggih abad ke-20. Dengan demikian, kepercayaan kaum evolusionis merupakan kepercayaan yang palsu dan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mempercayai adanya Tuhan.

2. Gambaran Manusia tentang Tuhan

Iman (kepercayaan) dan agama merupakan dua persoalan menyangkut hubungan manusia dengan yang adi kodrati, yang gaib, suatu kenyataan transenden. Adalah suatu keistimewaan bahwa manusia memiliki suatu kepekaan dan keterbukaan kepada kenyataan yang bersifat ilahi, suatu kenyataan yang mengatasi dunia dan dirinya sendiri. Kepekaan atau perasaan religius inilah yang memungkinkan manusia mampu mengakui bahkan mengimani dan menyerahkan diri kepada Dia, yang oleh orang beragama menyebutnya sebagai Tuhan atau Allah, atau nama lain yang kurang lebih searti dengan itu.

Namun, berhubung Tuhan atau Allah itu merupakan kenyataan yang bersifat gaib, suatu kenyataan yang mengatasi jangkauan daya tangkap indera manusia, maka akhirnya manusia memiliki gambaran dan pemahaman yang beraneka ragam tentang Dia. Gambaran yang tidak selalu sama

tentang Tuhan pastilah berkaitan erat dengan keterbatasan kemampuan dan perbedaan daya tangkap manusia untuk mengenal-Nya. Perbedaan gambaran dan pemahaman tersebut pastilah berkaitan dengan adanya perbedaan berbagai latar belakang manusia, seperti perbedaan zaman, budaya, adat istiadat, pendidikan, geografi, bahasa, dan segala macam perbedaan lainnya.

Semua agama yang berdasarkan monotheis memiliki prinsip bahwa Tuhan tidak mungkin dapat dilukiskan dengan tepat. Meski kesadaran akan adanya Tuhan telah tumbuh dalam diri manusia sejak ribuan tahun silam, tetapi oleh kendala kodratnya, fisik maupun psikis, sampai saat ini manusia tidak mampu melukiskan Tuhan sebagai sesuatu yang wujudiah. Namun untuk memantapkan keimanan dalam praktek-paktek keagamaan Tuhan meski diwujudkan. Hal ini merupakan tuntutan kondisi eksistensi manusia, karena tanpa adanya wujud manusia tidak menemukan sesuatu.

Karena itu dalam filsafat agama sering terjadi hal-hal paradoks. Tuhan tidak berwujud, namun dilukiskan sebagai sesuatu yang berwujud. Misalnya Tuhan dikatakan Maha Esa, Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Mendengar, dan lain sebagainya. Dalam gelar atau julukan itu Tuhan seakan-akan berwujud sesuatu dalam bentuk persona. Namun demikian berarti gelar itu merupakan sifat persona, sebagaimana sifat persona manusia. Hal itu hanyalah modus agar Tuhan dapat dijangkau oleh keterbatasan wujud manusia.

Orang beriman dalam agama apapun senantiasa mengagungkan Tuhan. Karena itu gelar Tuhan selalu bersifat luhur, yang dalam kebahasaan selalu ditandai dengan kata maha. Dalam setiap agama terdapat macam-macam gelar Tuhan. Gelar-gelar itu selalu mengisyaratkan wujud Tuhan di mata manusia beriman. Kebesaran dan keluhuran Tuhan yang tersurat dan tersirat dalam agama adalah sumber penciptaan gelar itu. Hal-hal profan selalu dihindari, sebaliknya hal-hal kudus selalu dikaitkan dengan gelar tersebut.

Untuk semakin bisa memahami Tuhan yang tidak kelihatan di mata manusia, dan untuk lebih mudah membayangkannya secara lebih dekat, maka manusia menggambarkan Tuhan menurut kemampuan daya pikir, bahasa dan budayanya. Kalau yang paling kuasa di dunia ini disebut raja, maka dalam hatinya manusia menggambarkan Tuhan sebagai Raja, Raja segala raja, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan dibayangkan sebagai yang baik, maka disebut yang maha baik, maha Pengasih dan Penyayang, Maha Rahim (karena rahim adalah tempat perlindungan yang paling aman), dan sebagainya. Intinya, gambaran yang bermacam-macam tentang Tuhan hanyalah satu usaha dari manusia, dengan segala keterbatasannya dalam mencoba memahami kebesaran dan keagungan Tuhan yang diimaninya. Untuk lebih mengkonkritkan hal ini, contoh-contoh kuat dapat diperhatikan di bawah ini (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2006: 49-51).

a. Perbedaan Tiga Dewa

Dalam keyakinan agama Hindu, orang awam hanya tahu bahwa penganut agama Hindu itu percaya kepada tiga Dewa yang disebut Trimurti atau Tiga Dewa, yaitu Dewa Brahma, dewa Wisnu, dan dewa Siwa; atau Dewa pencipta, Dewa pemelihara, dan dewa Perusak. Pengolompokan dewa tersebut itu konon berasal dari pengamatan yang sangat intensif terhadap gejala alam ini, dimana ada sebuah peristiwa yang meliputi ketiga aspek berikut: Ada proses penciptaan, ada proses pelestarian atau pemeliharaan dan ada proses perusakan atau pemusnahan (lebih tepat; pengembalian kepada bentuk awal. Di dalam kitab suci Weda sendiri kita jumpai ratusan nama Dewa dengan kekuasaan dan fungsinya yang berbeda-beda, sehingga beliau dikenal “sehasra”

nama, yaitu seribu nama. Ini bisa dilihat dalam mantra atau do'a yang sehari-hari diucapkan dalam cara ritual yang diberi nama "trisandhya".

b. Allah Tritunggal (Trinitas)

Dalam iman Kristiani, doktrin tentang Trinitas atau Tritunggal merupakan ajaran sentral. Konsep Tuhan dalam Tritunggal adalah: Allah bapa yang ada di surga (gambaran tentang kesempurnaan, kesenangan, keindahan, ketenangan dan ketentraman), yang menjelma menjadi manusia Yesus Kristus (yang seratus persen manusia dan seratus persen Tuhan), yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan setelah kematian-Nya, dia bangkit dan naik ke surga, namun tetap berpengaruh atas manusia dalam kuasa Roh Kudus realitas kuasa Allah yang masih tetap hidup dan melindungi dunia ini hingga kini dan selamanya). Ajaran dogmatis ini memperlihatkan dengan jelas kesulitan menangkap segala sesuatu secara detail tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Begitu pula tentang gambar Yesus Kristus, dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan sosok Tuhan Yesus dalam setiap tempat dan kesempatan, yang maksudnya tidak lain adalah untuk menambah konsentrasi, kesungguhan dan kekhusukan dalam beribadat.

c. Tuhan dan Sifat-sifat-Nya

Dalam iman agama Islam, biarpun Allah itu tidak boleh digambarkan dengan gambaran apapun, karena Tuhan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang "Ghaib", yang wujudnya tidak terlihat oleh mata, suaranya tidak terdengar oleh telinga, dan oleh karenanya apapun dan seperti apapun pikiran manusia membayangkan wujud Allah, pastilah salah, tetap saja mengundang interpretasi gambaran yang bermacam-macam. Itu sebabnya para ulama Islam perlu memnggambarkannya dalam "Sifat-sifat Tuhan 13 atau 20 sifat". Dalam menyebut sifat-sifat Tuhan itu, dinyatakan bahwa Allah mempunyai sifat: Wujud, Paling Dahulu, Maha Kekal, Berbeda dengan makhluk, Berdiri sendiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Berkeendak, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Bicara. Di dalam al-Qur'an, Tuhan Allah sendirilah yang memberitahukan kepada manusia tentang sebutan-sebutan yang dikenal sebagai "al-Asmaa al-Husna", yang berarti nama-nama yang baik yang jumlahnya ada 99 nama (Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 221-24). Pemberian sifat-sifat tertentu kepada Tuhan terkait langsung dengan penggambaran manusia tentang Tuhan, dengan segala kesempurnaan-Nya.

d. Bukan Sebagai Pribadi

Dalam agama Budha tuhan tidak dipandang sebagai suatu pribadi (personifikasi Tuhan), tidak bersifat antropomorfisme (pengenaan pengertian cir-ciri yang berasal dari wujud manusia), dan antropopatisme (pengertian yang berasal dari perasaan manusia). Agama Budha melihat Tuhan Yang maha Esa, Yang Mutlak, sebagai Tang maha Tinggi, maha Luhur, maha Suci, Maha Sempurna, Kekal atau tanpa awaldan tanpa akhir. Tuhan memang hanya bisa dikenali secara parsial dari sejumlah atribut yang dikenakan kepada-Nya. Tetapi bagaimanapun sifat-Nya, yang Mutlak itu tidak mengenal dualisme.

Para nabi/rasul, maharesi, filosof dan sufi mereka telah mendapat pencerahan mengatakan Tuhan tidak mungkin diketahui. Hakikat Tuhan jauh di luar jangkauan pikiran manusia. Bagi kita, orang biasa, apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan? Sebagian orang mungkin bisa berbicara dengan Tuhan, dalam do'a, tanpa perlu membayangkan bentuk-Nya, baik dengan mata fisik maupun batin.

Thomas Aquinas, ahli teologi dan mistik terkemuka Kristen mengatakan bahwa bentuk tertinggi dalam mengenal Tuhan adalah mengenal tuhan sebagai sesuatu yang tidak mungkin dikenal. Memang tidak ada lukisan atau patung tentang Roh Kudus atau Allah Bapak. Tapi hampir semua orang-orang Kristen mengenal Yesus Kristus, Tuhan Anak, sebagai seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun, berkulit putih, bermata biru, rambut pirang panjang dan berombak, serta digambarkan seperti laki-laki Eropa.

Islam sama sekali tidak mengizinkan Allah dilukiskan, digambarkan, ataupun dipatungkan. Akan tetapi Islam menggambarkan Allah dengan kata-kata, kitab al-Qur'an al-Karim menjelaskan-Nya. Tuhan mempunyai wajah yang mulia, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dua tangan yang menggenggam, dan lain sebagainya.

TUHAN TIDAK SEPERTI YANG ENGKAU BAYANGKAN

Kisah ini terjadi pada umat nabi Ibrahim, mereka kebingungan menangkap dan mengerti tentang siapa Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Besar, dan tidak ada yang menandingi-Nya, maka terjadilah peristiwa seperti ini:

Ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."

Kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku Termasuk orang yang sesat."

Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

(QS al-An'am/6: 76-78)

Mengenai pemikiran agama pada abad ke-20 yang cukup menonjol adalah pemikiran Henri Bergson. Menurut Bergson, agama itu, termasuk juga dalam penggambaran Tuhan, ada dua macam (Harun Hadiwijono, 1990, 139), yaitu sebagai berikut:

- a. Agama yang statis, yaitu timbul Karena hasil karya perkembangan. Di dalam perkembangan ini telah memberikan kepada manusia kecakapan untuk menciptakan dongeng-dongeng yang dapat mengikat manusia yang serorang dengan yang lain dan dapat mengikat manusia dengan hidup. Karena akalny manusia tahu, bahwa ia harus mati. Juga karena akalny manusia tahu, bahwa ada rintangan yang tidak terduga, yang merintanginya usahanya untuk mencapai tujuannya. Alam telah membantu manusia untuk memikul kesadaran yang pahit ini dengan khayalan-khayalan. Demikianlah timbul agama sebagai alat bertahan terhadap segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia putus asa.
- b. Agama yang dinamis, yaitu yang diberikan intuisi. Dengan perantaraan agama ini manusia dapat berhubungan dengan Asas yang Lebih Tinggi, yang lebih kuasa daripada dirinya sendiri, yang menyelami dia tanpa menghapuskan kepribadiannya. Karena agama inilah manusia diikatkan kepada hidup dan masyarakat atas dasar yang lebih tinggi. Ia tahu bahwa ia dengan kuat dihubungkan dengan suatu Asas yang Lebih Tinggi. Bentuk agama yang paling tinggi adalah mistik, yang secara sempurna terdapat di dalam agama Kristen.

3. Implikasi Gambaran Tuhan dalam Keseharian

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, jelas bahwa ada berbagai macam gambaran manusia tentang Tuhan. Bahwa Tuhan ada satu atau banyak, bahwa masih campur tangan di dunia ini atau sudah tidak lagi, merupakan gambaran manusia tentang tuhan. Begitu juga pemberian satu atau lebih nama kepada Tuhan, atau mengenakan

sifat-sifat tertentu kepada-Nya, merupakan gambaran pemahaman manusia tentang Tuhan. Semua gambaran yang diberikan Tuhan itu sebenarnya memiliki makna yang sangat kaya bagi kehidupan manusia. Artinya, gambaran itu bukan sekedar bayangan atau pemberian nama semata, melainkan sesuatu yang mempunyai makna tertentu, yang mengandung arti dan pesan penting bagi manusia. Maka apapun gambaran kita tentang Tuhan hendaknya hal itu menjadi inspirasi yang mempengaruhi kehidupan kita. Pada bagian berikut kita kemukakan beberapa contoh bagaimana gambaran tentang Tuhan memiliki implikasi langsung dalam kehidupan manusia. Contoh yang kita angkat disini hanya beberapa saja dari penggambaran yang ada, di mana Tuhan digambarkan sebagai yang memiliki sifat-sifat tertentu.

a. Tuhan Maha Kuasa

Tuhan digambarkan sebagai yang Maha Kuasa. Ini mendorong kita untuk tidak patah semangat, untuk tetap mau berusaha keras dan tidak pernah mengenal lelah. Jika telah berusaha maksimal dan belum berhasil, sebaiknya kita serahkan saja kepada Tuhan, sambil melakukan introspeksi di mana letak kekurangan dan kegagalan kita juga. Kita tidak boleh putus asa dan merasa gagal dalam berusaha dibidang apa pun, karena biarpun kita lemah, Tuhan adalah Maha Kuasa bagi kita. Implikasi lain termasuk, jika kita nanti suatu ketika mempunyai jabatan dalam masyarakat, kita tidak lantas berlaku sebagai penguasa yang bengis dan congkak, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dan berpikir bahwa jabatan itu kan kita pegang selamanya. Kita perlu tetap sadar bahwa diatas kekuasaan kita itu masih ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan, bahkan kekuasaan yang kita pegang di dunia ini harus kita pertanggung jawabkan di hadapan-Nya. Bisa juga gambaran tentang Tuhan sebagai yang Maha Kuasa, merasa kita kuat walau kita sendiri lemah. Gambaran tersebut membuat kita tidak takut menghadapi godaan dan pengaruh jahat, karena kita percaya dalam kuasa Tuhan Kita bisa menang menaklukkan kejahatan.

b. Tuhan Maha Adil

Gambaran tentang Tuhan sebagai yang Maha Adil akan mendorong kita untuk tidak perlu cemas dan putus asa ketika diperlakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tidak adil. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Maha Adil kepada kita. Dan kita juga tetap berharap bahwa Tuhan dalam keadilan-Nya, dengan cara-Nya sendiri, mau membantu orang-orang yang tidak berlaku adil dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita, yang percaya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Adil itu, tidak akan pernah berbuat tidak adil kepada siapa pun dan dalam hal apa pun, karena hal itu bertentangan dengan sifat Tuhan yang kita imani. Tindakan kita yang bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan yang kita cintai merupakan pengkhianatan terhadap iman kita sendiri. Dan, tidak selayaknya orang yang mengaku beriman mengkhianati Tuhan yang dicintainya. Implikasinya, kita akan berlaku adil kepada siapa pun, kapan pun, dan dimana pun kita berada.

c. Tuhan Maha Tahu

Dengan menggambarkan Tuhan sebagai Maha Tahu berarti kita percaya dalam hati bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya terang – benderang dihadapan pandangan-Nya, baik itu yang tampak maupun tidak tampak di mata manusia, yang baik dan yang buruk, dan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dengan gambaran itu kita tidak akan memikirkan dan

merencanakan, apalagi melakukan sesuatu yang tidak baik, entah dengan cara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi, karena kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Implikais lain misalnya, kita merasa tidak lebih tahu dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, merasa *sok tahu* dan lain sebagainya, karena hanya Tuhanlah yang Maha Tahu atas segalanya, yang lebih tahu dari siapa pun. Semua pengetahuan yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan semata. Kita dapat mengetahui sesuatu karena Tuhan telah memberi kemampuan untuk itu. Tuhan adalah sumber pengetahuan utama dan terdalam bagi kita manusia.

d. Tuhan Maha Pemaaf dan Pengampun

Tuhan digambarkan sebagai Maha Pemaaf. Ini mendorong kita untuk senantiasa mau memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari perbuatan ataupun perkataan yang salah. Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu berinteraksi satu sama lain. Dalam pergaulan antar manusia, mustahil tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam berlaku satu sama lain. Di sinilah perlu ada kesadaran bahwa tanpa adanya keterbukaan saling memaafkan, maka hubungan satu dengan yang lain tidak dapat langgeng. Gambaran tentang Tuhan sebagai Maha Pemaaf juga berimplikasi kepada orang-orang yang telah terlanjur berlaku jahat, bergelimbang dosa, tetapi ia ingin memperbaiki diri sehingga menjadi orang baik. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan maaf dan ampun-Nya pada kita bila bertobat.

e. Tuhan Maha Pengasih

Penggambaran Tuhan sebagai Maha Pengasih akan senantiasa membesarkan hati kita. Penggambaran tersebut akan membuat kita selalu berharap akan kebaikan Tuhan kepada kita. Dalam belas kasihan-Nya, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa Tuhan jauh dari kita, bahkan merasa dibiarkan oleh Tuhan dalam berbagai percobaan dan kesulitan, sebenarnya di balik semuanya itu terbentangleh cinta Tuhan yang begitu besar. Yang sering terjadi adalah bahwa manusia kurang mampu menyelami apa rencana dan maksud Tuhan di balik semua kejadian atau peristiwa itu. Dengan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, maka dalam situasi apa pun kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan bahwa Dia akan memberikan yang ter baik kepada kita. Pun apabila tidak seorang pun yang menyayangi kita di dunia ini, kita tidak akan putus asa karenanya, karena kita percaya bahwa Tuhan tetap mencintai kita, dan bahwa kita tetap punya tempat di hati Tuhan, bagaimana pun keadaan atau kondisi hidup kita. Keyakinan inilah yang membuat kita tetap merasa bahwa hidup kita mempunyai makna atau arti di mata Tuhan. Rencana Tuhan memang tidak semuanya dapat kita salami, termasuk rencana cinta-Nya kepada kita. Diperlukan kesabaran dan encarian terus-menerus (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2006: 53-57).

KUPU-KUPU

Seseorang menemukan kepompong seekor kupu-kupu. Suatu hari lubang kecil muncul dari kepompong. Orang itu duduk dan mengamati selama beberapa jam bagaimana si kupu-kupu itu berjuang memaksa dirinya melewati lubang kecil itu. Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuan. Kellihatannya dia telah berusaha semampunya dan dia tidak bisa lebih jauh lagi. Akhirnya orang tersebut memutuskan untuk membantunya, dia ambil gunting dan memotong sisa kekangan dari kepompong itu. Kupu-kupu tersebut keluar dengan mudahnya. Ternyata, kupu-kupu itu mempunyai I tubuh yang gembung dan kecil, dan sayapnya mengkerut. Orang tersebut mengamatinya karena dia berharap bahwa pada suatu saat, sayap-sayap itu akan mekar dan melebar, sehingga

mampu menopang tubuhnya, yang mungkin akan berkembang dalam waktu. Ternyata semuanya tak pernah terjadi. Kupu-kupuitu menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh gembung dan sayap-sayap memngkerut. Dia tak pernah bisa terbang. Kebaikan dan ketegasan orang tersebut merupakan akibat dari ketidakmengertian bahwa kepompong yang menghambat, dan perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk melewati lubang kecil adalah jalan Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu itu berpindah ke dalam sayap-sayapnya sedemikian sehingga sayapnya menjadi kuat, dan siap terbang begitu memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut.

Kadang perjuangan adalah yang kita perlukan dalam hidup kita. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, itu mungkin akan melumpuhkan kita. Kita mungkin tidak sekuat yang semestinya kita mampu. Kita tidak pernah bisa “terbang”. Kita mohon kekuatan ... dan Tuhan member kita kesulitan-kesulitan untuk kita kuat. Kita mohon kebijaksanaan... dan Tuhan member kita persoalan untuk diselesaikan. Kita memohon kemakmuran ... dan Tuhan memberi kita otak dan tenaga untuk bekerja. Kita memohon keteguhan hati ... dan Tuhan member kita bahaya untuk diatasi. Kita memohon cinta dan kasih sayang ... dan Tuhan member kita orang-orang bermasalah untuk ditolong. Kita memohon kemurahan dan kebaikan hati... dan Tuhan member kita kesempatan-kesempatan dan tang\ tangan untuk diatasi. Kita memperoleh yang kita inginkan ... tetapi... kita mendapatkan segala yang kita butuhkan. Itulah kemahabajaan Tuhan bagi kita, yang sering tidak kita mengerti. (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2006: 57-58)

C. Relasi Vertikal Manusia dengan Tuhan

Orang-orang yang beriman, yang akhirnya mengelompok dalam suatu lembaga keagamaan, seperti Islam, Kristen (Katholik dan Protestan), Hindu dan Budha (dan agama-agama lainnya lagi) secara institusional melakukan, mengembangkan, dan mempraktekkan berbagai upacara ritual keagamaan. Upacara ritual tersebut penuh dengan aktivitas pengungkapan sembah diri yang ditujukan kepada Tuhan. Di masing-masing agama, upacara ritual ada bermacam-macam, yang kalau ditelusuri secara mendalam dan menyeluruh, tampak mengandung banyak kesamaan-kesamaan makna dan pesan. Upacara-upacara ibadah keagamaan ada yang dilakukan secara individual namun terutama dilakukan secara bersama-sama. Demikian juga ada yang dilakukan secara khusyuk dalam kesendirian, tetapi ada juga ada yang dilakukan secara meriah beramai-ramai. Upacara-upacara ritual diberbagai agama, ada yang sifatnya sudah baku, terstruktur, sama dari waktu ke waktu; tetapi ada juga yang bisa berubah, tidak terikat oleh aturan tertentu, atau tidak terstruktur. Gambaran sepiintas macam-macam ibadah ritual dalam berbagai agama akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut ini.

1. Makna Ibadah Kepada Tuhan

a. Sebagai Perayaan Iman

Kegiatan ibadah tentu saja tidak bisa dilepaskan dari iman. Iman yang dihayati dalam hidup, dan memenuhi seluruh hidup, dirayakan dalam suatu kegiatan khusus, yakni dalam ibadah atau perayaan ritual keagamaan. Yang dirayakan di sana adalah iman, menyangkut hubungan khusus manusia dengan Tuhan. Perayaan atau ibadah yang dilakukan dengan benar dan penuh kekhususan, akan menyemangati iman kita dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai perayaan Iman, maka pelaksanaan ibadah dilakukan dengan suka cita, penuh harapan dan kehangatan hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama yang ikut dalam beribadat. Tidak jarang ibadah-ibadat ritual yang besar diikuti dengan makan dan minum bersama, baik dengan keluarga, handai taulan, anggota jemaat dan orang-orang lain yang sengaja dilibatkan.

b. Membawa Seluruh Aktivitas Hidup kepada Tuhan

Sebagai perayaan iman dan penghayatan hubungan khusus dengan Tuhan, beribadat mengandung makna persembahan seluruh hidup, termasuk berbagai aktivitas dan perjuangan hidup ke hadapan Tuhan. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan hidup menghayati cinta dan kebaikan, kita mulai atas nama Tuhan, dan kemudian kita kembalikan kepada-Nya. Segala keberhasilan, keberuntungan, kegagalan, kekecewaan, kepuasan, dan kegelisahan, beserta kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat, kita bawa ke hadapan Tuhan. Dari berbagai hal yang kita alami itu, timbul aneka macam luapan hati kepada Tuhan, ada rasa syukur, rasa sesal, permohonan ampun, memuji kebesaran Tuhan, menyampaikan segala kekecewaan dan nasib yang dialami, mohon penyertaan Tuhan dalam perjuangan yang akan dilakukan berikutnya, dan sebagainya. Semua pengalaman itu kita jadikan sebagai persembahan diri kita kepada Tuhan.

c. Menimba Kekuatan yang akan Dibawa dalam Kehidupan

Ibadat sebagai suatu perayaan iman, tidak hanya terbatas sebagai sebuah seremonial keagamaan, yang menjadi suatu peristiwa yang tidak bersambungan dengan aktivitas hidup sehari-hari. Dalam beribadat kita juga membuka hati untuk mendengar pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, serta melalui pengajaran dan khotbah yang disampaikan oleh yang sudah diberi tugas dan wewenang untuk itu (Imam Jemaat). Pesan-pesan inilah yang akan kita jadikan sebagai pegangan bagi pelaksanaan berbagai aktivitas hidup kita selanjutnya. Maka, selain sebagai kesempatan membawa seluruh aktivitas hidup ke hadapan Tuhan, dalam ibadat juga kita menimba kekuatan yang akan kita bawa dalam kehidupan yang kita jalani selanjutnya. Sebagai orang yang sudah “beracara” dengan Tuhan, kita seumpama orang yang sudah dibaharui, yang mendapatkan semangat baru, motivasi dan orientasi hidup yang baru. Rahmat yang kita dapatkan dalam beribadat semestinya kita kembangkan dan sebarkan dalam berbagai bidang kehidupan yang kita geluti secara pribadi dan bersama.

“Kita dapat hidup dari apa yang kita peroleh, tetapi kita hanya dapat member arti pada kehidupan kita dengan apa yang kita beri”. (HPH)

2. Menghayati Kekhusyukan Ibadat

a. Mempersiapkan Diri dengan Baik

Kalau dikatakan ibadat, umumnya hal itu berarti kita datang ke tempat atau rumah ibadat (mesjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng) atau tempat-tempat lain yang sudah ditentukan. Kita sebagai orang beragama percaya dan memperlakukan tempat-tempat ibadat kita sebagai tempat yang disucikan, sebagai tempat untuk beribadat, tempat berdoa /sembahyang, sebagai tempat mengangkat hati kepada Tuhan. Kita tidak akan memperlakukan rumah-rumah ibadat kita sebagai tempat sembarangan apalagi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tempat ibadat adalah tempat khusus kita bertemu Tuhan dan sesama umat, yang juga mau menghadap Tuhan. Karena tujuan kita yang khusus dalam pergi ke rumah ibadat, maka tentu kita tidak pergi ke sana layaknya kita pergi ke mall atau tempat-tempat umum lain. Kita perlu persiapan, terutama persiapan hati. Setiap kita pergi ke rumah ibadat untuk beribadat, perlu kita refleksikan sebentar, kita bawa apa ke sana. Kita harus berlaku sebagai orang yang hendak bertemu Tuhan. Kita datang dengan hati, yang terbuka, membawa keseluruhan diri, dan mendengar dengan baik dan mendengar dengan baik apa yang dikehendaki Tuhan dikatakan kepada kita, untuk kita hayati dengan iman yang hidup.

b. Mengikuti dengan Kesungguhan Hati

Kita datang ke tempat ibadat untuk ibadat bersama, dan tidak datang ke sana sebagai penonton, yang mengamati apa yang terjadi dalam ruang ibadat. Kita perlu aktif dalam beribadat. Kesungguhan hati itu bisa diperlihatkan melalui keterlibatan aktif fisik kita dalam mengikuti berbagai aktivitas ibadat yang sedang kita rayakan. Setiap ibadat yang kita ikuti tentu ada aturan dan

tat caranya sendiri. Kita perlu mengikuti secara aktif tata cara itu dari awal hingga akhir. Kita perlu melakukan gerakan tubuh seperti yang ditentukan, seperti duduk, berlutut, sujud, berdiri, dan sebagainya. Begitu juga kita perlu aktif mengucapkan atau membacakan doa-doa, nyanyian atau hal yang lain yang sudah ditentukan. Kita tidak boleh berbicara atau bisik-bisik tak karuan ketika ibadat sedang berlangsung. Kita hanya konsentrasi pada ibadat yang sedang kita ikuti. Diharapkan, dengan keaktifan seperti ini kita bisa lebih menghayati makna ibadat yang sedang kita rayakan, dan tidak merupakan peristiwa yang berlalu begitu saja, tanpa member kesan positif di dalam hati dan kehidupan kita.

c. Hidup Sebagai Orang yang Selalu Dibaharui (Mengibadahkan Seluruh Hidup)

Hidup kita sebagai suatu siklus antara dua kutub yang saling merajut, surgawi dan duniawi, dari ibadat menuju hidup sehari-hari, dan dari hidup sehari-hari menuju ibadat. Kedua kutub ini menjadi satu dalam diri kita, yang perlu kita hayati dengan kesadaran yang memadai. Ibadat berperan membaharui hidup kita, yang dalam kenyataannya selalu tenggelam dalam rutinitas sehari-hari. Dengan aktif beribadat berarti kita membuiarkan diri kita. Terus tenggelam dalam kehidupan duniawi, terlepas dari kehidupan ilahi. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi keterikatan hati pada hal-hal yang bersifat duniawi semata. Kegiatan ibadat adalah salah satu cara yang mampu menggugah hati kita, sebagai makhluk yang tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat fana. Keikutsertaan aktif kita dalam ibadat, yang kita lakukan dengan persiapan yang baik dan penghayatan yang sungguh-sungguh, akan mampu meremajakan komitmen kita. Dan, dengan komitmen yang telah dibaharui kita akan lebih siap kembali terjun dalam rutinitas kita, dengan segala tantangannya.

D. Penutup

Apakah Tuhan (Allah) ada? Saya merasa tertarik melihat begitu banyak perhatian yang diberikan kepada perdebatan ini. Keberadaan Allah tidak dapat dibuktikan atau disangkal. Kitab-kitab suci keagamaan bahkan mengatakan bahwa kita harus menerima keberadaan Allah dengan iman.

Selain argumentasi kitab-kitab suci keagamaan mengenai keberadaan Allah, ada pula argumentasi logis berdasarkan contoh-contoh di atas dapat dikategorikan menjadi tiga argumentasi, yaitu:

1. Argumentasi ontologis; Bentuk argumentasi ontologis yang paling populer pada dasarnya menggunakan konsep ketuhanan untuk membuktikan keberadaan Allah. Hal ini dimulai dengan mendefinisikan Allah sebagai, “sesuatu yang paling besar yang dapat dipikirkan.”
2. Argumentasi teleologis; Argumentasi teleologis mengatakan karena alam semesta mempertunjukkan desain yang begitu luar biasa, pastilah ada seorang desainer Ilahi.
3. Argumentasi kosmologis; Setiap akibat pasti ada penyebabnya. Alam semesta dan segala isinya adalah akibat atau hasil. Pastilah ada sesuatu yang mengakibatkan segalanya ada. Pada akhirnya, haruslah ada sesuatu yang “tidak disebabkan” yang mengakibatkan segala sesuatu ada. Sesuatu yang “tidak disebabkan” itu adalah Allah.

Langit biru dan cakrawala adalah batasan pandangan mata manusia, bilangan tidak terhingga adalah batasan perhitungan manusia, tidak tahu adalah batasan pengetahuan manusia. Tidak tahu bukan berarti tidak ada, sama dengan jumlah bilangan yang amat besar pasti ada, tetapi kita tidak tahu apa namanya dan berapa jumlahnya, demikian pula mengenai Tuhan, pasti segala-galanya, tetapi umur dan daya pikir kita terlalu kecil jika dibandingkan dengan apa yang hendak kita ukur, sehingga dapat diabaikan.

Manusia yang tidak dapat menggunakan kemampuan mentalnya tidak dapat mengenal Tuhan walaupun pikiran mereka sangat cerdas. Pikiran adalah salah satu dari kemampuan fisik, dia dapat mengalisa hal-hal yang bersifat fisikal, dia dapat mempelajari dan meneliti biologis fisik manusia, meneliti susunan atom-atom, tetapi pikiran tidak dapat mengamati kesadaran manusia, karena kesadaran bersifat mental yang frequencynya jauh lebih tinggi dari frequency pikiran.

Bagaimanapun cerdasnya kita, berapapun jumlah gelar yang dicapai, bagaimanapun geniusnya, kita tidak dapat secara pasti mengenal Tuhan karena kita masih berada dalam alam materi. Kita hanya bisa memahami dan mendekati Tuhan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita. Semoga pemahaman kita tentang Tuhan benar pula menurut Tuhan. Hanya Tuhan Yang Maha Tahu tentang Diri-Nya.

E. Tugas

Uraikan pandangan tentang TUHAN menurut agama/keyakinan iman yang Anda anuti! Apa pula implikasi (akibat lanjut) dari pandangan tentang TUHAN itu dalam hubungan Anda dengan sesama dan lingkungan di sekitarmu? Jelaskan dan contohkan secara konkret!

Daftar Pustaka

- Abdul, Maqsd Abdul Ghani Abdul Maqsd. 2000. *Agama dan Filsafat (Kajian terhadap Filosof Andalusia Ibnu Massaroh, Ibnu Thufail, dan Ibnu Rusyd*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. ke-1.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah: Muja'mma' Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Vol. I, Cet. ke-3.
- Eddy, Nyoman Tusthi. 1994. *Wajah Tuhan di Mata Penyair*. Denpasar: Pustaka Manikgeni. Cet. ke-1.
- Gea, Antonius Atosokhi. dkk. 2006. *Character Building III, Relasi dengan Tuhan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadiwijono, Harun. 1990. *Seri Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. Cet. ke-6.
- Madkour, Ibrahim. 1993. *Filsafat Islam Metode dan Penerapan Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. ke-3.
- Murata, Sachiko. 2000. *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Bandung: Mizan Media Utama. Cet. ke-8.
- Nasution, Harun. 1986. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press. Cet ke-5.
- _____. 1986. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI-Press, Cet ke-5.
- Noer, Deliar. 1983. *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Sudarsono. 1993. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2001. *Pluralisme Agama Menurut al-Qur'an, Telaah Aqidah dan Syari'ah*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Cet. ke-1.
- Tim Penulis Rosda Bandung. 1995. *Kamus Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Depdikbud. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Pustaka Setia. 2010. *UUD '45 Undang-undang Dasar Tahun 1945*. Bandung: Pustaka Setia. Cet. ke-10.
- Yahya, Harun. 2001. *Mengenal Allah Lewat Akal*. Jakarta: Robbani Press.

<http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2220956-pengertian-tuhan/#ixzz23fuQ1iej>.
<http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2220956-pengertian-tuhan/>.
<http://agama.kompasiana.com/2011/01/31/cara-untuk-mengenal-tuhan/>.
<http://www.gotquestions.org/indonesia/Apakah-Allah-ada.html>.
<http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/.../269/25>.

BABA VI

TOLERANSI DAN KERJASAMA ANTARUMAT BERAGAMA⁹

A. Pengertian Toleransi

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berbeda-beda satu sama lain. Nasib dan kemampuannya pun berbeda satu dengan lainnya. Demikian pula dengan bangsa kita. Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, agama, paham politik, dan krpntingan.

Adanya perbedaan pada masyarakat bisa memicu terjadinya perpecahan apabila setiap orang tidak mampu mengembangkan sikap toleransi. Sebaliknya, jika setiap anggota masyarakat mengembangkan sikap toleransi ini, maka perbedaan justru akan semakin memperkaya kehidupan.

Dengan demikian, apakah toleransi itu? Toleransi berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata *tolerare* yang berarti membiarkan. Dalam bahasa Inggris diistilahkan *tolerance* yang menurut *Webster's New American Dictionary* berarti memberi kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Dalam bahasa Arab toleransi diistilahkan dengan *tasamuh*, artinya membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan, saling memudahkan. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap menghargai, membiarkan,

⁹ Sebagian besar materi ini diadaptasi dari Frederikus Fios dan Antonius Atasokhi Gea (2012). Diktat Kuliah Character Building: Spiritual Development. Jakarta: Binus University-CBDC.

membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang.

Dengan demikian, toleransi berarti dengan sabar membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, toleransi berarti sikap sabar membiarkan orang lain memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya atau sebagai suatu sikap bersedia untuk bersanding hidup dengan orang lain yang berbeda agama, berdasarkan pada prinsip saling menghormati. Sikap demikian mensyaratkan adanya sikap yang mendahuluinya, yaitu sikap inklusif, bukan eksklusif.

Toleransi merupakan sikap hidup yang mutlak dimiliki setiap manusia. Tuhan saja menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain. Akan tetapi, Tuhan memerintahkan agar perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Perbedaan hendaknya menjadi kekayaan budaya kita.

Dalam hubungannya dengan masyarakat majemuk, sikap sedemikian itu perlu ditegakkan dalam pergaulan sosial, terutama dengan anggota-anggota masyarakat yang berlainan pendirian, pendapat, dan keyakinan. Toleransi merupakan sikap lapang dada terhadap orang lain, tanpa harus mengorbankan prinsip diri sendiri.

Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, perbedaan di antara warga Negara merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Setiap warga Negara memiliki hak untuk berbeda. Ia tidak bisa mendikte atau memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jika seseorang memaksakan kehendaknya kepada orang lain atau mendikte orang lain, maka ia berlaku semena-mena. Ia tidak memiliki sikap toleran. Sikap toleran adalah sikap sabar membiarkan orang lain berbeda pendapat, berbeda kedudukan, berbeda tujuan, berbeda agama, berbeda suku, dan sebagainya.

Sikap toleransi akan menciptakan hubungan harmonis. Sebaliknya, sikap intoleransi akan menciptakan hubungan konflikual, dan hal ini tidak akan memberikan manfaat bagi umat beragama. Hubungan konflikual antar umat beragama sesungguhnya seringkali lebih disebabkan bukan karena faktor agama sendiri. Tetapi lebih disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, yang secara sosiologis disebut *deprivasi relatif*, yaitu perasaan tertinggal suatu kelompok agama tertentu dari kelompok agama lainnya dalam bidang sosial-ekonomi yang kemudian dibawa kepada persoalan agama. Persoalan ini yang harus diperhatikan oleh setiap agama sehingga kerjasama mengentaskan kemiskinan dan ketidakmerataan pendidikan harus dijadikan agenda paling utama. Dalam konteks inilah maka kerukunan dan toleransi antar umat beragama menjadi sangat penting.

Pameran Agama-agama

Bersama seorang teman lain, kami mengunjungi sebuah pameran dunia agama-agama (pameran ini diikuti oleh agama Yahudi, Kristen dan Islam). Persaingan ketat sangat terasa, disertai berbagai propaganda yang sungguh keras. Dari bagian agama Yahudi diterima informasi bahwa Allah berbelas kasih, dan orang-orang Yahudi adalah bangsa terpilih. Pada bagian agama Kristen diwartakan bahwa Allah adalah kasih. Di luar Gereja tidak ada keselamatan. Hanya anggota-anggota Gereja saja yang terbebas dari bahaya keterkutukan kekal. Pada bagian agama Islam diperoleh informasi bahwa Allah Maha Besar dan Mulia, dan Islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Keselamatan akan diperoleh apabila beragama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah.

Ketika kami keluar dari pelataran pameran, saya bertanya kepada temanku, Apakah sikapmu terhadap Allah? Dia menjawab, Allah terlalu keras kepala, fanatik, dan sadis. Pada suatu kesempatan lain saya bertanya kepada Allah ketika kami sudah di rumah, Apakah sikap-Mu terhadap hal-hal itu, Tuhan? Apakah Engkau tidak tahu bahwa

manusia telah menyalahgunakan Engkau sejak berabad-abad lamanya? Allah berkata, Aku tidak mengorganisir pameran itu. Untuk ke sana saja Aku sendiri sebenarnya sangat malu.

B. Toleransi Sebagai Dasar Kerjasama antar Umat Beragama

1. Membangun Toleransi Melalui Dialog antar Umat Agama

Toleransi beragama dapat dibangun melalui dialog antar umat beragama. Karena dialog akan menghasilkan saling pengertian di antara umat beragama yang pada gilirannya memunculkan sikap toleran dan rukun. Jadi, toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan tujuan dialog. Dengan dialog diharapkan dapat terwujud masyarakat agama yang berjiwa kerukunan. Sehingga muncul kerjasama dan kebersamaan untuk menghadapi ketidakadilan sosial, terorisme, sukularisme, yang mengancam umat manusia di dunia. Dialog antar umat beragama merupakan kebutuhan hakiki umat beragama. Dialog merupakan pergaulan antar pribadi yang saling memberikan diri dan mengenal pihak lain apa adanya. Dalam dialog harus dilakukan *sharing* di antara umat beragama untuk saling membagikan informasi dan nilai-nilai yang dimiliki masing-masing, untuk menghadapi masalah-masalah kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk menambah sikap saling pengertian yang objektif dan kritis dan menumbuhkan kembali alam kejiwaan yang tertutup. Sehingga terwujud kerjasama untuk memenuhi kepentingan bersama.

Dalam konteks Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; perbedaan keyakinan dan agama merupakan hal yang lumrah dan wajar serta tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Yang terpenting dari perbedaan agama dan kepercayaan ini adalah untuk usaha membangun dialog antar umat beragama. Sehingga perbedaan tidak menjadi penyebab keretakan antar warga bangsa tetapi menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Dengan demikian dialog antar umat beragama perlu dijalankan dengan baik.

a. Beberapa Prinsip Penting yang Mendasari Dialog antar Umat Beragama

Spiritualitas hubungan antar umat beragama atau spiritualitas dialogal (*dialogal spirituality*) adalah sebuah gerakan religius umat beriman dengan mengosongkan dirinya untuk dipenuhi dengan “jiwa ilahiah” dan melihat realitas hidup di sekitarnya untuk berdialog dan kerukunan hidup yang sesungguhnya.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam dialog antar umat beragama di Indonesia, yaitu:

- 1) Penghayatan hidup yang didasarkan pada ikatan relasi kasih antara manusia dengan Allah, yang dalam filsafat agama Jawa disebut *Manunggaling Kawula Gusti* (Menyatunya Hamba dan Tuhan).
- 2) Perlu adanya kesadaran diri manusia bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, sesuai dengan gambaran dan rupa Allah sendiri di mana akhir perjalanan hidup manusia adalah persatuan jiwa manusia dengan Allah itu sendiri (*persatuan Atman dengan Paraatman dalam Hindhuisme*). Lebih jauh dari itu, cinta kasih Tuhan kepada manusia tercurah melimpah dalam seluruh ciptaan alam semesta.
- 3) Manusia beriman sejati menyadari tanggungjawab yang mendesak untuk sekali lagi membangkitkan sikap mendengarkan suara alam beserta misterinya. Umat beriman di manapun diundang untuk bertemu hati dalam keheningan dan cintakasih akan alam semesta, untuk

menerima tata tertib karya Tuhan dan serasinya alam, untuk menandingi daya-daya destruktif yang menghancurkan lingkungan. Harmoni dengan alam semesta menghidupkan harmoni dalam hati dan menjalin harmoni antar pribadi sesama manusia.

- 4) Spiritualitas yang menciptakan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan, maka spiritualitas dialogal mengungkapkan jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan.
- 5) Spiritualitas dialogal membutuhkan sikap dasar hati yang terbuka. Sikap yang demikian itu memerlukan model pengosongan diri (*kenosis*), suatu kesadaran tak berdaya, pemurnian tiada hentinya dari kecenderungan pemusatan diri, egoisme, bertumbuh terbuka dalam dialog dengan umat beriman lainnya.
- 6) Spiritualitas dialogal bersifat integral transformatif, yaitu merubah hidup orang beriman melalui sharing pengalaman hidup religius guna mengentaskan keterpurukan krisis total menuju Indonesia baru.

Dalam pergulatan demi transformasi itu semua umat beriman diminta bersikap sabar dan rendah hati. Tiap peserta dialog harus mencoba mengakukan pada dirinya sedapat mungkin intuisi dan pengalaman sesama digunakan untuk mencoba mengungkapkan dan mengkomunikasikan pengalaman religiusnya. Berkat bimbingan Tuhan, semua umat beriman diajak berdialog, berjalan bersama mencari kebenaran. Setiap peserta dialog antar umat beriman saling berbagi pengalaman religius kehidupan sehari-hari, saling memperkaya dan saling meneguhkan satu sama lain dalam membangun dunia yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Indonesia.

b. Buah dari Pelaksanaan Dialog antar Umat Beragama

Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari sikap toleransi melalui dialog antar umat beragama, yaitu:

- 1) umat beragama mengalami pengayaan di mana iman peserta diperluas dengan peluang untuk saling mendengarkan, menghalau segala praduga yang sudah mengakar, memperlebar pengertian yang sempit.
- 2) Iman peserta dijernihkan berkat perjumpaan antar umat beriman untuk merevisi asumsi, pandangan yang keliru antar umat beragama. Meninggalkan masa lampau yakni pengalaman yang buruk dalam membangun kerukunan hidup beragama, saling mengampuni dan memulai babak baru yang makin baik menuju kerukunan yang sejati.
- 3) Iman peserta diperdalam dengan saling mengenal dan menghargai berdasarkan landasan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh oleh sikap dan perilaku kelompok ekstrim.

Spiritualitas dialog yang sejati dan mendalam akan merubah sikap hidup kita antar umat beriman dari dialog antar iman (*interreligious dialogue – interfaith dialogue*) menuju pertobatan (*metanoia*). Semua peserta dialog antar umat beriman menjadi tanda pertobatan yang mengantarkan umat manusia kepada Allah.

c. Spiritualitas yang Perlu Diperhatikan dalam Dialog antar Umat Beragama

Spiritualitas dialogal secara konkrit dalam situasi pluralisme agama harus dikembangkan, dengan cara: pertama, kita hendaknya menyadari bahwa umat beragama dan umat kepercayaan lain adalah rekan-rekan seperjalanan dalam menuju Tuhan; kedua, merupakan kewajiban kita untuk menggalang kerekunan, kekerabatan, persaudaraan antar umat beragama dan umat kepercayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, sebagai model bagi hubungan sosial; ketiga, kekerabatan, persaudaraan itu akan menghasilkan kerukunan sebagai prinsip hubungan sosial; keempat, menjaga moralitas hidup yang baik, yang ditandai dengan kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan

menjunjung tinggi nilai-nilai insani luhur dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar hidup bermasyarakat; kelima, mengusahakan kesejahteraan umum (*bonum commune*), yang adil makmur dan merata, terutama dalam opsi mengutamakan rakyat miskin dan tersingkir. Itulah Spiritualitas transformatif, merombak hidup umat beriman sendiri semakin menyerupai diri Allah, melahirkan umat manusia yang baru dipenuhi cinta kasih.

Uraian di atas sesungguhnya terkait dengan keimanan setiap pemeluk agama apapun yang tidak hanya berdimensi teologis tetapi juga berdimensi sosiologis. Oleh karena itu, toleransi beragama dan kerjasama antar umat beragama menjadi sangat penting untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan antar umat beragama.

d. Mengatasi Hambatan Utama Dalam Dialog

Para peserta dialog antar umat beragama harus mempunyai perhatian penuh terhadap apa yang didialogkan dan menghargai serta mempercayai orang lain. Mereka juga harus bersikap terbuka untuk bersedia mengungkapkan diri kepada orang lain dan sanggup mendengar serta menerima ungkapan orang lain. Mereka harus memiliki sikap disiplin untuk mematuhi semua aturan dialog (Hendropuspito, 1983: 170). Dialog antar umat beragama tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan jika sikap-sikap seperti itu tidak dimiliki oleh peserta dialog.

Mereka perlu menyadari bahwa yang menjadi hambatan dalam dialog adalah bahasa yang berbeda, karena yang pasti para peserta masing-masing memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda-beda. Prasangka negatif, sifat egois dan nafsu membela diri pertama kali harus dihindari. Ada beberapa pedoman dialog antar umat beragama. Pertama, dasar pijak yang sama. Karena itu, mereka harus menyadari bahwa masing-masing di antara mereka memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang sama sebagai pencipta dan kepercayaan mengenai adanya misi yang sama dalam agama mereka masing-masing untuk mewujudkan keselamatan dan kedamaian hidup umat manusia.

Disamping itu, dalam konteks ke-Indonesiaan, mereka harus menyadari bahwa mereka hidup di satu negara, Indonesia. Karena itu, tekad untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa harus dijadikan prioritas. Dialog adalah untuk menumbuhkan saling pengertian dan saling menghargai yang bertolak dari bidang karya, sehingga semua agama di Indonesia dapat menjadi pendorong bagi kemajuan bangsa, bukan justru sebaliknya.

Masalah demoralisasi, kemiskinan, ketidakadilan, pengangguran, kerjasama antar umat beragama, kode etik pergaulan antar umat beragama, monopoli ekonomi, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai tema pilihan dalam dialog antar umat beragama. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana dialog tersebut dapat melahirkan solusi-solusi terhadap masalah tersebut.

PENCARIAN

Seribu tahun yang lalu dua filsuf bertemu di lereng gunung Lebanon. Yang satu berkata kepada yang lainnya, Kemana engkau akan pergi? Yang satunya menjawab, Aku mencari air mancur muda yang berada di sekitar perbukitan ini. Aku telah menemukan tulisan yang menceritakan bahwa air mancur itu berbunga-bunga saat matahari menyinarinya. Dan engkau, apa yang engkau cari? Filsuf pertama itu menjawab, Aku mencari misteri kematian. Kemudian mereka saling menganggap bahwa yang lainnya kurang

ilmunya, dan mulai mereka bertengkar, serta saling menuduh sebagai orang yang buta terhadap kejiwaan.

Ketika suara keras mereka terbawa angin, seorang asing, laki-laki yang dianggap tolol di desanya sendiri, lewat, dan ketika ia mendengar pertengkaran kedua filsuf yang semakin memanas, ia berdiri sebentar dan mendengar argumen mereka. Kemudian ia mendekati keduanya dan berkata, Sahabat-sahabatku yang baik, kelihatannya kalian berdua benar-benar menguasai bidang ilmu filsafat yang sama, dan kalian membicarakan hal yang sama, meski kalian katakan dengan bahasa yang berbeda. Salah satu dari kalian mencari air mancur muda, dan yang lain mencari misteri kematian. Namun sesungguhnya yang kalian cari itu hanya satu, dan berada dalam diri kalian berdua.

Orang asing itu pun berbalik dan pergi sambil mengatakan, Selamat berpisah, orang-orang bijak. Dan, ketika ia meninggalkan mereka, ia tertawa dengan tawa yang sabar. Dua filsuf itu saling memandang diam untuk sementara, dan kemudian juga tertawa. Lalu salah satu dari mereka berkata, Jadi sekarang, akankah kita berjalan dan mencari bersama-sama?

(Kahlil Gibran)

2. Kerjasama antar Umat Beragama

a. Pentingnya Kerjasama antar Umat Beragama

Agama diakui sebagai kekuatan pembebas bagi manusia; membebaskan manusia dari kesengsaraan hidup, dari ketidakadilan, dan dari penindasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka agama-agama harus lebih proaktif lagi mewujudkan perannya yang paling tinggi, yaitu “kerja sama”. Semua institusi agama dan juga etnis harus mengembangkan kesadaran akan pentingnya kerjasama, karena hubungan yang paling dekat dan paling erat serta paling berhasil dalam suatu kemajemukan adalah kerja sama.

Jika kesadaran dan kerjasama antar kelompok yang berbeda sedang berlangsung, maka apa yang disebut multikulturalisme kolaboratif sedang dibangun. Multikulturalisme kolaboratif merupakan salah satu pendekatan mengatasi masalah-masalah akibat perbedaan etnis, agama dan budaya, seperti konflik dan disintegrasi nasional. Baik keterasingan budaya maupun asimilasi budaya dapat membawa masalah apabila kerja sama tidak dikedepankan. Multikulturalisme kolaboratif menghargai perbedaan budaya secara mendasar dan tidak sekedar bersifat formalistik dan seremonial belaka.

Kerjasama antarumat beragama harus menyentuh kepada substansi persoalan. Misalnya persoalan moral generasi muda dewasa ini dan manusia secara keseluruhan. Orientasi manusia modern saat ini, seperti yang diyakini sosiolog Inggris Anthony Giddens, sebagai “run away world”, yaitu dunia yang tunggang langgang seperti truk yang lari kencang tidak jelas arahnya karena lepas dari pengemudinya. Manusia sekarang mengalami disorientasi. Persoalan kemiskinan juga menjadi masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia; anak-anak putus sekolah, mereka yang kecanduan obat terlarang, kerusakan lingkungan, dan sebagainya merupakan masalah penting yang harus dipecahkan bersama antarumat beragama.

b. Bentuk-Bentuk Kerjasama Antar Umat Beragama

Banyak aspek yang dapat dilakukan bersama antarumat beragama. Artinya agama-agama dapat bekerja sama untuk melakukan peran pencerahan dan pembebasan yang membuahkan

pemberdayaan bagi para penganutnya dan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Berikut ini ada tiga bentuk kerjasama yang dapat dilakukan bersama.

1) Perbaikan moral

Tugas utama agama adalah bagaimana agar agama dengan berbagai pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya bisa menjadi sumber semangat dan moralitas bagi umatnya. Di sini peran berbagai institusi keagamaan, termasuk departemen agama sendiri sangat diharapkan. Para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dituntut untuk bisa menjadi nabi-nabi, guru dan imam zaman ini, yang menyuarakan kehendak Allah, bagi kebaikan, perdamaian, kebahagiaan dan keselamatan umat manusia.

Departemen agama dituntut untuk tampil sebagai pengayom bagi tumbuh-kembangnya iklim keagamaan yang harmonis, rukun dan damai di bumi persada ini. Lembaga-lembaga keagamaan harus berefleksi kembali apakah sudah memainkan peran yang tepat dalam menumbuh-kembangkan iklim keagamaan yang kondusif di Indonesia. Juga dapat menanyakan pada dirinya apakah sudah menjadi sumber pembentukan watak dan akhlak bagi umat yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka.

2) Penegakan keadilan

Boleh dikatakan bahwa masyarakat kita sudah cukup lama menderita karena ketidakadilan. Di berbagai sektor kehidupan berlangsung perlakuan yang tidak sama, baik terhadap individu maupun kelompok (suku, etnis, daerah, wilayah, gender, agama, status, dan sebagainya). Diskriminasi dalam berbagai bentuk dan cara, berlangsung di berbagai sektor kehidupan, tanpa ada yang sungguh-sungguh peduli dengan itu. Di sinilah agama-agama terpanggil untuk memainkan peran pembebasannya. Bukan tidak mungkin agama-agama dapat secara bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi bahkan memberantas praktek yang sudah menyengsarakan rakyat dan umat dalam waktu yang cukup lama itu.

3) Perbaikan taraf hidup

Perbaikan taraf hidup warga dan umat sangat mendesak sekali. Ketertinggalan di salah satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Kalau ekonomi lemah, maka peningkatan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, juga ikut terbengkalai. Bahkan untuk bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik, seseorang dituntut untuk mampu memenuhi persyaratan minimal. Seorang muslim misalnya, dia harus shalat, harus puasa, zakat dan pergi haji. Keempat rukun Islam itu tidaklah dapat dijalaninya dengan sempurna kalau dia seorang miskin. Melakukan ritual sholat, perlu berpakaian bersih dan rapi. Menjalani puasa, perlu modal untuk berbuka puasa dan makan sahur. Untuk mengeluarkan zakat, seseorang tidak mungkin akan bisa kalau dirinya sendiri miskin. Apalagi untuk pergi haji dengan ongkosnya antara 25 sampai 35 juta rupiah. Jadi untuk bisa menjadi muslim yang baik mesti mempunyai kemampuan harta minimal. Begitu juga seorang Kristen yang baik, harus rajin mengikuti ritual-ritual keagamaannya secara teratur. Untuk bisa melakukan itu, seseorang perlu berpakaian rapi dan bersih, perlu kendaraan dan ongkos jalan ke Gereja. Perlu juga mengisi kas Gereja dan memberi persembahan. Hal yang kurang lebih sama berlaku juga untuk agama-agama lain.

c. Langkah-Langkah Konkrit Penting

Untuk mewujudkan kerjasama kerjasama maka perlu ada langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh setiap semua umat beragama, sebagai berikut:

1) Memperbaiki paradigma hidup keagamaan

Sebagai bangsa beragama, kita berharap bahwa pesan-pesan keselamatan dari Tuhan bukan hanya tinggal sebagai yang ideal saja, yang tidak tersentuh oleh manusia. Agama-agama, dengan kerjasama yang semakin baik, harus mencari jalan agar pesan-pesan keselamatan itu dapat menjadi milik manusia dan menyemangati hidupnya. Pada tataran teologis agama-agama perlu mengubah paradigma teologis yang pasif, tekstual dan eksklusif. Agama-agama harus mengembangkan teologi yang inklusif, pluralis, kontekstual, yang mampu menggugah para pemeluk agama untuk menemukan kehendak Allah dalam berbagai praksis dan pergumulan hidup mereka. Teologi harus memperjuangkan kebebasan dari segala belenggu dan penindasan, sekaligus memberi dorongan dan kekuatan untuk hidup dengan baik, di hadapan Tuhan dan sesama. Dialog antar agama perlu ditingkatkan lagi, untuk secara bersama-sama mencari bagaimana pesan Allah dapat ditangkap oleh manusia zaman ini, dan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan hidup yang semakin baik.

2) Membela kaum lemah

Kerjasama yang dibangun hendaknya terutama berorientasi untuk memihak yang lemah dengan memberdayakan mereka. Perbaikan taraf hidup masyarakat sebaiknya dilakukan secara simultan di berbagai sektor penting kehidupan. Namun dalam kenyataannya, kalau kemampuan ekonomi semakin baik, maka perbaikan di bidang lain lebih mudah dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa perbaikan kondisi ekonomi perlu dijadikan prioritas. Kenyataan menunjukkan bahwa kalau seseorang belum makan (perutnya kosong), anaknya tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya, kalau kondisi kesehatan mereka memprihatinkan, bagaimana kita mengajak mereka untuk menghayati betapa baiknya Allah kepada mereka? Kebaikan Tuhan bisa sampai kepada seseorang melalui sesamanya. Agama-agama terutama harus dapat menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi manusia. Untuk itu, lembaga-lembaga sosial keagamaan harus bekerja sama mencari bentuk-bentuk kerjasama yang orientasinya terarah untuk memberdayakan masyarakat lemah. Kerjasama ini harus bebas dari campur tangan pihak luar serta tujuan-tujuan di luar tujuan yang sebenarnya.

3) Menghadirkan suasana surga di dunia ini

Setiap agama harus menunjukkan sikap bersahabat yang tulus, sebagai yang sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab menciptakan pembaharuan di dunia ini. Keselamatan abadi, sebagaimana dijanjikan oleh setiap agama, yang dalam istilah agama disebut surga, tidak akan kita alami sekarang ini apabila hidup manusia bergelimang penderitaan dan keterbelakangan, baik secara fisik maupun non-fisik. Surga dari nirwana sebagai lambang kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan hidup, bukanlah hanya sebagai kenyataan di akhirat nanti, melainkan seharusnya kita sudah mulai menikmatinya dalam kehidupan di dunia ini. Hal itu bisa terjadi dalam bentuk ketentraman, keamanan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan segala wujud kebaikan bersama. Itulah yang kita usahakan dalam semangat keagamaan dan iman, yang harus kita tumbuhkan kembangkan di antara kita semuanya.

4) Menjadi pelopor perbaikan akhlak

Perbaikan akhlak dari bangsa kita ini sudah sangat mendesak sekali. Potret keagamaan sebagaimana diungkapkan pada bagian pertama topik ini sangat berkaitan dengan kepemilikan watak dan akhlak buruk oleh sebagian besar orang berpengaruh di negara ini. Kalau watak, karakter atau akhlak tetap tidak berubah (apalagi bila semakin buruk), maka kita akan semakin terperosok ke jurang kehancuran. Sebuah bangsa akan hancur ketika moralitasnya hancur, demikian kata penyair Syauqi Beik. Dalam hal perbaikan moralitas bangsa ini, agama tidak boleh berpangku tangan saja. Ada tanggungjawab besar terletak di pundaknya, yang harus dia jalankan dengan sepenuh hati, melebihi yang sudah-sudah. Dalam aktivitas sehari-hari, setiap peribadi beriman hendaknya bisa menjadi teladan bagi sesamanya. Bagi masyarakat Indonesia yang paternalistik, keteladanan sangat

penting. Masing-masing tokoh, masing-masing umat beragama yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin, entah itu pimpinan birokrat atau pemimpin organisasi atau bahkan telah dipercaya menjadi wakil rakyat, hendaklah menjadi teladan kebaikan, dengan menjaankan tugas dan pengabdianya penuh tanggung jawab.

5) Bekerjasama memberantas kejahatan dan menebar kebaikan

Kerjasama antar berbagai agama dapat diarahkan juga dengan bijak untuk memberantas kejahatan di berbagai lingkup kehidupan. Agama secara bersama-sama dapat mencari jalan umpamanya, bagaimana cara mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Indonesia, biarpun tingkat keberagamaannya mendapat acungan jempol oleh sementara bangsa dan negara lain, namun korupsinya telah menjadi seni dan bagian dari budayanya. Korupsi dan kejahatan lainnya menjadi sangat tidak ada korelasinya dengan ketaatan beragama, padahal budaya korupsi adalah penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat.

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa beragama tidak berarti tidak korupsi atau melakukan kejahatan lain? Kita tidak perlu under-estimate, seolah-olah agama tidak mampu mendorong anti korupsi dan anti kejahatan lainnya. Bukan agama yang gagal, melainkan tokoh dan penganut agama itu yang memiliki pemahaman dan penghayatan agama secara tidak benar. Kesalehan individu tampaknya belum menjadi jaminan kesalehan sosial dan profesional. Agama-agama tidak membenarkan kejahatan, ketidakjujuran dan segala bentuk immoralitas sosial lainnya. Agama mengajarkan norma yang mulia, budaya malu, kokoh dalam kebaikan, gaya hidup sederhana, ethos kerja tinggi serta orientasi pada kemajuan dan prestasi. Agama dalam konteks demikian berposisi sebagai pembimbing dan kontrol transendental. Penganut agama seharusnya juga merasa dia tetap dikontrol oleh Yang Maha Tahu, kapan pun dan dimana pun dia berada. Selain itu, agama juga mengajarkan kehidupan sesudah mati, yang punya kaitan dengan kehidupan di dunia sekarang ini. Maka, meskipun tindakan korupsi dan kejahatan lain yang dilakukan sekarang ini sempat lepas dari pengawasan manusia, pengadilan di kemudian hari tidak akan melepaskannya begitu saja. Keberagamaan yang substantif akan mampu mencegah penganutnya dari perilaku korup. Melalui aktivitas kemasyarakatan, hendaknya ada semacam gerakan moral untuk mencegah terjadinya perilaku korup dalam berbagai bentuk, dengan cara memberikan sanksi moral bagi pelakunya. Agama-agama harus memasyarakatkan dan menyebarluaskan kebaikan melalui kerjasama di berbagai proyek kemanusiaan dan mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk berbuat baik. Himbauan atau seruan yang terus menerus dari tokoh-tokoh agama, yang disertai dengan keteladanan yang terpuji, dapat mendorong umat untuk menjauhi kejahatan dan berusaha hidup secara baik.

KEKUATAN TANPA KEKERASAN

Dr. Arum Gandhi adalah cucu Mahatma Gandhi dan pendiri Lembaga M.K. Gandhi untuk tanpa kekerasan. Pada tanggal 9 Juni ia memberikan ceramah di Universitas Puerto Rico dan bercerita bagaimana memberikan contoh-contoh tanpa kekerasan yang dapat diterapkan di sebuah keluarga. "Waktu itu saya masih berusia 16 tahun dan tinggal bersama orang tua di sebuah lembaga yang didirikan oleh kakek saya, di tengah-tengah kebun tebu, 18 mil di luar kota Durban, Afrika Selatan. Kami tinggal jauh di pedalaman dan tidak memiliki tetangga. Tak heran bila saya dan 2 saudara perempuan saya sangat senang bila ada kesempatan pergi ke kota untuk mengunjungi teman atau menonton bioskop.

Suatu hari ayah meminta saya untuk mengantarkan beliau ke kota untuk menghadiri konferensi sehari penuh. Dan saya sangat gembira dengan kesempatan itu. Tahu bahwa saya akan pergi ke kota, ibu memberikan daftar belanjaan yang ia perlukan. Selain itu, ayah juga meminta saya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang lama tertunda, seperti memperbaiki

mobil di bengkel. Pagi itu setiba di tempat konfrensi ayah berkata "Ayah tunggu kau di sini jam lima sore. Lalu kita akan pulang ke rumah bersama sama." Segera saja saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh ayah saya. Kemudian saya pergi ke bioskop. Wah, saya benar-benar terpicat dengan dua permainan John Mayne sehingga lupa akan waktu. Begitu melihat jam menunjukkan pukul 5.30, langsung saya berlari menuju bengkel mobil dan terburu-buru menjemput ayah yang sudah menunggu. Saat itu sudah hampir pukul 6.00. Dengan gelisah ayah menanyai saya, "Mengapa kamu terlambat?" Saya sangat malu untuk mengakui bahwa saya menonton film John Wayne sehingga saya menjawab, "Tadi, mobilnya belum siap sehingga saya harus menunggu." Padahal, ternyata tanpa sepengetahuan saya, ayah sudah menelepon bengkel mobil itu.

Dan kini ayah tahu kalau saya bohong. Lalu ayah berkata, "Ada sesuatu yang salah dalam membesarkan kamu sehingga engkau tidak memiliki keberanian untuk menceritakan kebenaran pada ayah. Untuk menghukum kesalahan ayah ini, ayah akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki 18 mil dan memikirkannya baik-baik." Lalu dengan tetap mengenakan pakain dan sepatunya, ayah mulai berjalan kaki pulang ke rumah. Padahal hari sudah gelap, sedangkan jalanan sama sekali tidak rata. Saya tidak bisa meninggalkan ayah, maka selama lima setengah jam, saya mengendarai mobil pelan-pelan di belakangnya, menyaksikan penderitaan yang dilakukan oleh ayah hanya karena kebohongan bodoh yang saya lakukan. Sejak saat itu saya tidak pernah berbohong lagi.

Sering kali saya berpikir tentang kejadian ini dan merasa heran. Seandainya ayah menghukum saya sebagaimana kita menghukum anak-anak kita maka apakah saya akan mendapatkan sebuah pelajaran mengenai tanpa kekerasan? Saya kira tidak. Saya akan menderita atas hukuman itu dan melakukan hal yang sama lagi. Tetapi, hanya dengan satu tindakan tanpa kekerasan yang sangat luar biasa, membuat saya merasa kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Itulah "kekuatan tanpa kekerasan". (Dr. Arun Gandhi)

d. Hasil Kerjasama Antar Umat Beragama

Kerjasama antarumat beragama akan membuahkan beberapa hasil positif bagi setiap umat beragama, bagi bangsa Indonesia, dan umat manusia pada umumnya. Pertama, kerjasama akan dapat meningkatkan keberimanan secara teosentis maupun sosiologis. Secara teosentris, hubungan umat beragama dengan Tuhan akan semakin kuat karena mereka akan saling mengingatkan dan menasehati. Secara sosiologis, keberimanan teosentris dapat diwujudkan ke dalam kehidupan sosial.

Kedua, kerjasama antarumat beragama akan menghasilkan hubungan sosial yang kuat (*social embeddedness*) dalam dan antar umat beragama. Karena muncul kepercayaan (*social trust*) di antara mereka, sehingga tidak ada lagi prasangka negatif di antara mereka baik pada tingkat individual (*prejudice*) maupun pada tingkat kolektif (*stereotype*).

Ketiga, moral umat beragama akan menjadi lebih baik karena ada aksi bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setiap umat beragama akan saling berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Keempat, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat agama akan meningkat karena ada kepedulian bersama terhadap masalah tersebut.

Ada beberapa catatan penting lainnya yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan kerjasama antarumat beragama yang perlu kita pahami. Kerjasama antarumat beragama merupakan suatu karakter etik (*ethic character*), dimana kerjasama tersebut didasarkan kepada kesadaran nurani bahwa hal itu memang betul-betul diperintah oleh agama, jadi muncul dari dalam (hati nurani) dan memancar keluar mewujudkan ke dalam kerjasama. Karakter etik merupakan "pesan Tuhan" yang harus dilakukan oleh umat beragama. Oleh karena itu, karakter etik melekat pada sifat-sifat umat beragama, seperti integritas, rendah hati, kepedulian, dan keteladanan.

KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA DENGAN SVP DAN STP

Alvin adalah seorang alumni sebuah perguruan tinggi di metropolitan yang menyadari betul akan makna kerjasama antarumat beragama. Dia memastikan dirinya untuk menjadi motor penggerak kerjasama antarumat beragama di daerahnya di Sumatera. Kesadaran seperti itu dia tanamkan ke dalam pikiran dan kalbunya. Maka dia tulis Statemen Visi Pribadi (SVP) dia ketika masih mahasiswa semester lima, yaitu: “Saya menjadi pelopor kerjasama antarumat beragama di daerah saya, agar semua umat beragama hidup aman, damai dan sejahtera.”

Alvin menurunkan SVP-nya ke dalam Statemen Tindakan Pribadi (STP) dia sendiri. STP merupakan tindakan-tindakan spesifik yang harus dia lakukan mulai “sekarang” untuk mencapai visinya. Maka dia buat STP dalam durasi waktu tiga bulan (stengah semester). Dia rinci seperti ini: (1) dalam minggu pertama saya harus memiliki sahabat yang beragama A, (2) dalam minggu kedua, saya harus memiliki sahabat yang beragama B, (3) dalam minggu ketiga saya punya sahabat yang beragama C, dan (4) dalam minggu keempat saya memiliki sahabat beragama D. Dalam minggu kelima setiap sahabat saya itu memperkenalkan lima sahabatnya kepada saya, dan kemudian dalam minggu keenam mereka semua menjadi sahabat saya.

Mulai minggu ketujuh kami sepakat untuk berdiskusi tentang apa yang harus kami lakukan terhadap anak-anak jalanan yang ada di perempatan lampu merah Slipi. Maka pada minggu kedelapan kami bersepakat untuk menghimpun mereka dan mengajari mereka baca-tulis. Kami mengumpulkan uang semampu kami. Kami belikan uang itu alat-alat tulis. Lalu minggu berikutnya sampai minggu keduabelas mengajari mereka baca-tulis.

Pada bulan-bulan berikutnya kami melakukan pekerjaan itu dengan konsisten secara bergantian. Hubungan kami solid dengan teman-teman yang berbeda agama. Kami semua bahagia karena kerjasama kami membuahkan hasil, karena di antara beberapa anak jalanan yang kami bina sukses menyelesaikan pendidikannya hingga paket C.

Ketika saya pulang ke daerah, saya mengembangkan kebiasaan itu. dan saya bersyukur apa yang saya lakukan dapat diterima oleh semua tokoh agama dan masyarakat agama. Saya dapat membangun koperasi simpan-pinjam tanpa bunga kepada siapapun, khususnya kepada pemeluk agama apapun yang memang tidak berdaya mengembangkan usaha kecilnya. Dengan modal kepercayaan justru modal koperasi berkembang pesat, karena setiap peminjam dengan sukarela memberikan kelebihan rizkinya kepada koperasi untuk didistribusikan kepada saudara-saudara mereka yang berbeda agama yang sedang kurang beruntung. Sungguh saya sangat berbahagia dengan apa yang saya lakukan. *(dikonstruksi oleh Syamsul Arifin)*

C. Beberapa Model Dialog Sebagai Wujud Toleransi Beragama

Untuk mengembangkan suatu dialog antar umat beragama, diperlukan suatu model sebagai pedoman. Tidak hanya satu model yang bisa menjadi pedoman. Beberapa model telah dikemukakan oleh beberapa pemikir agamawan.

1. Membuat Pengelompokan

Paul F. Knitter dalam bukunya, *Satu Bumi Banyak Agama*, membagi model dialog itu menjadi tiga macam yaitu:

- a. Pusatkan pembicaraan atau tema tentang “ada banyak jalan menuju ke satu sumber yang Ilahi (Divine Center)” sebagai titik berangkat atau kriteria.
- b. Berbagai kategori yang sama dipakai untuk mengelompokkan mereka menurut eklesiosentris (terpusat pada Gereja) atau kristosentris (terpusat pada Yesus) atau teosentris (terpusat pada Allah) sebagai titik berangkat atau kriteria

- c. Mempergunakan kriteria penjabaran tentang pemahaman Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme, (Kristus menolak agama-agama lain, Kristus di dalam agama-agama, atau Kristus bersama agama-agama lain)

2. Melakukan Dialog Bertingkat

Ada lagi bentuk dan model dialog yang dikemukakan oleh Dr. Krishnanda Wijaya Mukti. Dalam bukunya *Wacana Buddha Dharma* dinyatakan bahwa ada beberapa bentuk dialog, tetapi tidak setiap dialog itu cocok untuk setiap orang dalam setiap kesempatan. Karena itu, dialog antar agama dibedakan sebagai berikut:

- a. Dialog kehidupan sehari-hari; Sekalipun tidak langsung menyentuh perspektif iman dan ajaran, semua orang bekerja sama, belajar mencontoh kebaikan dalam praktek sehari-hari, di dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan lain sebagainya.
- b. Dialog melakukan pekerjaan social; Bekerjasama dengan para pengikut agama lain dengan sasaran meningkatkan martabat dan kualitas hidup manusia, misalnya membantu mereka yang mengalami penderitaan, melaksanakan proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.
- c. Dialog pengalaman keagamaan Saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai dan cita-cita rohani masing-masing pribadi dengan berbagi pengalaman berdoa, meditasi dan sebagainya. Pemeluk satu agama bisa tinggal untuk beberapa waktu di tengah komunitas pemeluk agama lain. Berkumpul melakukan doa bersama (dengan cara sendiri-sendiri) untuk tujuan yang sama, misalnya untuk perdamaian dunia, keselamatan bersama, dan lain sebagainya.
- d. Dialog pandangan teologis; Dialog ini dilakukan oleh ahli-ahli agama, untuk saling memahami dan menghargai nilai-nilai rohani masing-masing. Melalui dialog ini mereka mengangkat pandangan keagamaan dan warisan tradisi keagamaan dalam menyikapi persoalan yang dihadapi manusia.

3. Menghargai Perbedaan Interpretasi Teks Suci

Model lain ditawarkan oleh Muhammad Ali dengan menetengahkan beberapa sikap yang perlu dipegang dalam melakukan dialog seputar perbedaan pemahaman dan interpretasi atas teks-teks suci, sebagaimana termuat dalam kitab-kitab keagamaan.

- a. Mengakui perbedaan pemahaman terhadap kitab suci orang lain. Karena umat Islam, umat Kristen dan Yahudi misalnya, berbagi sejarah yang sama, maka juga memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Kaum Muslim berhak memberikan tafsiran atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena mereka merupakan bagian dari warisan ini. Kaum Muslim bisa jadi memiliki Kristologi sendiri yang berbeda dengan pandangan Kristen, sebagaimana kaum Kristen dan Yahudi berhak memiliki Islamologinya sendiri. Terdapat interpretasi yang berbeda antara umat Islam, Kristen dan Yahudi terhadap sosok Ibrahim (Abraham), Musa dan Isa atau Yesus.
- b. Menghargai perbedaan pemahaman terhadap kitab suci dalam agama tertentu. Kalangan liberal Yahudi misalnya, berpendapat bahwa Alkitab merupakan pewahyuan Ilahi, namun tetap merupakan dokumen manusiawi dan bukan produk pewahyuan secara harfiah. Sedang kaum konservatif tidak sependapat dengan itu. Mereka lebih memahami Taurat murni sebagai wahyu ilahi, sekaligus teks dan isinya. Perbedaan pandangan seperti ini memperlihatkan betapa setiap tradisi iman tidak saja memiliki pandangan sejarah dan teologi yang berbeda tentang iman dan kitab suci orang atau

agama lain, melainkan juga tentang tradisi mereka sendiri.

- c. Berdebat secara cerdas, dan bukan berdebat kusir. Diskusi dan dialog harus dilakukan dengan cara yang paling baik dan paling tepat. Tidak ada penghujatan, pengkafiran, pelabelan 'setan' terhadap mitra dialog, atau *theological judgment* lain yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan.

Persoalan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka bukanlah persoalan sesama manusia. Itu pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang menentukan dan menjelaskannya nanti. Yang penting bagi kita ketika di dunia ini adalah pencarian kebenaran secara tulus dan bertanggung jawab. Seorang muslim misalnya hanya berhak mengatakan "kita memiliki pesan Allah melalui Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang otentik secara historis, dan pesan ini harus disampaikan dengan cara terbaik kepada dunia, dan terserahlah manusia apakah mau menerima atau tidak pesan tersebut". Hal yang sama berlaku juga bagi agama-agama lain. Mereka hanya berhak menyatakan sesuatu tentang apa yang mereka imani. Namun siapa pun tidak bisa mendahului Allah untuk melakukan penilaian. Dan, tidak boleh suatu agama memaksakan seseorang untuk menerima pernyataan atau pewartaan iman mereka.

ATAS NAMA TUHAN

Menurut cerita turun temurun, kota kami dilewati jalan Dandels yang dibangun dengan kerja rodi. Pusat kota yang terdapat alun-alun, tersebar bangunan beribadah dari berbagai macam agama. Terdapat bangunan masjid yang berhadap-hadapan dengan penjara. Di sampingnya masjid dengan dipisahkan jalan, berdiri pusat pemerintahan, di sampingnya dengan dipisahkan jalan berdiri sebuah bangunan gereja. Sedangkan di samping gereja dengan dipisahkan jalan, berdiri bangunan vihara. Kemudian di samping vihara dengan dipisahkan jalan, berdiri bangunan penjara dan di samping penjara yang dipisahkan jalan, berdiri bangunan kantor kejaksaan.

Susunan pusat kota kami menurut cerita turun temurun di samping menunjukkan toleransi beragama juga menunjukkan sebuah hubungan antara sebuah kehidupan yang religius dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pusat pemerintahan yang terletak di antara penjara dan bangunan-bangunan beribadah ibadat diharapkan akan membuat para pemegang kendali pemerintahan untuk bekerja secara benar, sebab jika mereka bertindak tidak benar dalam menjalankan pemerintahan maka mereka akan menerima siksa akhirat tercermin dari bangunan beribadah dan akan mendapatkan siksa dunia yang tercermin dalam bangunan penjara dan kantor kejaksaan.

Di waktu aku kecil, tidak terdapat sebuah tembok tinggi yang memisahkan kami dengan teman-teman yang berbeda agama. Di waktu perayaan Idul Fitri, kota kami sangat meriah di malam hari. Kami merayakannya dengan suka cita, keliling kota dengan kendaraan truk dan bak terbuka sambil membawa obor. Teman-teman kami yang berbeda agama turut larut dalam kegembiraan. Walaupun tidak mengucapkan takbir, mereka ikut berteriak-teriak sambil memutar-mutar obor. Tidak ketinggalan teman-teman kami yang berbeda agama ikut unjung-unjung dan menikmati makanan khas lebaran, Lontong Opor.

Dan di waktu perayaan Natal, kami yang jumlahnya mayoritas mengunjunginya beramai-ramai. Kami selalu memegang dan memandangi pohon Natal yang berhiaskan bermacam lampu. Kami juga makan bersama tanpa sedikitpun rasa takut, disediakan makanan yang menurut kami haram. Mereka telah mengetahui secara baik, ada beberapa makanan yang tidak boleh kami makan. Guru mengaji kami telah berkali-kali menerangkan batas-batas di antara kami dengan jelas. Sehingga kami semuanya telah mengetahui kapan kami boleh ikut dalam perayaan Natal dan kapan kami harus keluar untuk menghormatinya beribadat. Satu lagi

yang penting, orang tua kami tidak pernah ketakutan kami akan berpindah agama gara-gara ikut makan bersama merayakan Natal. Ternyata memang terbukti, sampai saat ini diantara teman-temanku yang selalu ikut makan di waktu perayaan Natal tidak ada yang berpindah agama.

Tetapi setelah kota kami berubah menjadi kota industri, segalanya berubah. Toleransi beragama menjadi sesuatu yang langka terjadi. Penyebabnya adalah banyaknya orang yang bekerja di kota kami yang berasal dari luar kota membawa sebuah pengaruh baru dalam pemahaman tentang toleransi. Di tambah orang-orang dari kota kami yang belajar di bangku kuliah di luar kota, juga membawa pemahaman baru tentang toleransi. Teman-temanku yang di waktu dulu walaupun berbeda agama selalu bermain bersama-sama, sekarang menaburkan benih-benih permusuhan. Kota kami sekarang tersekat-sekat oleh agama yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbeda agama selalu diusir jika mendekati tempat ibadah. Mereka menghindari fitnah mengajak anak-anak pindah agama, yang dapat menimbulkan kerusuhan yang berbau SARA. Kota kami kini telah bermunculan sekolah-sekolah berdasarkan agama, mulai dari TK sampai SMA.

Seperti teman sebayaku, aku juga menimba ilmu di bangku kuliah di luar kota. Tetapi semangat toleransi yang terbina sejak kecil tidak dapat mempengaruhi aku untuk melihat orang di luar agamaku adalah musuh. Namun, tidak semuanya temanku semasa kecil dapat bertahan pada toleransi yang telah mereka rasakan di masa lampau. Kedua temanku Nurdin yang sekarang berjenggot dan bercelana congklang dan si Alex yang selalu berkalung salib besar yang sewaktu kecil akrab sekarang mulai membuka Front. Mereka pernah berdebat kusir mengenai agamanya masing-masing. Dapat ditebak akhir dari perdebatan ini, yaitu saling menghujat dan melahirkan permusuhan.

Setelah selesai kuliah, kini aku bekerja pada sebuah pabrik di kota kelahiranku. Pabrik tempatku bekerja pemiliknya adalah orang yang beragama kristen. Dan rata-rata pekerjaannya juga beragama kristen. Walaupun banyak di antara temanku mengingatkan akan bahayanya bekerja di perusahaan tersebut, tetapi aku tidak peduli, sebab sampai sekarang tidak ada kalimat yang tersurat maupun tersirat aku harus pindah agama jika ingin mendapatkan karier yang bagus. Buktinya, setelah beberapa tahun bekerja, karierku di perusahaan tersebut lumayan bagus. Kadang-kadang aku mendengarkan keluhan dari temanku yang berbeda agama, mengenai sikap dari orang-orang yang seagama denganku yang kurang ramah.

“Kalau masalah tersebut, jangan dibawa ke masalah agama. Sebab bukan hanya pemeluk agama saya yang berbuat demikian, mungkin ada juga pemeluk agamamu yang berbuat demikian. Tetapi yang jelas setiap agama menganjurkan perbuatan yang baik.” kataku. “Kalau boleh tahu, seperti apakah ciri-cirinya dari pemeluk agamamu yang kurang toleransinya dalam kehidupan beragama?” tanya temanku. Aku terdiam, memikirkan sebuah jawaban yang tidak membuat masalah menjadi lebih runcing. “Menurut saya, orang yang ingin memformalkan kehidupan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah orang yang mempunyai toleransi beragama yang rendah. Sebenarnya semua pertanyaanmu adalah bernada kecurigaan. Dan kadang andalah sebagai pihak yang minoritas yang memancing kecurigaan. Seperti di perusahaan ini juga memancing kecurigaan. Kenapa dari pemilik yang beragama kristen, mayoritas pegawainya juga kristen?” jawabku. Temanku terdiam dan mengangguk sebagai tanda mengerti.

Semakin lama, aku semakin menyadari posisiku dalam kehidupan sosial sangat tidak menguntungkanku bukan hanya berada dalam posisi netral dalam perebutan pengaruh agama di kotaku, namun ada sebuah isu yang beredar bahwa aku telah “MALIH KIBLAT”. Sungguh, aku sangat menyayangkan isu tersebut. Bahkan yang lebih mengecewakan aku, isu tersebut di hembuskan oleh temanku sendiri, Nurdin, dalam setiap ceramah-ceramahnya di setiap pengajian yang dia kunjungi. Sebenarnya, keinginanku sederhana, aku tidak ingin menjadi wasit ataupun juru damai kehidupan beragama di kotaku yang sedang mengalami permasalahan

toleransi. Aku hanya ingin semuanya normal, seperti masa kecilku dulu, diantara kami yang berbeda agama tidak ada rasa saling mencurigai.

Pada suatu hari menjelang Maghrib, setelah aku pulang kerja kulihat Nurdin menghampiriku yang sedang berada di teras rumah sambil minum kopi. Setelah mengucapkan salam dan berbasa-basi sebentar Nurdin mulai mengutarakan maksudnya. “Rif, kenapa kamu tidak keluar dari perusahaan itu? Bukankah kamu sudah tahu siapa pemiliknya? Dia adalah donatur terbesar dari gereja terbesar di kota ini. Aku yakin jika kamu keluar dari perusahaan itu, Allah pasti akan memberikan rejeki kepada kamu yang jauh lebih besar.”

“Din, kenapa sekarang kamu berpandangan sempit. Apakah kamu masih ingat ketika kita kecil dulu. Bukankah kita saling menghormati agama orang lain dan tidak memagari diri kita dengan tembok yang tinggi terhadap orang yang berbeda agama. Dan sekarang kamu lihat, aku masih bersholat dan berTuhan yang sama seperti kamu.” “Saya hanya mengingatkan kamu sebagai sesama Muslim, apakah salah?” “Tidak salah, yang salah adalah bahwa kamu telah berlaku seolah-olah menjadi Tuhan. Sehingga kamu berhak menuduh setiap orang, kafir”.

“Rif, buka wawasanmu. Pandanglah lebih luas. Di berbagai belahan dunia umat Muslim ditindas. Kita harus bersatu, jika kelak gerakan itu sampai kesini.” “Setiap daerah memiliki setiap permasalahan yang berbeda, tidak dapat kamu samakan. Dan saya masih melihat toleransi masih relevan di kota ini.” “Kamu seorang yang pesimis, karena berada di tengah-tengah. Sama saja dengan orang yang tidak punya pilihan, tidak punya pegangan,” kata Nurdin.

Sebelum aku sempat menjawab, Nurdin telah mengucapkan salam. Aku memandangnya sampai bayangannya hilang ditelan malam. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kami, sebab setelah ini dia telah memutuskan aku bukan bagian barisannya.

Permasalahan toleransi beragama di kota kami semakin meruncing dan mendekati puncaknya tatkala sebuah truk tempatku bekerja yang membawa minyak solar untuk kebutuhan pabrik meledak di depan masjid. Walaupun, tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut, tetapi kaca pada dinding masjid pecah akibat getaran dari ledakkan tersebut. Peristiwa kecelakaan itu, ternyata dapat menjadi sebuah isu yang tidak jelas dari mana asalnya menjadi sebuah peledakan masjid yang didalangi oleh pihak gereja.

Entah dari mana asalnya setelah peristiwa itu, ratusan orang berpakaian putih dan bersurban putih menutup gereja di kota kami dan menutup pabrik tempat kami bekerja.

Beberapa hari kemudian, pihak gereja yang merupakan kelompok minoritas di kota kami, melakukan manuver hukum dengan melaporkan bentuk ketidakadilan ini kepada aparat yang berwenang. Aparat keamanan yang kurang mengerti duduk persoalannya langsung berkesimpulan dan menganggap peristiwa ini sebagai SARA dengan cepat-cepat mengambil tindakan, agar tidak sampai meluas.

Aparat keamanan melakukan tindakan tegas dengan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai provokator. Tindakan aparat keamanan ternyata tidak dapat memadamkan kerusuhan, tindakan penangkapan ternyata memancing reaksi lebih keras dan menimbulkan solidaritas sesama pemeluk agama. Masyarakat di kota kami pada akhirnya terpancing, karena beberapa saudaranya yang tidak tahu menahu peristiwa ini ikut di tangkap aparat keamanan. Gereja dan pabrik tempat aku bekerja di bakar dan kini tinggal debu.

Aku yang sekarang menjadi pengangguran tanpa sebab yang jelas harus bolak-balik ke kantor polisi. Dan pada akhirnya membawaku sebagai tersangka penyebab kerusuhan.

Dalam sidang pengadilan yang dihadiri ribuan orang, namaku dihujat dan dikafirkan. Dalam sidang yang berliku-liku aku dituduh telah sengaja meledakkan masjid dengan menggunakan mobil tangki minyak perusahaan tempatku bekerja. Walaupun aku telah berusaha menjelaskan bahwa peristiwa mobil tangki minyak yang meledak di depan masjid adalah sebuah kecelakaan. Tetapi kelihatanya pengadilan tidak percaya. Kemudian, aku baru

menyadari, bahwa sebuah toleransi beragama membutuhkan tumbal atau kambing hitam. Dan aku sekarang telah menjadi tumbal. Dalam pledoi di depan pengadilan aku berusaha melakukan pembelaan.

“Kerusuhan bernuansa agama yang terjadi bukanlah disebabkan oleh meledaknya mobil tangki minyak di depan masjid, sebab mobil tangki minyak tersebut meledak karena kecelakaan. Penyebab yang utama adalah terkikisnya toleransi kehidupan beragama, sehingga umat beragama menjadi saling curiga. Saya yakin, setelah ini pasti sebuah peristiwa yang tidak disengaja akan meyebabkan kerusuhan muncul kembali. Umat beragama telah menjadi Tuhan dan meletakkan Tuhan di ujung pedang. Padahal Tuhan ada di hati kita, bukan diujung pedang yang siap di tebaskan. Jika atas nama Tuhan kita di benarkan curiga, membakar dan membunuh sesama manusia, ada baiknya kita bakar masjid dan gereja bersama-sama, kita bakar Tuhan kita bersama-sama agar hilang rasa dendam, curiga, dan saling membunuh di antara kita.”

Pengunjung pengadilan terdiam beberapa saat. Sebelum sempat aku melanjutkan pembelaanku, sebuah suara pistol meletus. Terdengar sayup-sayup orang berteriak-teriak dan terdengar pula sayup-sayup suara ketukan palu hakim. Aku limbung, darah menetes dari dadaku dan kemudian aku tidak mendengar apa-apa lagi (*).

D. Tugas

Carilah 1 artikel dari internet yang menunjukkan toleransi umat beragamamu dengan penganut agama lain! Anda belajar hal positif apa dari kisah itu untuk perkembangan spiritual/religiusmu sendiri? Jelaskan!

Kepustakaan:

Antonius Atasokhi Gea dkk (2006). Character Building: Relasi dengan Tuhan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Frederikus Fios dan Antonius Atosokhi Gea (2012). Diktat Kuliah Character Building: Spiritual Development. Jakarta: Binus University-CBDC.

BAB VII

KEMANUSIAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKEADABAN

A. Pendahuluan

Manusia memiliki tempat istimewa atau posisi penting di dalam falsafah Pancasila. Pancasila khususnya di dalam Sila ke-2, sudah memberikan penekanan penting terhadap harkat dan martabat manusia. Sesudah sila ketuhanan, Pancasila mengakui dimensi kemanusiaan sebagai hal penting yang dianggap pantas dijaga, dilindungi dan ditempatkan sebagai hal pokok di dalam kehidupan orang Indonesia dalam menziarahi hidupnya. Dengan demikian kemanusiaan adalah tujuan dan orientasi utama dalam derap pembangunan nasional bangsa. Bahwa setiap pelaksanaan pembangunan bangsa harus memperlakukan manusia sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Manusia sekaligus sebagai subjek dan tujuan akhir pembangunan nasional bangsa Indonesia. Semua pelaksanaan pembangunan harus menjamin kebaikan dan kesejahteraan manusia-manusia Indonesia yang ada di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang luhur sesuai dengan hakikatnya sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

Sila ke-2 Pancasila mengkristalkan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

- 1) Basis dari relasi sosial antar manusia bukan didasarkan prinsip primordial sektarian.
- 2) Basis relasi sosial adalah kemanusiaan, keadilan dan keberadaban
- 3) Kegiatan pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya berbasiskan kemanusiaan, keadilan dan keberadaban.

B. Hakikat Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luhur dan mulia. Manusia yang mulia ini dilengkapi Tuhan dengan kepemilikan jiwa dan badan. Namun setiap manusia itu unik, khas, berbeda sekaligus otonom. Dalam otonomi itu pun ia bisa berelasi secara bebas dengan entitas yang lain seperti: Tuhan, sesama dan Alam. Semua relasi itu bukan tanpa nilai dan makna. Relasi perlu dihayati dan terikat pada makna dan nilai. Relasi sosial manusia harus dihayati dan berakar di dalam dimensi kemanusiaannya yang tak terpungkiri. Maka hakikat sila kedua Pancasila mengatur hubungan atau relasi manusia dengan sesamanya dalam realitas kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial yang hidup dalam realitas masyarakat, bangsa dan negara.

Ideologi terpenting yang termaktub di dalam sila ke-2 Pancasila berbunyi” Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sesungguhnya berorientasi pada kemanusiaan setiap manusia. Kata beradab sesudah kemanusiaan bermakna bahwa manusia Indonesia harus mengarahkan hidupnya, mengorientasikan sikapnya agar berperilaku secara berbudaya. Budaya adalah segala hasil olah pikir, rasa, cipta dan karsa manusia. Orang yang berperilaku sesuai budaya itu juga artinya ia berperilaku secara beradab. Berperilaku beradab artinya ia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila cocok atau sesuai dengan ideologi filsafat humanisme. Humanisme, sebagaimana diterangkan oleh filsuf eksistensialis Martin Heidegger, adalah refleksi dan usaha agar manusia bertindak manusiawi dan bukan tidak manusiawi, *inhuman*, artinya di luar hakikatnya (Soerjanto: 1994, hal. 28).

Dengan demikian, maka imperatif moralnya adalah setiap orang Indonesia harus hidup seturut sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Hidup berdasarkan Sila ke-2 artinya hidup menurut hakikat, otentisitas, harkat dan martabat manusiawi orang Indonesia sendiri. Orientasi atau cita-cita hidup manusia Indonesia yakni menghayati eksistensi diri secara berkeadaban dan berkeadilan. Hidup yang berkeadaban dan berkeadilan artinya hidup yang menghargai dan menghormati martabat kemanusiaan sesama dan kemanusiaan diri sendiri secara seimbang. Hidup sesuai nilai-nilai budaya bangsa dan nilai keadilan sosial bagi sesama. Keadilan di sini tentu artinya juga kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap sesama yang lain. Keadilan juga mengandaikan penghargaan dan respek pada hak-hak asasi manusia.

Hakikat sila kemanusiaan menuntut kita harus memperlakukan orang lain secara adil dan berbudaya. Artinya kita tidak boleh pernah memperlakukan orang lain sebagai alat atau instrument saja. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain atau sesama sebagai objek semata-mata. Karena hal ini tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan. Memperlakukan orang lain secara semena-mena juga akan dengan sendirinya mengabitkan erosi makna kemanusiaan diri maupun sesama yang sejati: sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang luhur dan mulia.

Para *founding fathers* sadar betul bahwa ketika Indonesia dijajah oleh bangsa kolonial, pada kondisi itulah potret dimensi kemanusiaan orang Indonesia terpecah belah, jadi carut marut dan melorot ke titik nol bahkan titik minus yang dehuman. Karena itu hanya dengan kata “merdeka” melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita bangsa Indonesia menunjukkan sikap kita untuk membela martabat kita sebagai manusia. Saat dijajah, martabat kemanusiaan kita diinjak-injak sampai ke titik nadir memprihatinkan. Saat dijajah kemanusiaan kita direndahkan sama seperti binatang atau barang amoral lain. Karena itu kita generasi zaman ini perlu berjuang untuk terus menegakkan nilai kemanusiaan sampai kapanpun selama kita masih ada sebagai bangsa Indonesia. Dan rumusan sila kedua Pancasila sudah menjamin hal itu.

C. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Bagaimana seharusnya kita orang Indonesia mengamalkan nilai-nilai luhur di dalam Sila Ke-2 Pancasila? Kita mengamalkan Pancasila dalam hidup sehari-hari dengan cara bagaimana? Hidup berperikemanusiaan itu hidup yang bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Pertanyaan ini akan dijawab secara negatif (*via negativa*). Hidup berkemanusiaan adalah

hidup yang bukan begini, bukan begitu. Jawaban negatif “*bukan*” adalah langkah metodis yang berguna untuk menentukan jawaban positif, yakni hidup berkemanusiaan adalah hidup yang:¹⁰

- Bukan materialisme

Manusia menurut, materialisme tidak berbeda dengan objek-objek lainnya. Subjektivisme manusia itu tidak masuk akal. Kepribadian manusia itu nonsense, karena pada dasarnya yang menentukan segala-galanya adalah benda. Masalah ini akan menjadi sangat serius, kalau kita meninjau salah satu bentuk materialism yaitu teknokratisme atau scientisme, yang hakikatnya sama yakni pengagungan dan pendewaan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan alam. Filsafat modern telah mampu menunjukkan akibat fatal pandangan ini bagi hidup berperikemanusiaan.

Erich From mengatakan, dalam masyarakat modern, manusia telah terasing, “teralienasikan” dari dirinya sendiri. Manusia tidak bebas, karena harus tunduk pada irama kehidupan teknologis. Manusia diterima tidak sebagai manusia lagi, melainkan sebagai fungsi atau sebagai nomor, sebuah objek non-personal.

- Bukan Pragmatisme

Kriteria tindakan manusia menurut pragmatisme adalah kemanfaatan dan kegunaan. Pandangan pragmatisme sangat utilitarian sifatnya. Baik atau buruk ditentukan oleh nilai manfaatnya. Pandangan ini kalau ditarik lebih jauh, akan bermuara pada tindakan-tindakan yang inhuman (tidak manusiawi). Baik dan buruk tidak ditentukan secara objektif lagi. Pancasila jelas tidak menganut ideology pragmatisme. Ini tidak berarti Pancasila menentang tindakan-tindakan pragmatis dalam kehidupan bernegara. Yang ditentang adalah ideologinya. Pancasila mengakui manusia persona yang bernilai pada dirinya sendiri (*in se*), dan tidak boleh direduksikan ke bawah kriteria manfaat dan kegunaan.

- Bukan Spiritualisme

Filsafat modern mengenal paham spiritualisme. Menurut, realitas seluruhnya adalah perwujudan Roh, yang menampakkan diri secara terus menerus. Menurut Friedrich Hegel, Roh itu adalah Roh Alam Semesta, dan Roh itu bersifat absolut. Pandangannya bersifat serba rohani.

Paham tersebut ternyata telah dipakai untuk membenarkan tindakan otoriter dan tidak demokratis dari penguasa. Pembenaannya adalah bahwa tindakan-tindakan penguasa yang mengekang kebebasan dan membawa penderitaan harus dimengerti dan dipahami sebagai tindakan Roh, yang sedang mewujudkan diri di dalam realitas.

Pancasila bukan spiritualisme. Spiritualisme akhirnya bermuara pada tindakan-tindakan yang otoriter, mengekang kebebasan. Itu artinya sudah tidak manusiawi lagi. Pancasila beranggapan, manusia adalah rohani dan jasmani. Manusia adalah *esprit-incarne*. Setiap pribadi adalah persona yang rohani-jasmani sifatnya, maka itu tidak boleh direduksi pada paham spiritualisme saja.

Selain itu, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan dengan menghayati sikap-sikap luhur di bawah ini:

- 1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
- 2). Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya
- 3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
- 4). Mengembangkan sikap tengang rasa dan *tepa-selira*.

¹⁰ Soerjanto Poespowardojo (1994). Filsafat Pancasila. Jakarta, Gramedia: hal. 28-29.

- 5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
- 6). Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- 7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- 8). Berani membela kebenaran dan keadilan
- 9). Merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
- 10). Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

D. Imperatif Moral Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Imperatif Moral Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengharuskan kita untuk wajib menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup kita. Sila ke-2 Pancasila memerintah semua orang Indonesia untuk memperlakukan dirinya dan sesama manusia yang lain secara bermartabat dan manusiawi. Itu artinya segala tindakan yang merendahkan, melecehkan dan mengorbankan harkat dan martabat manusia patut dihindarkan dalam hidup konkret setiap hari.

Imperatif moral Sila kedua bisa dirumuskan dalam formulasi lain: “perlakukanlah kemanusiaan orang lain seperti Anda memperlakukan kemanusiaan dirimu sendiri!”. Ini artinya setiap orang Indonesia harus memperlakukan sesama atau orang lain sama seperti diri sendiri. Perlakuan yang sama pada orang lain mengandaikan adanya sikap dan paradigma pemahaman yang baik akan kesetaraan martabat setiap manusia sebagai subjek pada dirinya sendiri.

Secara praktis-aplikatif, imperatif etis sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat disarikan dalam empat (4) pokok pikiran sebagai berikut:

- a). Relasi etis antarmanusia
- b). Mengedepankan prinsip sikap baik pada sesama
- c). Prinsip hormat pada diri sendiri
- d). Berbagi dengan orang lain yang menderita kesulitan/kemalangan

E. Penutup

Sila ke-2 Pancasila secara eksplisit telah menunjukkan suatu perintah moral, pedoman etis bagi manusia dalam memperlakukan kemanusiaan diri dan orang lain dalam seluruh dinamika hidup sosial, budaya, politik dan ekonomi. Tujuan sila ke-2 Pancasila yakni membawa manusia pada kondisi-kondisi etis (baik) sebagai makhluk individu, makhluk Tuhan dan makhluk sosial dalam hidup berbangsa dan bernegara. Manusia yang berkemanusiaan dan berkeadilan adalah manusia yang berbudi luhur, dewasa dan matang dalam tindakannya, berlaku adil pada sesama, menghargai orang lain, berlaku sopan pada sesama dan alam dalam relasi sosialnya.

Manusia harus berlaku etis dan adil terhadap sesama manusia karena sesama adalah pribadi unik dan harus diperlakukan juga berdasarkan martabatnya yang bernilai intrinsik pada dirinya sendiri. Singkatnya, segala perbuatan yang mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi sesama manusia wajib ditolak secara tegas. Tindakan yang membawa kerugian pada sesama manusia merupakan tindakan yang tidak adil, tidak baik dan tidak bermartabat!

F. Tugas

Carilah 1 kasus dari internet terkait hubungan antarmanusia yang bertentangan dengan Sila ke-2 Pancasila! Bagaimana sebaiknya perlakuan yang pantas terhadap sesama manusia lain dalam konteks semangat Pancasila? Jelaskan!

Kepustakaan:

Bahan Penataran P-4, PANCASILA/P-4; Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, (BP-7) Pusat, 1994.

Franz Magnis-Suseno (1987). Etika Dasar, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius .

Kansil, C.S.T., S.H.Drs.Prof. (1998), Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Soerjanto Poespowardojo (1994). Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

TOPIK VIII

HAK-HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Problem seputar hak asasi manusia (HAM) selalu terjadi sepanjang hidup manusia. Sejak zaman feodal, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, pasca-kemerdekaan hinggg sekarang. Sejarah kehidupan manusia ditandai dengan adanya berbagai kisah tragis yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, masyarakat negeri ini pernah mengalami masa-masa suram terlebih di zaman Orde Baru di mana banyak terjadi masalah pelanggaran atas hak asasi manusia. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa tragedy kemanusiaan di tahun 1965 di mana jutaan orang Indonesia disiksa, dibunuh dan dibuang ke tempat pengasingan (Pulau Buru) tanpa proses pengadilan yang mereka alami. Banyak peristiwa di seantero tanah air ini pernah terjadi yang memakan banyak korban nyawa manusia. Terakhir kasus semanggi dan Trisakti 1998, di mana banyak mahasiswa/i dibantai secara sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak menghargai hak asasi manusia. Di masa sekarang ini pun sering kali banyak orang disiksa, dilukai secara fisik maupun teror psikologis yang menghancurkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Dari sekian banyak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), paling banyak korban dialami oleh kaum perempuan yang lemah dan anak-anak kecil yang tak berdosa. Banyak orang miskin juga yang sering menjadi korban penggusuran akibat tindakan otoriter penguasa. Tak terkecuali terjadi banyak perbudakan manusia di negeri ini. Banyak orang yang bekerja sering kali disiksa secara kejam oleh majikan yang tidak punya hati nurani. Semua fenomena di atas sudah terjadi, sedang terjadi bahkan akan terus berpotensi terjadi terjadi di bumi pertiwi Indonesia ini.

Sebagai orang-orang terdidik dan terpelajar, akademisi dan mahasiswa di lingkup perguruan tinggi terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam derap kehidupannya. Namun untuk sampai ke titik itu, kita perlu memiliki pemahaman yang baik akan hak-hak asasi yang ada pada diri kita sendiri sebagai manusia. Pemahaman yang baik itu akan memberanikan kita untuk berkomitmen membela dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang sering kali ditindas, dikebiri, dibonsai dan dipasung oleh penguasa politik maupun penguasa ekonomi yang sering kali bersikap arogan dan otoriter melanggar hak-hak asasi manusia.

Di dalam topik ini akan dipaparkan pengertian (konsep) hak asasi manusia, perkembangan perlindungan Hak asasi manusia, hakikat hak-hak manusia, isu-isu aktual tentang HAM, dan akhirnya ditutup dengan sebuah kesimpulan.

B. Pengertian HAM

Apa sesungguhnya hak-hak asasi manusia itu? Banyak pemahaman dan konsep tentang HAM itu. Namun kiranya kita sepakat bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah kumpulan sejumlah hak-hak yang melekat erat (*inheren*) di dalam diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia ini. Hak-hak itu merupakan hak-hak dasar yang menempel pada setiap manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara, melainkan didapatkannya berdasarkan martabat asasinya sebagai manusia. Hak-hak itu diperoleh bukan karena hadiah, melainkan karena hakikat diri sebagai manusia. Bahkan setiap manusia, sejak ia sudah ada di rahim sang ibu, manusia itu sudah memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan oleh otoritas negara sekalipun.

Karena hak-hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi diterima karena kondisi kemanusiaannya sebagai manusia, maka kekuasaan negara sekalipun tidak dapat meniadakannya. Hak-hak asasi manusia itu bersifat umum, public, universal. Artinya hak-hak itu dimiliki oleh semua orang di bumi ini, berlaku di mana-mana, kapan saja dan terhadap siapa saja. Hak-hak asasi itu misalnya hak hidup, hak untuk bekerja, hak untuk mengenyam pendidikan, hak untuk berpolitik, hak untuk menikah atau membangun mahligai rumah tangga dan sebagainya.

Setiap usaha dan konseptualisasi hak asasi manusia bisa dikonstruksi oleh bangsa manapun dan dalam konteks budaya apapun itu. Kendatipun konsepnya berbeda, namun satu hal yang pasti bahwa esensinya tetap universal yang menjangkau setiap kebudayaan manusia bangsa manapun termasuk kita di Indonesia ini.

C. Perkembangan Perlindungan HAM

Betapa pentingnya hak-hak asasi manusia itu bagi setiap orang, sehingga mendorong berbagai pihak untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia itu. Sejarah dunia mencatat beberapa tahapan perkembangan HAM di antaranya:

- 1) Magna Carta Tahun 1215: Kebebasan yang direbut oleh bangsawan Inggris dari genggaman raja Inggris
- 2) *Bill of Rights* di Inggris tahun 1689: Hak dan kebebasan warga negara
- 3) Revolusi Prancis pada tahun 1789
- 4) Deklarasi Universal HAM (1948)
- 5) Konvensi Internasional Hak Sipil, Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)

Tonggak sejarah terpenting dalam perjuangan melindungi hak-hak asasi manusia tampak dalam komitmen bersama negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk melindungi hak asasi manusia. Maka pada 10 Desember 1948 di Paris, para anggota PBB mendeklarasikan sebuah piagam HAM yang berlaku universal. Hak-hak di dalam piagam itu dapat dikategorikan ke dalam dua (2) kelompok yakni: hak-hak sipil dan politik; dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya:

1). Hak-hak sipil dan politik

Hak-hak ini berkaitan erat dengan relasi warga negara dan pemerintahan, serta jaminan perlindungan agar setiap warga negara mendapatkan kebebasan/kemerdekaan. Hak-hak ini terdiri dari: hak atas hidup, hak kebebasan berpikir dan hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati nurani dan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat; hak atas kesamaan di depan hukum dan perlindungan hukum di pengadilan, hak politik atau partisipasi dalam pemerintahan dll.

2). Hak-Hak ekonomi, sosial dan budaya

Sementara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lebih menyangkut hidup kemasyarakatan yang menjamin setiap orang agar kebebasannya dilindungi. Hak-hak itu meliputi hak mendirikan keluarga dan kerja, hak pendidikan, hak tingkat kehidupan yang layak, hak jaminan waktu sakit dan hari tua dst.

Sejalan dengan masuknya Indonesia ke dalam anggota PBB, Indonesia pun wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Rumusan HAM di Indonesia bukan hanya untuk tunduk pada keputusan PBB, melainkan sebagai salah satu sarat negara hukum. HAM dijadikan sebagai indikator tingkat peradaban, tingkat kemajuan demokrasi, dan tingkat kesejahteraan negara Indonesia. Masuknya HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu kemajuan besar bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang sebagai negara modern dalam kancah dunia global.

D. Hakikat Hak-Hak Asasi di Indonesia

Dalam konteks hakikat hak-hak asasi manusia di Indonesia, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Maka dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal dalam Pembukaan (Perubahan) UUD 1945, yakni pasal 28 I dan pasal 28J.¹¹

Pasal 28I berbunyi: *1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 28J: *1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

I

Maknanya adalah bahwa pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sementara itu pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta permohonan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

¹¹ Sekretariat Jenderal MPR RI (2012). Buku Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekjen MPRI, hal.178-179.

Dengan demikian, maka hakikat hak-hak asasi di Indonesia yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yakni¹²:

- 1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan (Pasal 28A)
- 2) HAM berkaitan dengan keluarga (pasal 28B)
- 3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 28C)
- 4) HAM berkaitan dengan pekerjaan (pasal 28D)
- 5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat (pasal 28E)
- 6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi (pasal 28F)
- 7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (pasal 28G)
- 8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial pasal 28H)
- 9) HAM berkaitan dengan persamaan keadilan (pasal 28I)
- 10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain (pasal 28J)

D. Isu-Isu Aktual tentang HAM

Isu-isu aktual tentang HAM tidak pernah luput dari pengalaman hidup kita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, beberapa isu aktual-relevan HAM terdiri dari empat (4) isu utama, yakni: korupsi, kekerasan atas dasar unsur-unsur primordial seperti latar belakang agama, ras, etnis, dstnya; isu kemiskinan/pengangguran dan diskriminasi dalam berbagai bentuk kehidupan manusia. Isu-isu ini tentu sangat memprihatinkan kita di Indonesia ini. Dari semuanya itu, isu korupsi merupakan virus yang saat ini menghasilkan “borok busuk” yang sedang menebarkan aroma tak sedap dari tubuh bangsa ini. Mampukah Pancasila menyembuhkan borok akut ini? Bisa. Tentu dengan upaya edukasi dan penanaman nilai moral.

Khusus dalam konteks korupsi, Pancasila dapat dijadikan sebagai instrument/metode kerja untuk melawan korupsi yang sangat marak bahkan telah menjadi masalah patologis di Indonesia dewasa ini. Bagaimana Pancasila bisa diaplikasikan dalam konteks korupsi ini? Berikut penjelasan alur argumentasinya:¹³

Korupsi secara harafiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23). Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara/pendekatan eksternal maupun internal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan ‘memaksa’ orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan mengeliminir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seseorang enggan untuk melakukan korupsi.

Adapun kekuatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah.

¹² Op.cit., Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, hal. 181-182.

¹³ Baca selengkapnya di Buku Modul Pendidikan Pancasila 2013, hal. 106-109.

Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Di perguruan tinggi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya Pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi.

Perbuatan korupsi terjadi juga karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Kebahagiaan material dianggap segala-galanya disbanding kebahagiaan spiritual yang lebih agung, mendalam dan jangka panjang. Keinginan mendapatkan kekayaan dan kedudukan secara cepat menjadikannya nilai-nilai agama dikesampingkan. Kesadaran manusia akan nilai ketuhanan ini, secara eksistensial akan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Hal ini dapat dijelaskan melalui hirarki eksistensial manusia, yaitu dari tingkatan yang paling rendah, penghambaan terhadap harta (hal yang bersifat material), lebih tinggi lagi adalah penghambaan terhadap manusia, dan yang paling tinggi adalah penghambaan pada Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna tentu tidak akan merendahkan dirinya diperhamba oleh harta, namun akan menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Buah dari pemahaman dan penghayatan nilai ketuhanan ini adalah kerelaan untuk diatur Tuhan, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang-Nya.

Penanaman satu nilai Pancasila tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa maksimal dalam hasil. Terdapat kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan sila yang satu satu dengan yang lain. Dengan demikian, akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dijadikan landasan moral dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Penanaman nilai-nilai Pancasila melawan korupsi paling efektif adalah melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah/perguruan tinggi dan nonformal di masyarakat. Peran media massa juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi-misi mendidik bangsa dan membangun karakter manusia yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

E. Penutup

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah cukup maksimal dirumuskan pada tataran normatif-konstitusional. Namun semua norma yang mengatur hak-hak asasi itu sering kali hanyalah rumusan-rumusan indah memesona yang jauh dari penghayatan praksis nyata keseharian. Maka dari itu dibutuhkan sikap asertif (saling menerima dan menghargai hak masing-masing), aktif menghormati hak asasi satu sama lain, dan penggunaan kebebasan yang tidak merugikan hak asasi orang lain. Setiap usaha pembangunan tidak boleh hanya mendatangkan kebaikan/kenikamatan bagi individual/kelompok tertentu saja, tetapi harus mendatangkan kenikmatan objektif bagi seluruh manusia Indonesia dari latar belakang agama, suku, ras, etnis, daerah apapun di wilayah Nusantara indah ini.

F. Tugas

Coba carilah 1 kasus di internet tentang pelanggaran atas Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Lalu langkah apa saja yang perlu diambil untuk melindungi dan menjaga Hak-Hak Asasi pihak-pihak yang dilanggar itu? Jelaskan dan contohkan konkret!

Kepustakaan:

Frans Ceunfin (editor) (2004). Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik (jilid 1). Maumere: Penerbit Ledalero.

Materi Ajar Kuliah Pendidikan Pancasila (2013). Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Jakarta: Dirjen Dikti.

Sekretariat Jenderal MPR RI (2012). Buku Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekjen MPR RI.

BAB IX

MULTIKULTURALISME

A. Dari Monisme dan Pluralisme menuju Multikulturalisme

1. Pandangan Monisme dan Monokultural

Manusia tidak pernah ditakdirkan untuk sama, tetapi kita hanya ditakdirkan untuk berbeda. Realitas hidup umat manusia tampil dalam wajah multidimensi atau beraneka ragam. Terdapat perbedaan-perbedaan mendasar identitas manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Perbedaan-perbedaan ini pada awalnya menjadi fakta kajian dan menimbulkan debat filosofis-historis dalam kurun waktu yang panjang. Terdapat aliran pemikiran yang coba memberikan penilaian kritis atas realitas perbedaan manusia yang ada di kolong langit ini. Aliran pemikiran paling purba (awal) merepresentasi dalam pemikiran monisme moral.

Monisme moral mengklaim bahwa hanya ada satu jalan hidup yang sungguh manusiawi, paling benar dan paling baik dan yang lainnya tidak utuh (**Parekh: 2008, hal. 33**). Artinya hanya ada satu nilai tertinggi dalam hidup manusia dan nilai-nilai lain hanyalah sebagai instrument atau sarana saja bagi manusia untuk mencapai nilai tunggal itu. Monisme mengklaim bahwa nilai kebenaran misalnya harus bersifat tunggal/singular. Bagi kaum monisme, kejahatan, seperti kesalahan bisa terjadi dalam berbagai bentuknya, namun yang baik seperti kebenaran, pada dasarnya bersifat tunggal atau seragam menurut kodratnya (**Parekh: 2008, hal. 33**). Setiap budaya manusia bisa berbeda dalam menghayati nilai kebaikan/kebenaran itu, namun toh sama-sama menjunjung tinggi satu moralitas yang sama. Moralitas yang sama itu tampil dalam hal dimensi kemanusiaan, struktur alam dunia, dan ide tentang Tuhan yang menyatukan umat manusia dari latar belakang budaya apapun.

Untuk meneguhkan pandangan mereka, penganut monisme menunjukkan asumsi-asumsi penting sebagai dasar argumentasi klaim mereka. Kaum monisme merumuskan klaim-klaim asuntif (**Parekh: 2008, hal. 35-36**) sebagai berikut:

- a). Keseragaman kodrati semua manusia kendatipun terkotak-kotak oleh ruang dan waktu, sama-sama memiliki kapasitas unik, motivasi dan cita-cita hidup.
- b). Terdapat keunggulan moral dan ontologis akan kesamaan atas perbedaan yang ada.
- c). Menegaskan karakter manusia yang transendental secara sosial.
- d). Terdapat ilmu pengetahuan total/mutlak tentang sifat manusia
- e). Kodrat manusia sebagai dasar hidup baik menegaskan kesatuan kebaikan dan kebenaran

Bentuk paling riil monisme tampak dalam dua (2) aliran besar yakni: naturalisme dan kulturalisme. Naturalisme menekankan kesetaraan subjek manusia pada segala lapisan budaya masyarakat. Artinya, manusia secara natural sama saja, di mana saja ia berada di bumi ini. Menurut Parekh (2008, hal. 158), naturalisme paling kukuh berdiri di atas argumentasi dasar bahwa manusia pada hakikatnya sama dalam seluruh masyarakat, perbedaan-perbedaan mereka dangkal dan tidak penting secara moral. Klaim naturalisme ini lalu melecut reaksi dari aliran kulturalisme. Kulturalisme menegaskan manusia tidak sama secara individual, tetapi harus sama secara kultural. Kulturalisme mengkonstruksi kesamaan-kesamaan universal yang *de facto* terdapat pada semua budaya di bumi. Sisi lain kulturalisme yaitu dirancangnya titik-titik temu bersama secara kultural yang diangkat dan diresmikan menjadi hukum budaya misalnya persatuan atau keikaan dalam kebanggaan nasional; namun soal yang langsung muncul adalah bersumber pada agama atau identitas kultural mana: mayoritas atau yang paling memberi kontribusi dalam sejarah bernegara (Sutrisno: 2011, hal 151). Rancangan universalitas budaya seperti ini akan membentuk model budaya yang homogen. Muncullah istilah *monokulturalisme* yang mengidealkan keseragaman, penyatuan dan kesatuan budaya-budaya bangsa manusia. Monokulturalisme ekuivalen dengan homogenitas. Homogenitas jelas anti heterogenitas! Di sini kita melihat bahwa naturalisme dan kulturalisme sama-sama terjebak dalam *mainstream* (arus utama) klaim yang ekstrem, parsial, dan saling mempersalahkan. Keduanya sama-sama mendukung pandangan monisme moral. Padahal monisme moral memiliki kekurangan fundamental dalam memposisikan manusia sebagai makhluk berbudaya dalam keanekaragaman. Monisme moral memiliki cacat dalam dirinya karena memandang perbedaan sebagai sebuah penyimpangan atau suatu patologi moral (Parekh: 2008, hal.75). Semua manusia harus sama saja! Perspektif ini tidak ideal, kurang lengkap dan parsial. Di titik inilah kita memerlukan paradigma alternatif untuk mengatasi persoalan monisme moral ini. Maka dibutuhkan suatu paradigma alternatif *fair*-holistik mengenai keanekaragaman moral dan kultural sebagai kerangka teoretik lebih memuaskan tentang “manusia dan kebudayaan” (Fios: 2013). Bagian berikut ini akan dibahas pandangan tentang pluralisme budaya.

2. Pandangan tentang Pluralisme

Kita sudah melihat pandangan monisme-monokultural pada bagian sebelumnya yang dianggap memiliki kelemahan atau cacat dalam memandang kebudayaan dalam konteks keanekaragaman budaya. Aliran yang mengkritik pandangan monokultur-monistik tampil dalam filosofi pluralisme budaya.

Pluralisme budaya memiliki pandangan bahwa realitas sosial manusia pada dasarnya merupakan suatu keragaman atau pluralistik. Di sini akan dikemukakan tiga (3) pemikir utama yakni Vico, Montesquieu dan Herder yang meletakkan dasar filosofis penting terkait idealisme pluralisme atau keanekaragaman budaya umat manusia yang sedikit lebih maju cara berpikirnya daripada klaim-klaim monisme.

Vico adalah orang yang pertama kali menggunakan pandangan historis mengenai manusia dan menekankan keunikan dari setiap masyarakat (Parekh: 2008, hal. 77). Menurut Vico, faktor geografis, sejarah dan refleksi diri, organisasi masyarakat berbeda memungkinkan setiap masyarakat tidak seragam, melainkan berdiri di atas prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Setiap masyarakat mengembangkan kemampuan diri, menciptakan kebutuhan dan menggagas cita-cita (tujuan hidup) sendiri, dan mengembangkan keyakinan serta filosofi masing-masing dengan cara yang unik-khas. Setiap masyarakat mengekspresikan pikiran dan menghayati bentuk/cara hidup yang berbeda satu sama lain. Fenomena ini menentukan kompleksitas setiap masyarakat dan kebudayaannya manusia. Karena masyarakat sangat berbeda, Vico berpendapat bahwa memahami masyarakat merupakan aktivitas yang sangat kompleks (Parekh: 2008, hal. 78). Tiap masyarakat memiliki rasionalitas internal sendiri, yang sering kali berbeda dari rasionalitas eksternal penilaian orang lain dari luar. Akal budi biasanya hanya memperhatikan hal-hal yang universal dari setiap budaya,

sehingga terkadang mengabaikan dimensi kekhususan dan spesifikasinya. Karena itu tindakan memahami/menilai budaya lain, patut diklaim sebagai suatu sesat pikir budaya. Kendatipun demikian, Vico merekomendasikan suatu humanisme-rasional yang dikembangkan untuk menilai agama, masyarakat, etnis dan epos sejarah bangsa manusia yang berbeda. Vico mengakui keanekaragaman kultural dan meyakini setiap masyarakat mengusahakan perkembangan budaya masing-masing ke arah yang diidealkan mereka.

Montesquieu juga sangat sensitif akan persoalan keanekaragaman kultural seperti Vico, namun memiliki pandangan agak berbeda. Montesquieu tertarik pada kategori masyarakat Eropa dan Non Eropa. Bagi Montesquieu, keanekaragaman kultural adalah sifat kehidupan manusia yang berkembang perlahan-lahan dan mutlak (**Parekh: 2008, hal. 84**). Mustahil kita menemukan dua (2) masyarakat yang persis sama di bumi ini. Tiap masyarakat mempunyai adat-istiadat, praktik, sistem hukum, struktur keluarga, bentuk pemerintahan yang mendorong keinginan, tindakan/sikap dan cita-cita moral berbeda satu sama lain. Kendatipun masyarakat memiliki sistem hukum adat maupun tradisi yang sama, pengaruhnya pada setiap individu pun berbeda-beda. Setiap bangsa manusia memiliki kapasitas rasional untuk berkembang ke tingkat kemajuan yang lebih baik dan lebih tinggi dalam hal peradabannya.

Bagi Herder, setiap kebudayaan secara unik dihubungkan dengan pengalaman sebuah kelompok masyarakat (*volk*), nenek moyang dan keturunan historisnya, dan mengungkapkan cara di mana para anggota kelompok masyarakat tersebut memahami dan secara imajinatif menafsirkan pengalaman-pengalaman (**Parekh: 2008, hal. 98**). Faktor lingkungan alam berperan sangat sentral dalam pembentukan budaya setiap masyarakat. Alam telah membuat setiap manusia dan budaya ada secara berbeda. Dimensi akal budi manusia memungkinkan setiap manusia melakukan kreativitas-inovatif dalam alam untuk mengembangkan dirinya. Tiap kebudayaan memiliki identitas tunggal, bagus, tak dapat dipahami, identitas yang tidak dapat dihilangkan, melekatkan visi berbeda tentang kehidupan manusia, merealisasikan kapasitas manusia yang berbeda, menanamkan kebaikan dan perilaku yang berbeda, dan memiliki keunikan 'inti kebahagiaan', spirit, etos dan atmosfer berbeda (**Parekh: 2008, hal 98**). Setiap komunitas budaya memiliki bahasa/verbalisme masing-masing yang digunakan dalam cara berkomunikasi. Tiap manusia bertumbuh utuh dalam kemanusiaan di dalam budaya. Di luar budaya, manusia pincang dalam pertumbuhannya! Bagi Herder, pengaruh budaya meresap ke dalam cara pikir, perasaan dan penilaian, makanan, pakaian, gerak secara fisik, cara berbicara, cara mengendalikan diri atau sosial, kesenangan, sakit, cita-cita, mimpi, imajinasi, kepekaan estetika dan moral. Sebuah bangsa, menurut Herder, adalah 'keluarga besar' yang merepresentasi sebuah bahasa, budaya, masyarakat dan 'sebuah karakter nasional' dan berpeluang untuk menghilangkan kesatuan internal budaya masing-masing karena tujuan akhir yakni membentuk sebuah budaya nasional.

Ketiga pemikir di atas (Vico, Montesquieu dan Herder) sama-sama menunjukkan kritik terhadap monisme moral dan memberikan dasar alternatif bagi munculnya suatu perspektif pluralisme budaya. Ketiga pemikir dimaksud membuka arah baru bagi pandangan relativisme budaya. Pandangan ini mengakomodasi semua manusia dalam berbagai budaya untuk bertumbuh-kembang menuju cita-cita masyarakatnya sendiri yang lebih baik dan lebih tinggi dalam peradabannya.

Kendatipun masih memiliki kelemahan, pemikiran pluralisme ini sudah lebih maju dari monisme dan meletakkan dasar penting bagi konstruksi sebuah multikulturalisme budaya. Kelemahan gagasan ketiga pemikir pluralisme budaya (**Parekh: 2008, hal. 110-112**) di atas dapat dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- Mereka memandang kebudayaan sebagai satu-kesatuan organis dan terintegrasi, dan mengabaikan keanekaragaman serta ketegangan internalnya (*fallacy of holism*).

- Mereka mengasumsikan kebudayaan merupakan unit tersendiri, memiliki jiwa, etos atau prinsip organisasi, dan bisa diindividualisasikan serta dibedakan satu dengan yang lainnya (*fallacy of distinctness*).
- Mereka cenderung memiliki pandangan statis tentang kebudayaan (*positivist, historicist or end of history fallacy*).
- Mereka melihat setiap kebudayaan sebagai ekspresi organis dan unit dari semangat, jiwa, karakter nasional, tingkat perkembangan mental, atau hasrat dan insting terdalam dari masyarakat bersangkutan (*fallacy of ethnicization of culture*).
- Mereka memiliki pandangan yang sangat konservatif terhadap kebudayaan (*fallacy of closure*).
- Ketiganya terutama Herder melihat kebudayaan sebagai sejenis agen kolektif yang bertindak otonom, menguasai, menuntut atau mengekspresikan dirinya sendiri dalam suatu institusi terpercaya & praktik-praktik tertentu, dan mengikuti logika hukum internalnya sendiri (*fallacy of cultural determinism*).
- Mereka memisahkan kebudayaan dari struktur ekonomi dan politik masyarakat yang lebih luas, mengabaikan konsolidasi antar budaya dengan konteks umum (*fallacy of cultural autonomy*).

3. Menuju Multikulturalisme

Karena monisme dan pluralisme belum cukup maksimal dalam mengkonseptualisasikan manusia dan kebudayaan, konstruksi sebuah perspektif berparadigma multikulturalisme menjadi *conditio sine qua non* (mutlak) di atas jagad realitas sosial budaya manusia yang berbeda-beda di muka bumi ini. Pada awalnya multikulturalisme muncul untuk menyikapi para imigran dari negara lain yang masuk ke negara tertentu. Sejak tahun 1960 hingga 1970-an arus gelombang imigran di negara-negara Barat hampir tak bisa terbendung. Ketika para imigran masuk ke suatu negara baru, mereka pun menuntut pengakuan akan identitas budaya mereka di negara baru sebagai wujud aspirasi memperjuangkan hak-haknya. Di sini muncul problem dilematis budaya. Di satu sisi identitas perbedaan budaya tak dapat ditolak secara informal, sementara di sisi lain identitas dimaksud perlu diakui secara formal dalam konteks nasional negara tujuan yang baru. Mau tidak mau setiap individu dituntut untuk bersikap terbuka dan menghargai kenyataan perbedaan budaya yang ada.

Hans George Gadamer pernah mengatakan: *“Wir muessen doch miteinander leben lernen!”*. Terjemahan kata-kata berbahasa Jerman ini kira-kiranya bermakna: “Kita harus belajar hidup bersama”. Gadamer sesungguhnya mendeklarasikan suatu kebenaran mendasar bahwa kita manusia masih harus terus belajar untuk hidup bersama dalam praksis sosial kita. Dan kita mampu untuk melakukan hal itu. Karena manusia mampu mengubah dunia lingkungannya menjadi dunia budaya (Noerhadi: 2013, hal. 9). Kapasitas rasio manusia sebagai *homo rationale* (Aristoteles) mampu menggerakkan setiap manusia untuk mengembangkan diri dan dunianya ke arah yang lebih baik dan berkeadaban.

Penghayatan koeksistensi kita sebagai manusia bukanlah suatu pengalaman yang sudah final, melainkan sebuah ziarah dalam proses menjadi (*becoming*) yang belum tuntas. Perjalanan kita menuju peradaban selalu mengandaikan capaian puncak-puncak sementara saja. Karena kita masih harus terus bergerak maju menuju puncak lain yang sudah membeberkan kepada kita seanebak persoalan baru dalam konteks kebersamaan kita sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial), menyitir istilah filosofisnya Aristoteles. Ziarah dinamika kebudayaan kita seolah-olah merupakan perjalanan menuju *unhorizon limited*, horizon yang tak terbatas.

Kebersamaan kita sebagai makhluk berbudaya dalam konteks Indonesia selalu tak pernah bebas dari masalah. Kebersamaan kita masih mencuatkan seabrek persoalan dalam berbagai ekspresinya: konflik agama, konflik suku, konflik kelompok, konflik golongan dll. Kebersamaan kita bukan tanpa masalah! Namun justru eksistensi kita masih saja menimbulkan masalah itulah, maka multikulturalisme hadir sebagai term yang urgen-relevan bagi wacana diskursif kita akan realitas perbedaan (*diversity*) kita. Kita tidak cukup hanya sampai pada monisme atau pun pluralisme budaya saja. Kita perlu bergerak lebih maju lagi menuju capaian puncak peradaban yang lain. Dari monisme moral dan pluralisme budaya, kita lalu bergerak menuju filosofi multikulturalisme.

Filosofi multikulturalisme merupakan refleksi kritis dalam konteks realitas pluralisme masyarakat kontemporer dalam berbagai dimensinya termasuk ras, etnis, sub-etnis, golongan, agama dll. Multikulturalisme menjadi isu seksi dalam melihat realitas pluralisme kultur di bumi ini. Potensi tantangan hubungan antarkelompok budaya berbeda di dunia tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Diperlukan filosofi multikulturalisme sebagai ‘strategi kebudayaan’ yang masih relevan-urgen diaplikasikan di dunia yang terdiri dari berbagai latar belakang kelompok berbeda ini. Multikulturalisme merujuk pada suatu konstruksi cara pandang (filosofi) yang bertujuan menjelaskan, menjustifikasi, dan mempromosikan diversitas budaya, kesadaran akan perbedaan kultur, dan semangat keterbukaan dalam menghayati identitas perbedaan sosial kita. Sebagai konsekuensinya, multikulturalisme merujuk pada konstruksi filosofi yang mengkristalisasikan nilai, sikap dan perspektif relevan dalam konteks pluralisme budaya. Multikulturalisme perlu dirujuk sebagai ideologi penting yang perlu disosialisasikan secara meluas dalam forum diskusi ilmiah di institusi pendidikan maupun percakapan informal praksis dalam ranah sosial kemasyarakatan. Lebih dari itu multikulturalisme malah harus menjadi ‘strategi kebudayaan’ menyiasati globalisasi/modernisasi melalui penciptaan kebijakan politik (*politics policy*) yang mengakui identitas perbedaan-perbedaan kultur-etnis. Multikulturalisme layak menjadi visi bersama semua kelompok budaya berbeda di dunia kalau mau mewujudkan kondisi kondusif tumbuhnya iklim kedamaian, keselarasan dan keharmonisan yang menenggang realitas diversitas budaya.

B. Hakikat Multikulturalisme

Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran/ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat-kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman ala monisme atau pun penciptaan budaya universal ala pluralisme. Multikulturalisme lebih maju dari monisme dan pluralisme.

Multikulturalisme sudah diuraikan oleh banyak pemikir budaya yang menaruh minat besar pada persoalan manusia sebagai makhluk berbudaya di antaranya Raz dan Will Kymlicka. Kedua tokoh ini dan beberapa tokoh lain sudah membuka ruang wacana penting ke arah munculnya fajar matahari multikulturalisme. Multikulturalisme, ideologi semacam apakah itu?

Yang dimaksud multikulturalisme adalah kajian yang berkembang dekade ini ketika kenyataan pluralisme kebudayaan, agama dan identitas etnik dalam sistem politik demokrasi terbuka tidak mendapatkan ruang ekspresi toleransinya untuk tumbuh unik dan berbeda terutama ketika sistem politik negara hukum dengan ‘*equality before the law*’, menisbikan identitas-identitas unik kultural keragaman (Sutrisno: 2011, hal. 148). Padahal substansi multikulturalisme merujuk pada tatanan ideal di mana individu-individu yang ada bersama dalam realitas masyarakat dengan identitas berbeda bisa saling menerima perbedaan tanpa takut ditolak, apalagi didiskriminasi oleh orang atau kelompok lain.

Walau istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Swedia tahun 1957, Kanada adalah negara pertama yang mengakui multikulturalisme sebagai bagian integral dari identitas nasional dan diadopsi sebagai kebijakan nasional pada tahun 1960 (**International Encyclopedia: 2010, hal. 2979**). Sesudah Kanada baru diikuti beberapa negara lain seperti Australia, New Zealand, Swedia, Inggris dan Belanda. Multikulturalisme dianggap sebagai kebijakan politik (*politic policy*) yang mampu mengatur realitas pluralisme negara-negara yang berbeda dalam aspek ras, etnis, keyakinan spiritual, hak-hak minoritas, orientasi seksual, ledakan arus imigrasi dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Kanada patut dicatat sebagai negara pertama yang memberikan apresiasi positif terhadap multikulturalisme cara pendekatan kebudayaan efektif menyiasati pluralisme sosial. Pendekatan kebudayaan melihat realitas masyarakat dari sudut pandang mentalitas orang, nilai yang diacu individu atau bersama, penyatu nilai bersama yang merekatkan bangsa majemuk dengan keikaan ‘saling hormat’ menghormati, toleransi pada perbedaan serta hak hidup etnik, agama, golongan tanpa saling mendiskriminasi satu sama lain (**Sutrisno: 2011, hal. 137-138**).

Dimensi dasar filosofi multikulturalisme memiliki banyak kristalisasi makna. Masyarakat multikultural dan multikulturalisme merujuk pada suatu masyarakat yang menunjukkan tiga (3) keanekaragaman utama yakni: keanekaragaman subkultural, keanekaragaman perspektif, dan keanekaragaman komunal (**Parekh: 2008, hal. 16-17**). Multikulturalisme merupakan istilah yang mensintesis berbagai realitas perbedaan dalam kebudayaan manusia yang multidimensional. Multikulturalisme merupakan perspektif rasional atau paradigma logis yang digunakan untuk memahami manusia dan gejala kebudayaan yang dihayatinya dalam realitas kebersamaan aku dengan yang lain (*others*). Multikulturalisme menjadi suatu strategi budaya dalam memahami dan mengkonsepkan manusia serta hubungan-hubungan sosial yang dibangun sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya. Multikulturalisme memberikan ruang toleransi seluas-luasnya bagi tumbuh-kembangnya berbagai kebudayaan manusia untuk berproses menjadi jati diri sendiri seperti apa adanya. Multikulturalisme bertoleransi pada perbedaan, mendukung perbedaan, memperjuangkan berbagai kepentingan kelompok dan budaya apa saja termasuk kelompok minoritas dalam berbagai dimensi sosialnya (etnis, ras, agama, politik, budaya, gender dll). Multikulturalisme dalam tataran idealnya mendorong ke arah terbentuknya suatu *politic of recognition* (politik pengakuan) identitas setiap budaya berbeda di dalam *nation state* (negara bangsa).

D. Multikulturalisme di Indonesia

Mencermati hakikat eksistensi-faktual masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dengan berbagai latar belakang primordial yang tumbuh di dalamnya, maka Indonesia sungguh tak mungkin mengadopsi monokulturalisme sebagai perekat hidup kita bersama yang serba beraneka ini. Kita pun tak cukup hanya sampai pada paradigma pluralisme. Sebab pluralisme hanya barulah pada tahap standar bagi sikap penolakan kita akan paradigma monisme-monokultur atau homogenitas dalam hidup berbangsa/bernegara. Kita mau berlangkah lebih jauh, lebih tinggi, lebih lebar dan lebih dalam menuju apa yang disebut multikulturalisme itu. Mengapa multikulturalisme?

Karena di dalam multikulturalisme kita mengakui dan menghormati perbedaan sosial dan unsur-unsur latar budaya kita sebagai suatu rahmat, suatu anugerah, suatu kekayaan, suatu hadiah! Kita tidak melihat atribut identitas perbedaan kita sebagai ancaman atau petaka-katastrofis sosial. Multikulturalisme adalah hadiah Tuhan bagi kita yang mengaku orang Indonesia sebagai satu-satunya *nation state* dengan etnis terbanyak menyebar di seantero ribuan pulau negeri ini.

Indonesia patut diklaim sebagai realitas bangsa yang pluralistik atau heterogen. Dalam kondisi pluralistik inilah setiap kita menenun dan merajut hidup bersama menuju peningkatan kualitas kehidupan lebih baik. Dan jalan terbaik untuk merajut hidup kita ke arah lebih baik itu yakni jalan budaya! Bingkai kebudayaan ditaruh pada kesadaran tiap orang yang selalu berkepentingan untuk merajut hidup yang lebih baik dan mengusahakan jalan kebudayaan sebagai ‘*in leading a good life*’ (**Sutrisno: 2011, hal. 148**). Di jalan budaya itulah kita Indonesia bisa bertahan hidup sebagai *nation state* di planet bumi yang sudah berusia 4 miliaran tahun ini.

Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme karena Indonesia sungguh kaya akan perbedaan. Indonesia berbeda dalam aspek etnis, budaya, agama dan ras. Ini semuanya terjadi karena negeri kita memiliki kondisi geografis, iklim dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Jawa beda dengan Sumatera. Kalimantan beda dengan Sulawesi. Papua beda dengan Jawa. Flores beda dengan Sumatera. Timor beda dengan Bali dst. Semuanya ini memungkinkan suku-etnis di Indonesia berbeda dalam dimensi sosio-budaya (agama/spiritual, adat-tradisi, kebiasaan, pola pikir, pola perilaku dll). Multikulturalisme perlu terus disadari, dihayati dan diperjuangkan dalam praksis hidup harian meng-Indonesia menuju kebaikan bersama sebagai negara bangsa.

E. Relevansi Multikulturalisme untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketika menepohkan realitas *nation state* Indonesia, maka kita tidak mungkin memungkiri kenyataan pluralisme yang ada. Lalu dari pluralisme itu kita perlu berlangkah lebih jauh menuju apa yang disebut multikulturalisme itu. Kalau begitu, persoalannya sekarang adalah apa relevansi term multikulturalisme dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI itu?

Tidak mudah merumuskan relevansi multikulturalisme dalam konteks NKRI kita. Namun bukan berarti tidak mungkin! Mudji Sutrisno (2011: hal. 151-153) menggariskan empat (4) relevansi multikulturalisme untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

Pertama, teks yang sudah dihidupi dalam sejarah bhineka-nya identitas-identitas kultural yang pluralis-majemuk untuk secara dahsyat gemilang dalam momen historis 28 Oktober 1928, menggumpalkan toleransi atas identitas kultural etnik, agamis menjadi identitas bangsa yang satu (*nation*) dalam sumpah Pemoeda dengan ke-ikaan- merupakan bukti kesediaan nilai menghormati generasi '28 untuk berproses menjadi warga bangsa yang pluralis sekaligus "ika" dengan identitas satu bahasa Indonesia namun tetap hidup bahasa-bahasa kedua yaitu suku dan lokal.

Kedua, tatkala warga bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat R.I 17 Agustus 1945, terlihat bukti-bukti dokumen tertulis sejarah bagaimana pendiri bangsa ini mewujudkan tujuan bersama hidup sejahtera (*goodlife*) dalam cita dan visinya dalam mukadimah konstitusi UUD '45 dengan sila-sila perekat bangsa yaitu Pancasila. Karena itu "*we are on the right track*" dalam mewujudkan cita-cita sebagai bangsa dalam bernegara.

Ketiga, komplikasi mulai muncul manakala formalisasi lima (5) agama resmi yang secara hukum diakui di R.I. ternyata 'melupakan' religi "Nusantara" yaitu kepercayaan pada Ketuhanan atau religiositas identitas-identitas kultural etnik, religi-religi lokal. Akibatnya dalam formalisme hukum positif kenegaraan "terasa" timpang manakala yang resmi formal "hanyalah": Islam; Kristen; Katolik dan Kristen Protestan; Hindu; Budha. Dan kesadaran bersama pasca era reformasi menggumpal mencantumkan Konfusianisme sebagai bagian dari formalisme religi itu.

Keempat, konteks relevansi paling menjadi pekerjaan rumah kita adalah kebutuhan perumusan strategi kebudayaan dari bahasa budaya ke peradaban sampai bahasa politik kebudayaan manakala "banjir" dan arus deras acuan-acuan nilai yang meretak-retakan "*goodlife*" kebersamaan kita menantang dan sudah masuk ke dalam wujud materialisasi; ekonomisasi yang melulu kepentingan untung nomor satu serta politisasi yang menafsirkan kebenaran absolut identitas kelompok sebagai satu-satunya yang paling benar dan tidak toleran lagi pada pluralisme. Pekerjaan rumah kita bersamakah?

Bertitik tolak dari ke-4 relevansi di atas, maka menjadi keharusan mutlak kultural kita sebagai bangsa yang pancasilais untuk merefleksikan lebih lanjut koeksistensi kita bersama dalam realitas pluralisme kita! Kalau kita masih mau komit bersama menjadi bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Indonesia, maka kita perlu kritis, arif dan bijak untuk merefleksikan kenyataan hidup bersama: bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Kita mesti sadar hanya dengan merefleksikan diri kita dengan berbagai identitas budaya yang ada, maka semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai satu entitas ber-Indonesia semakin langgeng di masa-masa yang akan datang. Kalau bukan diri kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi?

F. Tugas

Coba buktikan fakta-fakta kuat yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah Negara yang plural dan beranekaragam! Bagaimana sebaiknya kita menghayati keberadaan (eksistensi) kita dalam kondisi keberagaman ini? Jelaskan dan contohkan!

Kepustakaan

Anton Bakker (2000). *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta: Kanisius.

Bhiku Parekh (2008). *Rethinking Multikulturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.

David Theo Goldberg. *Multiculturalism: A Critical Reader*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell

Frederikus Fios (2013). “Filsafat Multikulturalisme sebagai Strategi Kebudayaan Menyiasati Pluralisme di Indonesia” dalam *Proceeding International Seminar* Kebhinekaan Budaya, Universitas Indonesia: Depok.

Internasional Encyclopedia of Social Science (2010). Detroit: Maxmillan Reference.

Mudji Sutrisno (2011). “Membaca Wajah-Wajah Kebudayaan”, Jakarta: Warna Widya Jati.

Mudji Sutrisno (2013). “Peta-Peta Multikulturalisme dan Relevansinya untuk RI”. Depok: Materi Kuliah Filsafat dan Multikulturalisme pada Program Pasca Sarjana Filsafat, Universitas Indonesia.

Toety Heraty Noerhadi (2013). *Aku dalam Budaya: Telaah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Will Kymlicka (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford: University Press.

BAB X

INTERAKSI ANTARBUDAYA

A. Budaya dan Kebudayaan

Banyak butiran makna yang diorbitkan untuk memberikan definisi tentang budaya dan kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa sansekerta, *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti “budi” atau “akal” (Gea: 2002, hal. 32). Budaya berkorelasi erat dengan hal-hal akal atau dimensi rasionalitas yang *inheren* (melekat erat) pada persona setiap manusia. Berangkat dari makna leksikalitas ini, maka asasinya, budaya berhubungan dengan daya-daya akal budi yang mewujudkan nyata dalam berbagai modifikasi bentuk cipta, rasa dan karsa subjek manusia dalam menghayati eksistensinya.

Orang Inggris menyebut budaya dengan istilah *culture* yang sepadan dengan kata bahasa Indonesia ‘kebudayaan’. Dirunut dari akar katanya, term *culture* ini sebetulnya diturunkan dari kata bahasa Latin *colere*, yang artinya mengelolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani demi memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk *survive*. Dari pengertian inilah kemudian arti *culture* berkembang menjadi “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam”, yang tentunya merupakan wujud-wujud dari kemampuan akal budi yang dimilikinya (Gea: 2002, hal. 32). Budaya patut ditegaskan sebagai hasil interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan alam dengan mengeksplorasi dan mengembangkan kualifikasi akal budi yang ada pada setiap manusia di planet bumi ini.

Budaya merupakan unsur yang sangat hakiki dalam dinamika dan totalitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Budaya mengkristalisasikan endapan nilai dan makna yang sungguh berarti bagi setiap manusia. “Bicara tentang budaya, maka kita harus melihat unsur fundamental dari sebuah budaya, yaitu nilai; nilai dipandang sebagai sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok serta dijadikan acuan tindakan maupun pengarti arah hidup” (Sutrisno: 2011, hal. 45). Di sini budaya dipersepsikan dan diasumsikan sebagai akumulasi sistem nilai yang diyakini, dihayati dan dijadikan sebagai patokan (acuan) dalam sikap atau tindakan praksis hidup manusia sehari-hari.

Bertitik tolak dari makna/konsep dasar budaya di atas, mulailah pengembangan konseptual tentang kebudayaan dilakukan banyak ahli bidang sosial budaya. Beberapa ahli coba memberikan definisi lebih luas tentang kebudayaan. E.B. Tylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Gea: 2002, hal. 33). Sementara Clifford Geertz mengkonseptualisasikan kebudayaan sebagai pola-pola arti yang mewujudkan dalam simbol yang diwariskan, dikomunikasikan, dilestarikan dan dikembangkan secara historis melalui sistem pengetahuan dan sikap terhadap hidup

(Geertz:1973, hal. 89). Konsep kebudayaan Geertz membidik dimensi historisitas kebudayaan sebagai simbol yang terus diproses-wariskan oleh manusia dalam sejarah kehidupan di bumi dari generasi ke generasi.

Dari konsep abstrak-teoretis di atas, definisi kebudayaan coba lebih dikonkretkan lagi dalam hal yang lebih bersifat praktis. Koentjaraningrat (1990) mengkategorikan tiga (3) wujud kebudayaan yang dimiliki oleh manusia, yaitu:

- *Pertama*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya (*abstract*).
- *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*social system*)
- *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*physics culture*)

Kebudayaan dalam aplikasi praktis hidup manusia, umumnya memiliki banyak fungsi dan peranan. Fungsi kebudayaan terutama berkaitan erat dengan pengaturan/pedoman cara hidup manusia sebagai makhluk yang ada dan hadir di tengah masyarakat. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut: melindungi diri terhadap alam dan menguasainya, mengatur hubungan antarmanusia, dan sebagai wadah pengungkapan perasaan (Gea: 2002, hal. 39-42). Kita dapat melihat betapa pentingnya dimensi kebudayaan dalam derap kehidupan manusia. Kebudayaan sangat menentukan harkat dan martabat manusia. Manusia baru disebut menghayati kehidupannya secara bermakna dan bermartabat kalau ia memiliki kebudayaan dan mengekspresikan rasa estetis itu dalam praksis hidupnya. Kebudayaan adalah rahmat/karunia yang tak ternilai harganya bagi kita umat manusia di kolong langit ini. Kebudayaan mampu mengantarkan manusia pada capaian puncak peradaban yang lebih tinggi dari masa ke masa. Asalkan saja manusia sebagai aktor budaya mampu merefleksikan nilai dan mengekspresikannya secara kreatif-inovatif dalam dinamika hidupnya.

B. Interaksi Antar Budaya

Manusia hidup dalam siklus budaya atau lingkaran kultur tertentu yang khas, khusus dan unik. Karena alasan inilah maka muncul *diversity* (keanekaragaman) budaya. Di tengah keanekaragaman inilah manusia saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain. Manusia berkomunikasi menggunakan tanda, lambang atau simbol budaya tertentu yang dimilikinya. Sebagai makhluk komunikatif, manusia memiliki kemampuan transendensi untuk bergerak keluar dari dirinya menuju kepada orang lain atau sesamanya. Dalam ikhtiar menuju subjek yang lain itulah, dimensi komunikasi manusia dengan manusia menjadi suatu fenomena menarik untuk ditelisik. Saat manusia saling berhubungan, terbentuklah suatu jejaring komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini) (Tubbs & Moss: 1996, hal. 236-238). Umumnya komunikasi antarbudaya terealisasi melalui tindakan interaksi antara orang dengan orang dari latar budaya berbeda-beda. *Intercultural communication generally refers to face-to-face interaction among people of diverse culture* (Jandt: 1998, hal. 36). Jadi, komunikasi antarbudaya sejatinya selalu lintas batas atau melampaui daerah *frontiers*.

Manusia setiap waktu terus tergerak untuk bertemu dengan orang lain dari berbagai latar belakang: etnis, agama, aliran keyakinan, golongan, maupun ras yang berbeda. Apalagi akselerasi arus globalisasi teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini melecut pertemuan manusia dengan manusia bahkan bangsa dengan bangsa hanya dalam hitungan detik saja. Kita bahkan bisa

menyaksikan peristiwa di negara lain di saat yang bersamaan. Seremoni pembukaan Piala Dunia sepak bola Brasil 2014 misalnya yang melibatkan atraksi budaya negeri Brasil, bisa kita saksikan secara *Live* (langsung) dari televisi atau *gadget* di tangan kita. Kita, setiap orang tanpa kecuali, dari latar belakang budaya apa saja, tidak dapat bertahan untuk menghindarkan diri dari pertemuan antarbudaya. Setiap komunitas budaya berdiri di tengah komunitas budaya lain dan tak terbantahkan lagi terpengaruh oleh mereka (**Parekh: 2008, hal. 221**). Pertemuan kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lain menciptakan interaksi dan pengaruh timbal-balik satu sama lain. Budaya yang satu bisa mengadopsi hal-hal positif dari budaya lain dan sebaliknya. Bahkan pengaruh itu bisa menimbulkan kekacauan, kemunduran atau bahkan pengaruh negatif di dalam komunitas budaya tertentu.

Sejarah kehidupan manusia di kolong langit ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menutup diri atau mengisolasi diri dari kelompok budaya manusia lain. Sulit untuk menemukan adanya kebudayaan yang selamat tanpa dipengaruhi oleh kebudayaan lain, bahkan yang paling primitif dan terisolasi sekalipun (**Parekh: 2008, hal. 221**). Budaya Athena klasik dipengaruhi Budaya Athena awal yakni negara bagian Mediterania seperti Mesir dan negara Timur lain seperti Persia dan Sparta. Kristianisme adalah produk Yudaisme, praktik kepercayaan Romawi dan sentuhan filsafat Yunani. Islam pun sangat dipengaruhi oleh Yudaisme, kristianisme dan praktik-praktik dunia pra-Islam serta filsafat Aristotelian. Pencapaian kemajuan intelektual dan teknologi modern Barat terkontaminasi juga oleh komunitas budaya Yunani, Romawi, Indian, Cina, dan peradaban masa kolonial. Budaya Asia (Timur) kini banyak dipengaruhi oleh budaya Eropa (Barat) dan sebaliknya. Hingga budaya Indonesia kini pun dipengaruhi oleh budaya negara-negara ASEAN dan negara Asia lainnya seperti Arab, Korea, Cina, dan Malaysia.

Kita tidak bisa mengelakkan realitas pertemuan dan pengaruh antarbudaya lagi di era globalisasi berbagai aspek teknologi, ilmu pengetahuan, komunikasi, politik, sosial, dan ekonomi di era kontemporer kini. Berkat globalisasi, teknologi menjelajah dengan bebas ke seluruh belahan dunia dan membawa prasasti kebudayaannya (**Parekh: 2008, hal. 221**). Globalisasi, modernisasi dan arus migrasi penduduk dari berbagai belahan dunia masuk ke negara lain tak dapat dihindari lagi. Budaya barat bisa tumbuh subur di dunia Timur, dan budaya di Timur pun berpeluang berkembang mekar di taman-taman budaya belahan dunia Barat.

Dalam konteks Indonesia dan ASEAN, frekuensi interaksi negara-negara kawasan Asia Tenggara akan semakin tinggi dan semakin sulit dikendalikan lajunya lagi. Apalagi pada tahun 2015 nanti Indonesia (bersama negara ASEAN lain) mulai menerapkan kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) bersama semua negara di kawasan ASEAN. Siapa saja bisa masuk bebas Indonesia dan sebaliknya untuk berbisnis, bekerja dan berkarya. Tentu pertemuan orang dari berbagai negara ASEAN akan berlangsung lebih cepat bertempo tinggi. Pertemuan orang Indonesia dengan orang negara lain tentu tak dapat menampik adanya fenomena pertemuan antarbudaya, karena subjek manusia yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang budaya berbeda yang terhayati. Pertukaran nilai budaya entah itu ide/pemikiran, cara hidup hingga hal-hal bendawi akan semakin terasa nuansanya dalam ruang-ruang realitas kehidupan dan pengalaman berkebangsaan Indonesia sebagai negara yang hidup dalam kancah percaturan dunia internasional.

Pengaruh positif yang muncul dari interaksi budaya yang terjadi di antaranya menguatnya perasaan nasionalisme dan solidaritas universal sebagai satu keluarga masyarakat dunia internasional. Selain itu budaya yang satu bisa belajar dari kelebihan dan aspek positif dari keunikan budaya yang lain. Bisa juga muncul perasaan bangga atas warisan budaya dunia yang begitu indah, kaya dan beraneka ragam untuk manusia. Budaya yang satu bisa belajar dari budaya lain dan mengambil manfaat-praktis darinya untuk perkembangan dan kebaikan diri. Saling belajar seperti ini bisa mencakup budaya abstrak-idealistis, budaya sistem sosial maupun budaya material-fisik yang dapat diterapkan secara pragmatis-ideologis untuk kemajuan dan kebaikan bersama (*bonum commune*) menuju peradaban yang lebih tinggi.

Pengaruh positif yang lain yakni interaksi budaya dapat menjadi ajang promosi dan sosialisasi kemampuan/kelebihan budaya diri sendiri pada orang lain. Juga dapat tercipta unsur rekreatif yang

mendatangkan kebahagiaan dan hiburan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dimensi akumulasi dan penambahan pengetahuan/pengalaman baru yang unik bagi perkembangan diri masing-masing pun tidak bisa dikatakan tidak mungkin! Lebih dari itu interaksi budaya dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman budaya.

C. Tantangan Interaksi Antar Budaya

Apakah interaksi antarbudaya yang direpresentasi dalam orang-orang dari latar belakang budaya bangsa yang berbeda itu berlangsung mulus tanpa problem? Tentu tidak jawabannya. Sebab subjek-subjek budaya yang saling berinteraksi di dalam proses dinamika budaya memiliki kebebasan dan kristalisasi nilai kultur yang berbeda satu sama lain. Ekspresi nilai budaya dalam aktivitas kegiatan bisnis atau pelaksanaan pembangunan akan berpeluang menciptakan benturan nilai, konflik filosofis dan diskrepansi kebudayaan. Di sinilah persoalan interaksi antarbudaya mencuat keluar.

Tantangan serius interaksi budaya bisa tersembul dalam berbagai multidimensi aspeknya. Dari sisi tilik dimensi psikologis, bisa muncul hambatan perasaan (emosional) seperti kurang percaya diri, *inferior*, kesulitan beradaptasi, kesulitan verbal-linguistik, kesulitan berkomunikasi, kesulitan pemahaman atau pengetahuan dll. Bahkan dalam hal melakukan proyek yang baik dan positif pun sering kali muncul konflik-konflik. Dari sisi aplikasi tentang konsep yang baik (etis) akan suatu hal dalam kegiatan pembangunan boleh jadi mencuatkan hambatan bahkan konflik horizontal maupun vertikal yang fundamental. Dinamika budaya menerapkan nilai-nilai etik, suatu aspirasi pembangunan yang kadang-kadang dapat melibatkan pertentangan nilai (Noerhadi: 2013, hal. 23). Nilai tradisional versus nilai modern, nilai kota (*city*) versus nilai desa/kampung (*village*), nilai profanisme versus nilai religius-spiritual, nilai pengetahuan versus nilai irasionalitas, nilai budaya versus nilai politik dll. Karena nilai-nilai budaya yang dianut oleh tiap subjek budaya dihayati secara berbeda satu dari yang lain. Konflik prinsip dan perbedaan ideologi dapat muncul sebagai persoalan serius *co-esse* (ada bersama) kita dalam realitas sosial.

Tantangan lain yang bersifat personal-individual misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku dan berespon terhadap orang lain tentu berbeda antara orang dari budaya yang satu dengan orang dari budaya yang lain. Perwujudan nilai-nilai dan praktik budaya tak jarang menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, *shock*, dan ketercerabutan dari tradisi budaya menjadi masalah signifikan dalam konteks interaksi antarbudaya. Belum ditambah lagi dengan sikap antipati, rasis, etnosentris, curiga, prasangka, tidak toleran, *negatif thinking*, stereotif negatif, eksklusif dll. Semuanya ini bisa menjadi kesulitan/hambatan psikologis utama dalam konteks interaksi antarbudaya umumnya dan hubungan subjek-subjek pelaku budaya pada khususnya.

Interaksi antarbudaya pasti menimbulkan apa yang dilansir oleh Samuel Huntington dengan istilah *benturan budaya*. Benturan antarbudaya akan menghasilkan fenomena disorientasi budaya, tak terkecuali kita di Indonesia akibat benturan budaya-budaya dalam berbagai aspeknya. Tantangan utama interaksi antarbudaya di Indonesia kini, yakni masalah disorientasi nilai budaya. Mudji Sutrisno (2011: hal. 1008-110) melansir gejala disorientasi nilai budaya yang menyeruak di Indonesia, antara lain:

Pertama, disorientasi nilai mengenai yang benar, apa yang baik dan yang indah berubah radikal dari kekeraban/komunitas yang membatinkan nilai-nilai lewat dongeng, narasi sebelum tidur yang menyentuh secara personal, permainan penuh tawa afektif dan narasi keteladanan pahlawan yang diceritakan para tetua ke cucu atau orang tua ke putra-putrinya dalam budaya agraris akrab hangat menyentuh atau budaya bahari mandiri arungi samudra, sudah “digusur” oleh tradisi lisan kedua yang anonim melalui “presenter” dalam citraan-citraan yang meleburkan bayangan dan

kenyataan; mimpi dan realitas. Akibatnya, kita kehilangan ruang renung, ruang pengolahan batin dan refleksi pendalaman akan makna dan nilai hidup.

Kedua, orientasi hidup berbangsa dan bernegara dengan dasar utama kultural dalam berperikemanusiaan; berkeadilan sosial dalam hubungan sesama; berketuhanan dalam mensyukuri dan memuliakan hidup; berazas bicara bersama saling menghormati untuk mufakat serta berdaulatnya rakyat sebagai tata hidup bersama demokratis dalam menjadi bangsa Indonesia kerap diciderai oleh kekosongan teladan perilaku dan lebih banyak diwacanakan atau dislogankan.

Ketiga, manakala nilai hasil karya kreatif manusia dari nilai intrinsik estetis guna ‘dibendakan’ hanya menjadi nilai tukar uang, maka terjadilah yang oleh Gramsci materialisasi/pembendaan dan Marx pemberhalaan fetisisme serta pengkerdilan/reifikasi atau pereduksian dari yang otentik guna spiritual menjadi sekadar enak dipakai, tak enak dibuang. Di sinilah orang kehilangan kualitas spirit kepedulian akan masalah-masalah sosial karena terjebak pada *mainstream* (arus utama) materialisasi-kuantitatif menyilaukan mata.

Keempat, kebudayaan informasi dan digitalisasi serta media massa elektronika menjadi lebih berkuasa dan menentukan sendi-sendi hidup masyarakat daripada sebelumnya. Guru-guru nilai beringsut dari orang tua di keluarga menuju sekolah lalu ke guru-guru informasi tulis dan “*entertainment*” elektronik serta tayangan-tayangan maya (*virtual*).

Kelima, imaji dan ruang pencecapan dan pengenalannya bergeser antara konstruksi narasi dan sejarah menuju antisejarah dan antinarasi. Maksudnya “yang lampau” dicampur-aduk dengan yang kini, mimpi dan kenyataan diramu dalam ironi dan parodi dengan menampilkan campur baur selera pop eksotisme hari ini yang terus diperpanjang. Akibatnya lagi untuk memancing ingin tahu dan selera serbabaru dibuatlah tayangan dari yang keras, menjadi lebih keras lalu sangat keras dibumbui horor dan masokisme sadis agar terjadi efek suspens kala melihat darah mengucur merah dan deras. Maka publik yang tidak siap menyeleksi nilai akan kebanjiran imaji yang mencampur antara eksotisme dan sadisme hanya untuk menyedot *rating* publik.

Keenam, hidup ekonomi dan sosial dipusatkan pada konsumsi simbol dan gaya hidup lebih daripada kreasi produksi barang untuk kebutuhan sehari-hari menurut yang diperlukan. “*I consume therefore I exist*” menjadi gaya hidup yang dipacu naluri purba yang terus diprovokasi manusia sehingga bukan kebutuhan untuk hidup manusiawi yang jadi patokan, melainkan selera ‘*basic instinc*’ menjadi dasar. Jurang kaya-miskin menganga, apa yang ada di benak orang kecil-miskin melihat etalase-etalase indah tak terbeli sementara kepedulian untuk berbagi dari yang mempunyai makin tipis disedot nafsu konsumerisme.

Ketujuh, bersandingnya produsen barang dagang konsumtif mulai dari makan hingga asesoris gengsi dan gaya hidup dengan produsen makna dan simbol-simbol agama, pendidikan, cerlang budaya yang terus bersaing untuk direngkuh dan dipilih sampai bingung menentukan mana yang pembendaan dan mana yang pembatinan.

Kedelapan, berlangsungnya hibrida klasifikasi kultural keindooan atau mestizo-nya Brasil di mana perayaan karnaval sekaligus merupakan katarsis dan ekstasis sensual, kultural namun juga ekspresi identitas campurnya asal-usul, darah turunan, tradisi budaya dan warna kulit. Terjadi keindooan cinta yang putih sebagai idola; campurnya global dan lokal dalam glocal; antara kuno dan baru; antara modern dan tradisional.

Kita sudah melihat bersama tantangan serius yang muncul dalam konteks interaksi antarbudaya di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan interaksi dimaksud, dibutuhkan langkah strategis dan siasat jitu untuk mengatasi problematika ini. Ada banyak cara yang bisa dijadikan sebagai strategi rujukan untuk mengatasi tantangan interaksi budaya dimaksud. Namun di atas semuanya itu, kita membutuhkan sebuah ruang bagi upaya transformasi mental. Diperlukan sebuah transformasi pola pikir menuju realitas antarbudaya yang lebih ideal lagi. Untuk pendalaman gagasan akan hal ini akan dibahas selengkapnya pada bagian berikutnya.

D. Jalan Kultural Menuju Interaksi Antar Budaya

Langkah awal menyiasati tantangan interaksi budaya yakni adanya jalan-jalan kultural yang terinternalisasi secara definitif di dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan manusia Indonesia. Artinya kendati setiap individu memiliki budaya berbeda, namun toh perlu mengubah diri melalui jalan budaya menuju persatuan semua orang yang memiliki budaya berbeda.

Setiap anggota secara personal, menganut dan hidup dalam nilai-nilai yang berbeda, namun dalam hubungan antarpribadi, mereka diharapkan dapat menerima nilai-nilai yang dihargai masyarakat secara kolektif (Parekh: 2008, hal. 354).

Artinya dalam hubungan antarpribadi subjek-subjek yang memiliki kebudayaan berbeda, perlu berpikiran terbuka untuk bersama melangkah menuju kebaikan bersama dengan menempuh jalan-jalan kebudayaan yang humanis-manusiawi.

Melalui jalan kultural, diharapkan setiap individu pemilik budaya mengelolah identitas lokalitas (subjektivitas) menuju nasionalitas (objektivitas). Pengolahan lokalitas menjadi nasionalitas adalah pengolahan identitas suku, agama dan golongan yang pluralis menyatu sebagai sebuah bangsa dalam proses budaya bhineka (Sutrisno: 2011, hal. 122). Di sini orang Indonesia perlu secara rasional melawan budaya rasa minder (irasional) akibat trauma psikologis masa lalu sebagai kaum terjajah, dan mengolah diri secara cerdas untuk tampil lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan budaya bangsa lain. Indonesia membutuhkan pendidikan kebudayaan yang cerdas dengan mengangkat harkat-martabat orang Indonesia ke taraf lebih tinggi setara dengan bangsa lain. Jalan kultural menuju manusia cerdas itu diterjemahkan secara konkret melalui jalur pendidikan budaya. Mencerdaskan kehidupan bangsa memuat solusi prosedural untuk mendidik diri dan menapaki jalan pendidikan keadaban, membereskan lebih dahulu mentalitas budak menjadi watak merdeka-mandiri dengan menghayati pendidikan budi jernih dan nurani bening sebagai cita-cita manusia Indonesia baru yang diharapkan tiap kali akan membuat sistem yang lebih cerdas dan bermartabat dalam hidup bersama (Sutrisno: 2011, hal. 123). Hal ini semakin urgen ketika bangsa Indonesia makin ramai dikepung oleh berbagai terpaan arus budaya negara lain (asing) yang gencar masuk ke Indonesia di abad 21 ini.

Ketika Nusantara yang menjadi Indonesia mengalami prosesnya dari lokalitas menjadi nasionalitas dan sekarang dihadap-hadapkan dari semua lini lingkaran-lingkaran internasional yang mengerumuninya, proses ini menggugat visi mengindonesia dengan manusia cerdas budi dan jernih nurani untuk memproses dirinya dalam kontruksi edukasi peradaban menjadi proses dari LOCAL GENIUS (baca: local geniusnya kebatakan, kejawaan, keminangan, kebugisan, kefloresan, kepapuaan, dll) dengan GLOBAL WISDOM (baca: tidak cukup pengetahuan rasional atau ekonomisasi global dan tidak cukup segmentasi dan fragmentasi kotak-kotak ilmu instrumentalis-pragmatis melulu), namun butuh *knowledge* yang diolah oleh nilai hidup dan diukur demi kesejahteraan hidup di dunia lintas negara atau global ini (Sutrisno: 2011, hal. 123). Indonesia sungguh membutuhkan sebuah jalan pendidikan budaya yang konsisten melalui pengolahan diri secara rasional yang terekspreasi dalam sikap nyata, bukan sekadar retorika atau jargon omong kosong belaka. Jalan pendidikan budaya penting agar kita bertahan dalam fenomena benturan budaya dalam konteks nasional mengindonesia maupun konteks internasional mendunia. Jalan budaya memungkinkan kita bertahan dalam pusaran kepungan arus pertemuan dan komunikasi antarbudaya global.

Bagaimana skema jalan kultural itu direalisasikan secara riil menyiasati tantangan interaksi antarbudaya yang terjadi di Indonesia? Sutrisno (2011) mengajukan tiga jalan kultural yang bisa Indonesia tempuh, yakni:

Pertama, *sintesis*. Sintesis merupakan pengolahan pelaku budaya saat memproses olah unsur-unsur nilai tradisi dan kearifan hidup sebagai tesis berhadapan dengan masuk derasnya antitesis nilai-nilai baru yang menantang dan mengoyak integrasi yang terjadi sekaligus memuat nilai-nilai baru yang memberi daya survival ke depan.

Kedua, *transformasi*. Masing-masing yang positif (tesis) dan antitesis diambil hingga menemukan sintesis baru untuk dialektika transformasi (perubahan) yang terus-menerus. Acuannya adalah humanisasi (semakin sejahtera manusiawinya) kebudayaan menjadi peradaban.

Ketiga, *osmosis*. Persoalan proses menjadi Indonesia menuntut studi mendalam watak bangsa dan mentalitas moralnya serta penelitian untuk mencatat dan melihat bagaimana proses “osmosis” dari nilai lokalitas yang dihidupi dengan intuisi dan pembelajaran hormat pada perbedaan menjadi klasifikasi sistemik dalam sistem nilai lalu ke tahap berikut menjadi sistem nilai budaya lokal.

Ke-3 tahap ini perlu direfleksikan oleh semua elemen di Indonesia mulai dari pemerintah, masyarakat/rakyat, budayawan, sastrawan, jurnalis, akuntan, teknokrat, dokter, manager, pendidik, mahasiswa, rakyat di kota dan desa, aktivis sosial, dll. Semua entitas di Indonesia sama-sama mengemban panggilan mulia dan tanggung jawab luhur yang sama untuk menjadikan jalan budaya ini sebagai proses yang melekat erat dalam totalitas keseharian hidup kita. Jalan budaya harus menjadi gerakan kita bersama semua elemen di Indonesia menuju kelanggengan budaya Indonesia lebih baik. Sekarang kita disodorkan alternatif: pilih jalan budaya untuk kebaikan kita bersama, ataukah tidak sama sekali dengan akibat hancurlah kebudayaan dan peradaban kita Indonesia diterjang arus budaya global dan mancanegara!

E. Dari Jalan Budaya Menuju Persatuan dalam Perbedaan

Setelah menempuh jalan kebudayaan dimaksud, maka langkah selanjutnya yakni setiap subjek manusia berbudaya perlu menunjukkan dan memproyeksikan *local genius* yang dimiliki masing-masing untuk berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa dalam *nation state* Indonesia. Diperlukan keberanian setiap aktor budaya untuk menunjukkan identitas diri masing-masing yang berbeda itu sebagai hal yang *niscaya* (mutlak) dan tidak bisa tidak. Masing-masing pihak butuh kerendahan hati untuk mengerti, bertoleransi dan memahami ekspresi budaya masing-masing di atas panggung ekspresi antarbudaya. Ini artinya tidak ada ruang bagi adanya superior atau dominasi siapa lebih baik dari siapa atau budaya mana yang lebih tinggi dari budaya mana? Ada prinsip kesederajatan, ekuivalensi dan paralelisme dalam ekspresi kebudayaan oleh individu-individu yang berbeda budaya.

Setiap pelaku budaya harus sadar untuk menghargai pelaku budaya dan memperlakukan orang berbudaya lain secara adil. Di sini setiap pemilik budaya perlu mempersepsikan secara positif pelaku budaya lain yang berbeda. Kita perlu sama-sama menganggap aktor budaya lain sebagai sahabat, sebagai kawan dan bukan sebagai lawan atau saingan. Nilai humanisme setiap orang pelaku budaya menjadi titik acuan dan fokus rujukan dalam konteks interaksi antarbudaya. Bahwa interaksi budaya perlu dilakukan dalam semangat untuk saling memajukan, saling mengembangkan, saling mendukung, saling belajar untuk memperkaya diri satu sama lain. Interaksi antarbudaya tidak bertujuan menciptakan keretakan, disharmoni dan dominasi dan diskriminasi satu sama lain, tetapi interaksi antarbudaya bertujuan menciptakan kesatuan, harmoni, kesetaraan dan hubungan cinta kasih satu sama lain sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Interaksi antarbudaya harus saling memanusiawikan diri kita satu sama lain dalam konteks mengindonesia maupun mendunia.

Ketika setiap pelaku budaya saling memperlakukan satu sama lain sebagai kawan untuk saling mendukung dan mengembangkan diri masing-masing, di situlah panggung budaya kehidupan menjadi indah, menjadi kaya, menjadi hiburan, menjadi ajang pertemuan antarbudaya yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan afektif untuk semua pelaku budaya dalam suasana keanekaragaman. Di atas panggung budaya inilah, setiap aktor budaya bisa saling belajar lintas budaya, lintas agama, lintas etnis, lintas ras, lintas suku, lintas bangsa dll. Dengan demikian segala sentimen irasional seperti rasisme, etnosentrisme, SARA, fanatisme picik semakin ditekan seminimal mungkin sehingga yang tersisa hanyalah semangat integrasi dalam kesadaran akan keunikan perbedaan masing-masing.

Hal penting lain yang patut dilakukan dalam konteks interaksi antarbudaya di Indonesia yakni adanya kerjasama antarbudaya berbeda perlu digalakkan di berbagai bidang pembangunan. Dibutuhkan kerja-kerja tahap visi, kerja penelitian, kerja pendidikan, sosialisasi, transformasi dan internalisasi; dan yang paling penting adalah penyadaran atau konsientisasi serta laku budaya hingga bhineka tunggal ika tidak hanya menjadi slogan yang mengajar atau janji politik budaya kampanye, tetapi diberi kesaksian keteladanan dengan saling belajar antar tradisi keindonesiaan (**Sutrisno: 2011, hal. 112**). Sampai titik ini kita boleh optimistis dan berani yakin bahwa Sila ke-3 Pancasila “Persatuan Indonesia” semakin membumi di dalam realitas berbangsa Indonesia. Bukan hanya persatuan yang tinggal jargon dan slogan, melainkan persatuan yang sungguh nyata, sungguh hidup dan sungguh terhayati 100% dalam praksis hidup setiap aktor budaya berbeda di bumi ibu pertiwi yang indah dan kaya akan budaya beraneka ragam ini.

F. Tugas

Carilah di internet 1 kasus tentang disorientasi budaya yang melanda anak muda Indonesia berhadapan dengan gelombang masuknya budaya asing di era globalisasi ini? Lalu bagaimana caranya kita menjaga diri agar tidak hanyut dibawa tarikan arus globalisasi itu yang bisa membuat anak-anak muda (generasi muda) kita lupa akan akar-akar budaya Indonesia kita sendiri? Jelaskan dan contohkan!

Kepustakaan

Antonius Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, Yohanes Babari (2002). *Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Bikhu Parekh (2008). *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Kanisius

Clifford Geertz (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Fred E. Jandt (1998). *Intercultural Communication: An Introduction*. London: Sage Publication.

Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Mudji Sutrisno (2011). *Membaca Wajah-Wajah Kebudayaan*. Jakarta: Warna Widya Jati

Stewart L. Tubbs & Sylvia Moss (1996). *Human Communication: Konteks-konteks Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Teory Heraty Noerhadi (2013). *Aku dalam Budaya: Telaah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia.

BAB XI

KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS

Pengantar (Sebuah Ilustrasi)

Kisah Jenderal Hoegeng, Nasi Garam, dan Toko Bunga

JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan nada pelan, Meriyati Roeslani menceritakan sedikit kenangan bersama sang suami, Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso. Di usia 89 tahun, Meriyati yang akrab disapa Meri ini mengaku sulit mengingat semua kisah tentang suaminya.

"Saya mencoba mengingat kembali. Umur saya sudah banyak sekali," kata Meri membuka pembicaraan. Namun, ada satu hal yang tak mungkin bisa dilupakan Meri hingga kini yaitu soal nilai kejujuran yang ditanamkan Hoegeng pada keluarganya. Meri ingat betul ketika keluarganya hidup pas-pasan karena Hoegeng dipensiunkan dini pada masa kepemimpinan Soeharto.

"Yang saya ingat itu, waktu Mas Hoegeng dipensiunkan umur 49 tahun. Padahal masih banyak yang mau dia kerjakan. Saya menghadapi waktu yang sangat berat bagi istri. Tapi dia masih mau bekerja membetulkan semuanya," kisah Meri ketika ditemui saat peluncuran buku *Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan* karya wartawan *Kompas*, Suhartono, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sungkem ke ibu

Hoegeng berhenti menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tahun 1971. Tak lagi memiliki pekerjaan, Hoegeng langsung menemui ibunya di rumah.

"Dia datang ke rumah menjumpai ibunya. Saya menghormati sekali. Saya tidak bisa lupa itu. Dia sungkem katanya, 'saya tidak punya pekerjaan lagi, Bu'. Ibunya mengatakan, 'kalau kamu jujur melangkah, kami masih bisa makan nasi sama garam.' Itu yang bikin kita kuat semua," kenang Meri. Peristiwa ini sangat melekat di memori Meri. Hoegeng ternyata mewarisi sifat orang tuanya dalam hal kejujuran.

Toko bunga

Satu hal lagi yang paling diingat Meri ketika dirinya diminta menutup toko bunga. Kala itu, Hoegeng menjabat Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia.

"Saat membuka toko bunga di garasi kami untuk menambah pemasukan, waktu dia menjabat kepala imigrasi minta menutup toko itu. Sudah 60 tahun saya bersama Mas Hoegeng, saya tahu sifatnya, mau ke mana arahnya," kenang Meri.

Rupanya Hoegeng khawatir orang-orang yang membeli bunga nantinya merupakan relasinya di Imigrasi. Dia tak mau itu terjadi. Akhirnya Meri bersedia menutup toko bunganya. Sebagai istri Kapolri saat itu, Meri tidak menjabat sebagai Ketua Umum Bhayangkari. Hoegeng meminta pemegang jabatan itu dipilih dengan pemilihan.

Meninggal

Meri setia menemani hingga akhir hayat suaminya. Hoegeng meninggal dunia pada 14 Juli 2004 karena menderita stroke. Mereka dikaruniai tiga anak yaitu Reni Soerjanti, Aditya Soetanto, dan Sri Pamujining Rahayu. Hoegeng meninggalkan empat cucu dan empat cicit.

Anak pertama Hoegeng yaitu Reni, melihat sosok ayahnya sebagai pribadi yang tak banyak bicara, tetapi menunjukkan langsung apa yang baik dilakukan oleh anak-anaknya. "Orangnya sederhana banget, memberikan contoh yang baik. Bapak selalu *pesen* kita harus hidup dengan baik, jujur, dan sederhana," kata Reni. (*Dian Maharani)

Pertanyaan Refleksi:

Nilai-nilai luhur kepemimpinan apa yang Anda temukan pada sosok Hoegeng ini? Sebagai calon pemimpin masa depan, Anda belajar hal positif apa dari tokoh ini untuk mengembangkan dimensi kepemimpinan demokratis di dalam dirimu? Jelaskan!

A. Konsep Kepemimpinan

Suatu organisasi atau komunitas akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Suatu ungkapan yang mulia mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam organisasi pada posisi yang terpenting.

Sementara itu digambarkan pula bahwa pemimpin itu adalah pengembala, dan setiap pengembala akan ditanyakan tentang perilaku pengembalaannya. Ungkapan ini membuktikan bahwa seorang pemimpin apa pun wujudnya, dimana pun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Pemimpin seperti ini lebih banyak bekerja dibandingkan berbicara, lebih banyak memberikan contoh-contoh baik dalam kehidupannya dibandingkan berbicara besar tanpa bukti dan lebih banyak berorientasi pada bawahan dan kepentingan umum dibandingkan dari orientasi dan kepentingan diri sendiri.

Membicarakan kepemimpinan memang menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana saja ia akan diteropong. Dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi perhatian manusia. Ada yang berpendapat masalah kepemimpinan itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.

Kepemimpinan

Apakah arti kepemimpinan itu? menurut (Hughes, R.L. et.al., *Leadership*, McGraw-Hill, Boston, 2009, p.4), cara terbaik untuk mengerti apa itu kepemimpinan adalah dengan melihatnya dari berbagai macam cara. Berikut adalah cara untuk mengerti arti dari kepemimpinan:

1. Proses dimana seorang agen membuat bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkannya
2. Mengarahkan dan mengatur pekerjaan dari anggota grup.
3. Sebuah hubungan interpersonal dimana yang lain mengikuti bukan karena sesuatu yang harus tetapi oleh karena keinginan mereka.
4. Proses untuk mempengaruhi sebuah grup yang telah terorganisir terhadap penyelesaian tujuan.
5. Tindakan yang memusatkan sumber daya untuk menciptakan kesempatan yang diinginkan
6. Pekerjaan seorang pemimpin adalah untuk menciptakan sebuah kondisi agar tim dari pemimpin tersebut menjadi lebih efektif.
7. Kepemimpinan bukanlah sebuah pekerjaan tetapi sebuah aktivitas yang dilakukan seumur hidup.
8. Kepemimpinan merupakan sebuah proses bukan sebuah posisi.

Banyak definisi mengenai arti kepemimpinan, tetapi dalam mata kuliah "*Leadership*" saat ini, definisi leadership mengacu kepada Peter. G. Northouse, dimana kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama, dari definisi Peter G. Northouse, kita dapat menganalisis beberapa hal dari definisinya mengenai kepemimpinan:

1. Kepemimpinan adalah proses
2. Kepemimpinan meliputi mempengaruhi orang lain.
3. Kepemimpinan terjadi didalam sebuah grup.
4. Kepemimpinan termasuk memberi perhatian kepada tujuan bersama.

Perbedaan antara seorang pemimpin dan seorang manager, adalah sebagai berikut:

Seorang manager:

- Merencanakan adalah proses awal dalam melakukan apa yang akan dikerjakan kedepan.
- Mengorganisir merupakan tindakan merencana, dilakukan dan bukan hanya dalam batas wacana semata.
- Mengontrol adalah tindakan selanjutnya yang merupakan akhir dari semua proses namun tidak boleh dipandang tidak perlu.

Seorang pemimpin:

- Membangun visi adalah membangun sesuatu yang berhubungan dengan jangka pendek saja, namun lebih komprehensif dan panjang.
- Berkomunikasi dengan orang lain merupakan kunci yang sangat penting dalam memimpin, karena dengan inilah seorang pemimpin dapat memberikan serta menanamkan pengaruh.
- Memotivasi dan menginspirasi merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun keberlangsungan organisasi dan komunitas.

Kelebihan kepemimpinan dibanding manajemen antara lain:

- Harus berani menghadapi resiko
- Hidup dengan menghadapi beban akan masa depan yang tidak bisa diprediksi.
- Mencoba untuk merubah ketidakpastian yang ada dimasa depan menjadi hal yang pasti di masa sekarang.
- Harus memiliki keberanian untuk memilih keputusan yang dapat ditanggung jawabkan.

Seorang pemimpin tidak pernah lepas dari visinya. Menurut Burt Nannus, visi adalah sebuah masa depan yang realistis, meyakinkan, dan menarik untuk organisasi kita.

Beberapa fungsi visi dalam hal kepemimpinan:

1. Memunculkan komitmen dan memberi semangat untuk orang lain.
2. Menciptakan sebuah arti dalam kehidupan para pengikut kita.
3. Menciptakan sebuah standar akan keberhasilan.
4. Menjembatani antara masa depan dan masa kini.

Beberapa karakteristik dari visi yang kuat:

1. Men-set standar keberhasilan dan merefleksikan idealisme yang tinggi.
2. Memperjelas tujuan dan arah
3. Menginspirasi antusiasme dan mendukung munculnya komitmen.
4. Mudah untuk disampaikan dan mudah dimengerti.
5. Merefleksikan keunikan dari sebuah organisasi
6. Ambisius.

B. Model-model Kepemimpinan



Karakter dan gaya dari kepemimpinan (Trait and Style Approach).

Ada 2 pendekatan dalam kepemimpinan, 2 pendekatan itu adalah pendekatan dengan karakter dan pendekatan dengan tingkah laku.

Pendekatan dengan karakter merupakan salah satu dari usaha sistematis untuk mempelajari kepemimpinan.

- pendekatan dengan karakter ini fokus kepada pemimpin secara eksklusif:
- karakter apa yang dimiliki oleh pemimpin
- siapa yang memiliki karakter2 tersebut.
- melakukan penelitian terhadap autobiografi/biografi

berdasarkan latar belakang biografi akan seorang pemimpin, pendekatan dengan karakter mencari karakter dominan dari para pemimpin tersebut yang mempengaruhi kepemimpinan mereka.

Karakter sangat penting, karena karakter mengakar ke dalam semua tindakan kita sebagai manusia, salah satu faktor pembentuk karakter yang paling besar adalah kebiasaan, berikut merupakan langkah-langkah karakter terbentuk lewat kebiasaan.

- Tindakan (*action*) yang terus menerus diulang akan menjadi kebiasaan (*habit*). Contoh: pencurian yang berhasil akan dilakukan lagi dan lagi.
- Kebiasaan (*habit*) yang tidak bisa dihentikan akan menjadi tingkah laku (*behaviour*). Ketika mencuri menjadi rutinitas, lama kelamaan ia akan menjadi kebutuhan.
- Tingkah laku (*behavior*) yang terus menerus dipelihara akan menjadi sifat (*attitude*). Mencuri sebagai gaya hidup.

- Sifat (*attitude*) bila dipelihara akan menjadi karakter.
- Kemudian karakter yang telah dibangun olehnya akan berkontribusi dalam menentukan nasib orang tersebut. berikut adalah model terbentuknya karakter

Kemampuan seseorang dalam menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial, sesungguhnya merupakan bukti yang paling nyata dari efektivitasnya sebagai seorang pemimpin sehingga dewasa ini banyak gaya yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada dasarnya ada tiga yaitu : (1) *Trait theories*, (2) *Style theories*, (3) *Contingency theories*. (Veryard Projects Ltd & Antelope Projects Ltd, dalam Robbin, 2002:1).

Teori Karakter (*Trait theories*) yaitu untuk menjadi seorang pemimpin, harus mempunyai kemampuan : intelegensi (kemampuan memahami dan memecahkan masalah), karakter (inisiatif dan percaya diri), fisik, (sehat), kategori sosial (gender, kelas sosial atau etnik). Robbins (2002:40) mengemukakan teori ciri kepemimpinan ini mencari ciri kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin.

Teori ini mencoba untuk mencari karakter yang konsisten dan unik yang berlaku secara universal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Karakter yang dimaksud meliputi ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas (keutuhan), percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dalam pekerjaan.

Style theories yaitu gaya kepemimpinan yang baik yaitu meliputi : kepemimpinan yang autokratik (eksploitatif, partisipatif dan demokratis), memberitahukan, menjajakkan, mengikutsertakan, mendelegasikan.

Contingency theories yaitu teori ini model kepemimpinan ada dua yaitu : (1) *style depends on circumstance* yang terdiri dari : pemimpin bawahan yang menjalin hubungan, struktur tugas, tinggi rendahnya posisi dan otoritas kekuasaan. (2) *gauge situation favourableness* yang terdiri dari : Pemimpin senantiasa berorientasi tugas, orientasi anggota.

Gitosudarmo dan Sudita (2000:132) mengemukakan dasar dari pendekatan gaya kepemimpinan ini diyakini bahwa pemimpin yang efektif menggunakan gaya (*style*) tertentu untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini pendekatannya lebih dipusatkan pada efektivitas pemimpin, yang menekankan pada dua gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan berorientasi tugas (*task orientation*) dan orientasi pada bawahan (*employ orientation*). Di mana orientasi tugas adalah perilaku pimpinan yang menekankan bahwa tugas-tugas harus dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Sedangkan orientasi bawahan adalah perilaku pimpinan yang menekankan pada memberikan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya, dan mengembangkan hubungan yang bersahabat saling percaya dan saling menghormati diantara anggota kelompok. Teori kontingensi ini meliputi :

Robbins (2002:47) mengemukakan terdapat tiga dimensi kemungkinan situasi yang dapat mempengaruhi efektifitas kepemimpinan yaitu :

(1) Hubungan pemimpin dengan anggota meliputi tingkat keyakinan, kepercayaan dan aspek bawahan terhadap pemimpin. (2) Struktur tugas meliputi tingkat di mana tugas pekerjaan terstruktur atau tidak berstruktur. (3) Kekuasaan jabatan meliputi tingkat di mana seorang pemimpin mempunyai variabel seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan, serta menaikkan gaji.

Teori Situasional Hersey dan Blanchard yaitu teori yang memfokuskan kepada pengikut. Menurut teori ini bahwa kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, bersifat tergantung pada kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. (Robbins, 2002:49)

mengemukakan kepemimpinan situasional lebih menekankan pada pengikut yaitu pada kesiapan atau kematangan pengikut.

Menurut Paul Hersey dan Blanchard (1995:34) mengemukakan bahwa hubungan antara pemimpin dengan bawahannya berjalan melalui 4 (empat) tahap menurut perkembangan dan kematangan bawahan yaitu :

- a. Gaya Penjelasan (*telling style*) yaitu pada saat bawahan pertama kali memasuki organisasi, orientasi tugas yang tinggi dan orientasi hubungan yang rendah paling tepat. Bawahan harus lebih banyak diberi perintah dalam pelaksanaan tugasnya dan diperkenalkan dengan aturan-aturan dan prosedur organisasi.
- b. Gaya Menjual (*selling style*) yaitu pada tahap ini bawahan mulai mempelajari tugas-tugasnya. Kepemimpinan orientasi tugas yang tinggi masih diperlukan, karena bawahan belum bersedia menerima tanggung jawab yang penuh. Tetapi kepercayaan dan dukungan pemimpin terhadap bawahan dapat meningkat. Di mana pemimpin dapat mulai menggunakan perilaku yang berorientasi hubungan yang tinggi.
- c. Gaya Partisipasi (*participating style*) yaitu tahap ini kemampuan dan motivasi prestasi bawahan meningkat, dan bawahan secara aktif mulai mencari tanggung jawab yang lebih besar. Di mana perilaku pemimpin adalah orientasi hubungan tinggi dan orientasi tugas rendah.
- d. Gaya Pendelegasian (*delegating style*) yaitu tahap ini bawahan secara berangsur-angsur menjadi lebih percaya diri, dapat mengarahkan diri sendiri, cukup berpengalaman, dan tanggung jawabnya dapat diandalkan. Di mana gaya pendelegasian yang tepat yaitu orientasi tugas dan hubungan rendah.

Teori jalur tujuan yaitu perilaku seorang pemimpin dapat diterima baik oleh bawahan sejauh mereka pandang sebagai suatu sumber dari atau kepuasan segera atau kepuasan masa depan. Jadi hakekatnya teori ini adalah tugas pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka, memberikan arahan atau dukungan yang diperlukan guna memastikan apakah tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan kelompok atau organisasi.

Teori model partisipasi pemimpin adalah suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan. (Robbins, 2002:55). Model partisipasi pemimpin mengandalkan bahwa pemimpin dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi yang berlainan.

Teori atribusi pemimpin yaitu bahwa kepemimpinan semata-mata sebagai atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Atribusi-atribusi yang dimaksud seperti kecerdasan, kepribadian ramah-tamah keterampilan verbal yang kuat, keagresifan, pemahaman dan kerajinan. Salah satu tema yang menarik dalam teori atribusi kepemimpinan adalah persepsi bahwa kepemimpinan yang efektif umumnya dianggap konsisten dalam keputusan mereka.

Teori kepemimpinan kharismatik, yaitu para pengikut membuat atribusi (penghubungan) dari kemampuan pemimpin yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Menurut House, seorang pemimpin kharismatik mempunyai dampak yang dalam dan tidak luar biasa terhadap pengikut, mereka merasakan bahwa keyakinan-keyakinan pemimpin tersebut adalah benar maka mereka menerima pemimpin tersebut tanpa mempertanyakan lagi, mereka tunduk kepada pemimpin dengan senang hati, mereka merasa sayang terhadap pemimpin tersebut, mereka terlibat secara emosional dalam misi kelompok atau organisasi dan mempunyai tujuan-tujuan kinerja tinggi.

Teori transaksional lawan transformasional yaitu memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas, sedangkan kepemimpinan transaksional, pemimpin memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual individual, dan memiliki kharisma. Pemimpin mentransformasi dan memotivasi para pengikut dengan jalan membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi daripada diri sendiri dan mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi.

Teori kepemimpinan visioner yaitu kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang atraktif, terpercaya, realistik tentang masa depan suatu organisasi atau suatu unit organisasi yang terus tumbuh dan membaik pada saat ini.

Teori kepemimpinan situasional didasarkan atas hubungan antara kadar bimbingan dan arahan (perilaku tugas), kadar hubungan sosio emosional (perilaku hubungan), level kesiapan (kemampuan). Dengan demikian kepemimpinan memiliki tiga dimensi yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan dan kemampuan anggota. Perilaku tugas diartikan sebagai kadar sejauhmana pemimpin menyediakan arahan kepada pengikut. Arahan yang dimaksud meliputi apa yang harus dilakukan, kapan dimana melakukannya, cara melakukan pekerjaan. Sedangkan perilaku hubungan diartikan kadar sejauhmana pemimpin melakukan hubungan dua arah dengan pengikut. Pemimpin dalam hal ini menyediakan dukungan, dorongan, memberikan kemudahan kepada pengikutnya. Dengan demikian pemimpin secara aktif menyimak dan memberikan dukungan terhadap upaya pengikut dalam melaksanakan pekerjaan mereka (Gibson, 1992 : 124).

Kombinasi dari perilaku tugas dan perilaku hubungan menciptakan gaya kepemimpinan situasional sebagai berikut :

- a. Telling (memberitahukan) adalah gaya bagi pengikut yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah. Maksudnya orang-orang tidak memiliki kemampuan dan kemauan memikul tanggung jawab untuk melakukan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak yakin. Peran pemimpin dalam hal ini memberikan arahan, supervisi. Gaya ini dicirikan oleh perilaku pemimpin yang menetapkan peranan dan memberitahu orang-orang tentang apa, bagaimana, kapan, dan dimana melakukan tugas.
- b. Selling (menjajakan) gaya ini diterapkan bagi pengikut yang memiliki tingkat kemampuan rendah ke sedang, orang-orang tidak memiliki kemampuan tetapi juga mau memikul tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tugas adalah yakin tetapi kurang memiliki keterampilan. Hal ini disebut "Menjajakan" karena pemimpin menyediakan hampir seluruh arahan. Tetapi melalui komunikasi dua arah dan penjelasan, diharapkan pengikut turut mengambil bagian dalam perilaku yang diinginkan.
- c. Participating "mengikutsertakan" gaya kepemimpinan ini diterapkan bagi pengikut yang memiliki tingkat kemampuan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat kemampuan ini memiliki kemampuan tetapi tidak mau melakukan hal-hal yang diinginkan pemimpin. Disebut Participating artinya pemimpin dan pengikut berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, dan peranan pemimpin dalam hal ini adalah memudahkan dalam berkomunikasi dengan pengikut
- d. Delegation (mendelegasikan) adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan bagi pengikut yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Orang-orang dengan tingkat kemampuan seperti ini memiliki kemauan dan kemampuan atau keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Pada gaya ini arahan dan dukungan pemimpin adalah rendah, pemimpin menyerahkan tanggung jawab melaksanakan rencana kepada pengikut yang matang untuk melaksanakan sendiri pekerjaan.

Jadi penekanan perilaku kepemimpinan situasional adalah pada pola membangun hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Sebagai pemimpin kepala desa menurut teori kepemimpinan situasional idealnya mengedepankan kebiasaan mendengar, berkomunikasi multi arah, memfasilitasi, mengklarifikasi, dan memberikan dukungan sosial atau emosional kepada masyarakatnya.

Menurut Robbins (1996:52) ketepatan penerapan gaya kepemimpinan didasarkan pada tingkat kemampuan (maturity) atau kesiapan (readiness) para pengikut yaitu kemampuan dan kemauan (ability and willingness) para pengikut dalam hal ini memikul tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku para pengikut itu sendiri. Kemampuan para pengikutnya terdiri dari : (1) Kemampuan rendah, dalam hal ini pengikut tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memikul tanggung jawab. (2) Kemampuan rendah ke sedang, artinya anggota tidak memiliki kemampuan tetapi memiliki keinginan untuk memikul tanggung jawab. (3) Kemampuan sedang ke tinggi, dalam hal ini anggota memiliki kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan untuk

memikul tanggung jawab. (4) Kematangan tinggi, artinya anggota memiliki kemampuan dan kemauan untuk memikul tanggung jawab.

Berbicara tentang kepemimpinan, hal yang perlu dipertimbangkan adalah keberhasilan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins (1996:50) bahwa kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya yang tepat, tergantung pada kesiapan dan kedewasaan para pengikutnya. Dalam kepemimpinan situasional, variabel situasional dititik beratkan pada perilaku seorang pemimpin dalam hubungannya dengan pengikut, yang didasarkan pada pendekatan pengarahan (perilaku tugas), dukungan sosio emosional (perilaku hubungan), dan tingkat kematangan pengikut.

Lippit and White dalam Sutarto (1991:72) mengatakan ada tiga gaya kepemimpinan yaitu;

- Otoriter (authoritarian)
- Demokratis (democratic)
- Kebebasan (laissez-faire)

Dengan keterangan sebagai berikut:

Pemimpin yang Otoriter:

1. Wewenang mutlak terpusat pada pimpinan
2. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan
3. Komunikasi berlangsung satu arah
4. Pengawasan dilakukan secara ketat
5. Prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran
6. Lebih banyak kritik daripada pujian
7. Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna
8. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan

Pemimpin yang Demokratis:

1. Wewenang pimpinan tidak mutlak
2. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan
3. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
4. Komunikasi berlangsung dua arah
5. Pengawasan dilakukan secara wajar
6. Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran
7. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi
8. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang
9. Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai
10. Tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan

Pemimpin yang Liberal:

1. Pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan
2. Keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan
3. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan
4. Hampir tidak ada pengawasan
5. Pemrakarsa selalu datang dari bawahan
6. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan
7. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok
8. Tanggung jawab dipikul oleh orang perorang

C. Kepemimpinan Yang Efektif

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini dapat ditangkap suatu pengertian bahwa jika seseorang telah mulai berkeinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka di sini kegiatan kepemimpinan itu telah dimulai.

Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut umumnya sangat sulit untuk diukur dan sebagian lagi sangat sulit pula untuk dikenali.

Kusnadi, dkk (2005:354) menyatakan bahwa di dalam mengembangkan profil kepemimpinan, maka sangat penting untuk memperhatikan posisi pemimpin di dalam organisasi atau komunitas. Asumsi apa yang akan dipegang oleh pemimpin dalam mengelola anak buahnya atau komunitasnya di dalam organisasi agar mau bekerja secara efektif dan efisien

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin di dalam kelompok sosial termasuk masyarakat, seorang pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang meliputi kumpulan peran yang kompleks, dan demikian pula fungsinya. Dalam keluasan fungsi dan peran, seorang pemimpin dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para pengikutnya, sesuai dengan kedudukan yang ada dan berlaku. Ini juga berlaku bagi kepemimpinan yang demokratis yang berdasarkan Pancasila.



Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, Goleman (2003:2, <http://blogspot.com/2008/01/kepemimpinan-dalam-manajemen.html>) menjelaskan ada dua hal yang biasanya dilakukan olehnya terhadap pengikut, yakni : perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan hanya dalam komunikasi satu arah, sedangkan perilaku mendukung diartikan dalam komunikasi dua arah. Oleh karena fungsi kepemimpinan yang lazim ialah membuat keputusan, maka gaya kepemimpinan tersebut akan tampak jika dipraktekkan dalam hal melakukan pembuatan keputusan. Posisi kontrol atas pemecahan masalah atau pembuatan keputusan dipegang bergantian antara pemimpin dan bawahannya, sehingga penampilan, bobot, dan perilakunya disenangi dan diterima oleh bawahannya. Bawahan menyukainya dan menganggapnya sebagai sumber informasi, dan tempat bertanya. Pemimpin sering mendiskusikan masalah bersama-sama bawahan, sehingga tercapai kesepakatan. Pembuatan keputusan didelegasikan kepada bawahan. Sumber kekuasaan yang ada padanya kekuasaan keahlian dan informasi.

Demikianlah inti pokok pembicaraan kepemimpinan dalam hubungannya dengan kekuasaan dan demokrasi. Kedua istilah ini pemimpin atau kepemimpinan dengan kekuasaan mempunyai relevansi yang cukup tinggi. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Untuk mempengaruhi membutuhkan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu sendiri merupakan potensi pengaruh dari seorang pemimpin.

Anoraga (2001:22) mengemukakan bahwa pemimpin mempunyai tugas untuk memimpin dan mengendalikan hal-hal detail dan spesifik, juga ia mengendalikan hubungan internal di dalam kelompoknya, karena pada dasarnya dalam suatu kelompok manusia selalu mengadakan interaksi. Pemimpin mempunyai tugas untuk menjadi pengamat dan pengendali kelancaran hubungan-hubungan yang terjadi. Melalui kelancaran dan kebaikan hubungan-hubungan antar manusia, kecakapan untuk mengadakan komunikasi dan mendidik, kecakapan sosial, serta kemampuan teknis yang meliputi penganalisisan situasi menjadi tuntutan bagi dirinya sebagai pemimpin.

Di dalam kedudukan sebagai seorang pemimpin, pengaruh keadaan sekitar tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali, baik pengaruh dari dalam, maupun pengaruh dari luar kelompok atau organisasinya. Atas pengaruh-pengaruh yang ada, maka dalam pembuatan kebijakan akan terdapat tiga sumber penting. Sebagaimana yang dikemukakan Anoraga (2001:23) yaitu : (1) Bersumber dari pihak yang lebih berkuasa, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang berada di luar kelompoknya akan tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap kehidupan kelompoknya, (2) Bersumber dari pihak bawahan, bagaimana juga bawahan sebagai pengikut, tetap memegang peran yang tidak kecil dalam menentukan pencapaian tujuan bersama, (3) Bersumber dari dirinya selaku pemimpin, maka sebagai seorang pemimpin otonomi dipegangnya untuk menetapkan keputusan mengenai suatu kebijakan yang akan diambil.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa melalui wewenang yang luas, pemimpin mempunyai ruang gerak yang luas pula. Ketajaman pandangan pengikut terhadap pemimpinnya bukan merupakan hal yang luar biasa. Sorotan dan penilaian terhadap diri pemimpin dapat terjadi. Sejauh itu pula kebaikan dan keburukan yang dilakukan pimpinan menjadi perhatian para pengikut. Terlepas dari baik dan buruk, tentunya sikap, tindak dan cara dari seseorang pemimpin, diharapkan dapat dijadikan contoh atau teladan untuk ditiru dan diikuti oleh para pengikutnya. Tingkat penilaian yang dihasilkan oleh para pengikut, dapat mencerminkan akan kebaikan atau keburukan kelompok secara keseluruhan. Atas dasar pandangan-pandangan ini pemimpin selaku tokoh dengan tingkat wewenang yang tinggi mendapatkan penilaian dari para pengikut melalui pencerminannya, maka dapat dianggap bahwa seorang pemimpin mencapai menempati kedudukan sebagai lambang dari kelompoknya. Cap terhadap kelompok secara menyeluruh, dapat timbul dan terbentuk dari cap yang diterapkan terhadap pemimpinnya secara tersendiri.

Dalam keadaan yang demikian turut memegang peran dalam masalah kedudukan seorang pemimpin. Kesediaannya menerima kesalahan turut memegang peran dalam masalah kedudukan sebagai pemimpin. Mengakui kesalahan tidak berarti pula menurunkan derajat pimpinan, melainkan menaikkan tingkat derajat seorang pemimpin, daripada mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi kesalahan yang memang salah.

Anoraga (2001:24) berpendapat bahwa kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin, tidak terlepas pula dari masalah kepribadian itu sendiri. Masalah kepribadian pemimpin, mempunyai kemungkinan pula untuk dibentuk dalam diri setiap orang, demikian dengan kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin.

Dengan demikian peran-peran dari seorang pemimpin seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan sebagai suatu bagian terkecil dari tuntutan-tuntutan yang timbul terhadap dirinya. Peran-peran itupun menuntut pula berbagai masalah yang menyangkut kecakapan dan kemampuan, serta kepribadian tertentu yang kompleks sifatnya.

Dari sini, dapat dilihat bahwa tanpa aktivitas, memimpin, mengubah dan mengendalikan perilaku bawahan, maka seorang bawahan akan bersikap terus selamanya seperti di masa lampaunya. Organisasi yang berhasil memiliki sebuah siri utama yang membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil yaitu kepemimpinan yang dinamis dan efektif.

Kepemimpinan yang konsisten menunjukkan keteladanan dalam mempengaruhi orang lain berarti memberikan daya dorong untuk memotivasi dirinya dalam membangun integritas, yang secara tak langsung mendorong orang lain untuk memahami secara mendalam prinsip dalam menumbuh

kembangkan integritas yang kita sebut dengan prinsip pertama adalah menumbuhkan kembangkan kepercayaan dan keyakinan dalam merubah kesadaran inderawi ke tingkat yang lebih baik ; prinsip kedua adalah memberi saling menghormati dan menghargai orang lain ; prinsip ketiga adalah memiliki kemampuan dalam kedewasaan rohaniah, sosial, emosional dan intelektual.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan makalah ini, adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
2. Tugas pemimpin dalam kepemimpinannya meliputi : menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok, dari keinginan itu dapat dipetikanya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai, meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

E. Tugas

Carilah dari internet 1 tokoh Indonesia yang cukup demokratis dalam menjalankan kepemimpinannya entah dalam bidang pembangunan apa saja! Anda belajar hal positif apa dari tokoh ini untuk mengembangkan dimensi kepemimpinan dirimu yang lebih baik di masa depanmu? Jelaskan!

Daftar Pustaka:

- Anoraga Pandji. 2001. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aliminsyah & Pandji, 2004, *Kamus Istilah Manajemen*, Bandung : CV. Yrama Widya.
- Cravens David, 2001, *Pemasaran Strategis*, Jakarta : Erlangga.
- Gitosudarmo Indriyo & I Nyoman Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta : BPFE
- Goleman, Daniel. 2003. *Kepemimpinan Yang Mendatangkan Hasil*. Yogyakarta : Amara Books.
- Online:[http://ummuathiyya.blogspot.com/2008/01/kepemimpinan-dalam manajemen.html](http://ummuathiyya.blogspot.com/2008/01/kepemimpinan-dalam-manajemen.html).
Diakses : 20 Februari 2009
- John Kotter, 2008. *Teori Keperimpinan* . Online : <http://transdimensi.blogspot.com/2008/07/teori-kepemimpinan.html>. Diakses : 20 Februari 2009
- Kartono(<http://kawakib06.multiply.com/journal/item/6/Makalah-Kepemimpinan-dalam-Manajemen-Pendidikan>). Diakses : 20 Februari 2009
- Dian Maharani:
<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/20/1036149/Kisah.Jenderal.Hoegeng.Nasi.Garam.dan.Toko.Bunga>)
- Kotler Philips, 2004, *Analisis Perencanaan Implementasi dan Kontrol*, Jakarta : Prenhalindo
- Kusnadi dkk. 2005. *Pengantar Manajemen (Konseptual & Perilaku)*. Malang : Univeritas Brawijaya
- Northouse, Peter, *Leadership Theory and Practice*, Sage Publishing, USA, 2004
- Rebecca 2007. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Online: <http://vianney-jkt.sch.id/a185m23s/kepemimpinan-yang-efektif.html>. Diakses : 20 Februari 2009
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta
- Video Jenderal Polisi Hoegeng : <http://www.youtube.com/watch?v=TYK0a8Yab7I>

BAB XII

DEMOKRASI PANCASILA

A. Pendahuluan

Hampir semua negara dunia mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Dalam realitanya perkembangan sistim ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap Negara menganut system ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Yunani kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

B. Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran

dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Menurut **Abraham Lincoln** (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (*Democracy is government of the people, by the people and for the people*). Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah:

- pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; dan
- pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis:

1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan:
 - a) konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi;
 - b) perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang;
 - c) pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen;
 - d) kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/ pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.

Model-model Demokrasi

1. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

a) *Demokrasi langsung*

Dipraktikkan di negara-negara kota (*polis, city state*) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

- sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
- tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
- musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

b) *Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan*

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.

Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

c) *Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum*

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

2. Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya

a. *Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)*

Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas *free fight competition* (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.

Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (*money politics*) yang menguasai opini masyarakat (*public opinion*).

b. *Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)*

Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.

Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri:

- sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia);
- sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
- sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/ pemerintahan;
- sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara.

c. *Demokrasi Gabungan*

Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.

3. Demokrasi ditinjau dari hubungan antaratat perlengkapan negara

Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer

Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing.

Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif.

Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.

Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif maupun legislatif.

Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:

- pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar;
- pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik;
- kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawabannya oleh parlemen kepada kabinet;
- mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif;
- menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat pula;
- menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen;
- pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti dengan pemerintah baru yang dianggap sanggup menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:

- kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
- sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil;
- karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.

Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan

Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah **John Locke** (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat Baron de LaBrede et de **Montesquieu** (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi teori Locke itu dalam teori yang disebut *Trias Politica* pada bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois*. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/lembaganya maupun fungsinya.

Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (*separation du pouvoir*) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiri terpisah dari yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangan sampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlalu besar. Kesederajatan itu menjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (*check and balance*).

Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:

- pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, sehingga pemerintahan dapat berlangsung relatif stabil;
- pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet;
- sistem *check and balance* dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlalu besar pada setiap badan;
- mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut (terpusat pada satu orang).

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:

- pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh;
- pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian;
- pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi antara badan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan tidak tegas;
- proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum

Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapat langsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya.

Ada dua macam referendum, yaitu *referendum obligator* dan *referendum fakultatif*. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum ini bersifat wajib karena menyangkut masalah penting, misalnya tentang perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum fakultatif baru perlu dilakukan apabila dalam waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan pemberlakuannya, sejumlah rakyat meminta diadakan referendum.

Kelebihan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:

- apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;
- adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai/ golongannya.

Kelemahan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:

- pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;
- pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas produk undang-undang.

Prinsip-prinsip Demokrasi:

- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
- Penghormatan terhadap supremasi hukum.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :

- Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;
- Kedudukan yang sama dalam hukum;
- Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

C. Demokrasi Pancasila

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantarkan datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia *chaos* yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam 4 periode: yaitu :

1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)

Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.

4. Periode 1998-sekarang(Reformasi)

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.

Kegagalan demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena hasil pembangunan yang dapat dinikmati, tetapi partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajibannya. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, namun dalam pelaksanaannya banyak yang mengingkarinya sehingga menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde Baru jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. karena pemerintah orde reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi Pancasila.

Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Diselenggarakannya Pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.
- b. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik.
- c. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak, elektronik) baru.
- d. Kedudukan ketua MPR terpisah dari Ketua DPR.
- e. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan Presiden.
- f. Refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara.
- g. Diselenggarakannya Pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sementara bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Dan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada orde reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan ciri-ciri demokrasi antara lain :

- Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
- Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu tau golongan.
- kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat.
- Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

Setelah Anda menyimak ciri dari demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sebagaimana telah diuraikan, coba bandingkan dengan bentuk pemerintahan berikut:

Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang untuk kepentingan orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerntahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat dan keputusannnya tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut,

Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas.

Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama.

Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter)

D. Kesimpulan

Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya untuk melaksanakan pendidikan ini secara baik dan benar.

Proses semacam ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap cara berdemokrasi yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah maupun asas dalam berdemokrasi masyarakat. Pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi

E. Tugas

Carilah 1 artikel internet tentang lembaga atau tokoh yang menghayati demokrasi Pancasila dalam dirinya entah individual maupun kelompok atau organisasi! Anda belajar makna/nilai apa dari artikel itu untuk hidupmu yang lebih demokratis? Uraikan!

Daftar Pustaka:

- Betham, David, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam, 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta
- Darji Darmodihardjo, 1995, *Santiaji Pancasila, Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yuridis Konstitusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Tata Negara Edisi Kedua*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rahmat A, dkk, 2000, *Panduan Menguasai Tata Negara*, Ganesha Exactm Bandung
- Setiadi, Elly M, 2003, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suny Ismail, 1968, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Triwamwoto, Petrus Citra, 2004, *Kewarganegaraan SMA 1*, Grasindo, Jakarta.
- Winataputra, Udin S., 2005, *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*, disampaikan pada Suscadoswar 2005, Dikti, Jakarta
- Winarno., 2012, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi – Panduan Praktis Pembelajaran*, Yuma Pustaka, Surakarta.
- Perundangan :
- UUD 1945, amandemen terakhir
- UU 31/2002, tentang Partai Politik
- UU 12/2003, tentang Pemilu DPR,DPRD, DPD
- UU 22/2003, tentang Susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- UU 23 / 2003, Pemilu Presiden.

BAB XIII

KEADILAN SOSIAL

A. Pengantar

Sila kelima dari Pancasila mengetengahkan nilai keadilan, khususnya keadilan sosial. Sebagai salah satu nilai dasar yang termuat dalam Pancasila itu berarti keadilan sosial merupakan sesuatu yang harus senantiasa kita perjuangkan terwujudnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Memperjuangkan atau mengusahakan keadilan sosial mengandung arti bahwa usaha tidak hanya terbatas pada lingkup individu, dimana setiap orang diharapkan selalu berlaku adil dalam putusan-putusan dan tindakan yang diambilnya. Keadilan sosial menyangkut lingkup yang lebih luas, terkait dengan berbagai struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Usaha mewujudkan keadilan sosial terutama adalah usaha perbaikan struktur-struktur sosial ekonomi, politis, budaya dan ideologis yang dapat menjamin atau membuat setiap golongan dalam masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi hak-hak mereka, dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta menikmati hasil-hasilnya.

Dalam materi¹⁴ ini, sebelum pembahasan terkait usaha mewujudkan keadilan sosial, lebih dulu diuraikan beberapa hal pokok terkait keadilan itu sendiri. Pembahasan secara lebih ilmiah-teoritis akan hal-hak pokok tersebut diperlukan sebagai landasan pemahaman dalam membangun pandangan dan sikap mengenai keadilan. Pemahaman ini sangat diperlukan karena gerakan mengusahakan keadilan sosial (sebagai sebuah etika terapan) mesti didasarkan pada teori-teori moral dasar tentang keadilan yang sekaligus tetap terbuka untuk dikaji atau direfleksikan keabsahannya. Untuk itu dalam bahan ini akan dibicarakan mengenai keadilan pada umumnya, hakekat keadilan, pembagian keadilan, dan secara khusus tentang keadilan distributif. Setelah itu pembahasan akan dipusatkan pada usaha mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan akan diakhiri dengan materi panduan diskusi sebagai bahan pendalaman lanjut dari apa yang dibahas sebelumnya.

B. Keadilan pada Umumnya

Tema keadilan merupakan tema yang sangat luas dan dapat disoroti dari aneka sudut pandang, dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, sudut pandang hukum, sudut pandang moral dan keagamaan. Masing-masing sudut pandang dapat memberikan interpretasi dan penekanan yang agak spesifik sesuai dengan titik tolak yang digunakan masing-masing. Tulisan ini tidak bermaksud membahas tema keadilan dari berbagai sudut pandang tadi, karena bukan itu maksud dari topik ini. Kita lebih banyak mengkaji keadilan dari sudut pandang sosial praktis, sebagaimana dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Namun tanpa mengabaikan berbagai sudut pandang tentang keadilan, pembahasan kita tetap bertolak dari kajian ilmiah. Dengan demikian, pembahasan yang kita lakukan adalah pembahasan yang bersifat kritis-rasional, yang tetap terbuka untuk dikaji terus

¹⁴ Seluruh materi ini diambil dari Antonius Atosokhi Gea dkk (2002) *Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 313-337.

menerus, termasuk dalam berbagai sudut pandang sekali pun. Lepas dari semua itu, tema mengenai keadilan merupakan salah satu tema utama dalam filsafat moral. Keadilan bukan hanya sekadar masalah sosial atau hukum, melainkan, lebih dari pada itu, merupakan masalah moral. Dan kalau itu disebut masalah moral, berarti berkaitan dengan baik-buruknya manusia dari sudut etis. Maka bersikap adil atau tidak adil selalu menuntut pertanggungjawaban moral, yang berkaitan dengan tuntutan hati nurani

B. Hakikat Keadilan

1. Pengertian

Tidak mudah untuk memberi definisi yang langsung jelas dan terang serta memuaskan semua pihak mengenai keadilan. K. Bertens, dalam bukunya *Pengantar Etika Bisnis*, memberikan sedikit ulasan cukup bagus mengenai keadilan. Untuk beberapa bagian tulisan ini kami mengikuti skema beliau. Kita terutama mencoba memahami keadilan melalui pembatasan-pembatasan yang pernah diberikan dalam sejarah, mengkritisnya, lalu mencoba melengkapinya dengan berbagai pemahaman yang diberikan lebih kemudian oleh para pemerhati dalam masalah keadilan. Orang Romawi kuno, yang terkenal karena kemampuannya menciptakan suatu sistem hukum yang bagus, yang dikagumi dan dipelajari hingga sekarang, yang disebut *Ius Romanum*, telah berhasil membuat satu batasan (dalam konteks hukum) mengenai keadilan, dengan meng gambarkannya sebagai ” *tribuere cuique suum* ” (” *to give everybody his own* ”, memberikan kepada setiap orang yang dia empunya). Secara lebih luwes, kita artikan dalam bahasa kita sebagai: ”memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Ada banyak juga penulis pada zaman kita yang telah mencoba memberikan pengertian yang lebih konkrit tentang keadilan. Ringkasnya, keadilan diartikan sebagai sikap berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, dan tidak berat sebelah.

2. Tiga ciri khas yang menandai keadilan

Sebagai lanjutan dari pembahasan tentang hakikat keadilan, di sini disebutkan tiga ciri khas yang menandai keadilan. Disebut sebagai ciri khas, karena ketiga hal tersebut merupakan keharusan di dalamnya. Itulah aspek-aspek yang selalu menandai keadilan, kapan dan di mana pun dipraktekkan.

a. Keadilan tertuju kepada orang lain

Tindakan berlaku adil atau tidak berlaku adil selalu tertuju kepada orang lain, dan tidak pernah kepada diri sendiri. Masalah keadilan atau ketidak-adilan hanya bisa timbul dan relevan dalam relasi antar manusia, dan tidak dengan diri sendiri. Saya perlu dan penting memberi perhatian yang seimbang terhadap dimensi-dimensi dasar dalam diri saya (pembinaan fisik, perbaikan hubungan sosial, pengembangan mental: intelektual-emosional-spiritual), namun hal itu bukan merupakan keharusan bagi saya. Saya tidak dapat disebut tidak adil apabila salah satu dari dimensi dasarnya itu saya abaikan. Saya hanya berpikir tentang keadilan dalam kaitan dengan hubungan saya dengan orang lain, yakni perlakuan saya terhadap mereka atau perlakuan mereka terhadap saya.

Seperti dikatakan oleh Dr. Kees Bertens, dalam pembahasannya mengenai hakikat keadilan, bila pada suatu saat hanya tinggal satu manusia di bumi ini, masalah keadilan atau ketidak-adilan sudah tidak berperanan. Singkatnya, keadilan, tindakan berlaku atau tidak berlaku adil, selalu menyangkut hubungan antara sekurang-kurangnya dua orang manusia.

b. Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan

Keadilan bukan sebuah harapan atau himbauan belaka. Keadilan adalah sebuah tuntutan, suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Melaksanakan keadilan berkaitan dengan pemenuhan hak pihak lain. Jadi, terdapat hak yang harus dipenuhi, dan karenanya, tindakan memenuhinya bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Pembatalan akan kewajiban ini hanya dimungkinkan oleh alasan yang masuk akal dan dapat diterima. Kewajiban kita memenuhi hak pihak lain didasarkan pada alasan keadilan. Kita dapat saja memberikan sesuatu kepada orang lain karena berbagai alasan, umpamanya memberi derma kepada pengemis, memberi hadiah sebagai tanda ucapan selamat, atau memberikan hadiah karena alasan cinta. Untuk semuanya itu kita memberikan hal-hal tadi bukan karena kewajiban, sebagai yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita memberi dengan alasan keadilan, adalah suatu kewajiban, kita harus memberikannya. Demikian umpamanya majikan harus memberikan gaji yang adil kepada karyawannya, atau barang yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selama hal-hal itu belum terlaksana, maka keadilan belum terjadi, atau tidak ada. Keadilan justru terjadi persis ketika keharusan-keharusan itu terlaksana.

c. Keadilan menuntut kesamaan

Persamaan dimaksud harus menyangkut semuanya, tanpa ada yang dikecualikan. Kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Memberikan gaji yang adil kepada karyawan, harus benar-benar melakukan hal itu kepada semua karyawan, tanpa ada satu orang pun yang diabaikan. Majikan itu hanya pantas disebut adil kalau dia memberikan perlakuan yang sama kepada semua karyawannya. Perlakuan yang sama di sini tidak selalu dalam arti sama rata. Dalam hal pemberian gaji yang adil umpamanya, tindakan yang adil tergantung dari prinsip material apa yang dia pakai, dan bahwa dia konsekuen dalam penerapan prinsip itu kepada semua (mengenai hal ini akan dibahas pada bagian-bagian berikut). Mengenai ciri-ciri pokok keadilan, menarik untuk mengamati apa yang terdapat dalam mitologi Romawi mengenai *Dewi Iustitia* (Dewi Keadilan) yang digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan, dengan matanya tertutup kain. Timbangan itu menunjuk pada ciri kedua di atas, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang; sedangkan mata tertutup dengan kain menunjuk pada ciri terakhir ini, yakni keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa. Perlakuan yang tidak sama bisa saja terjadi, namun tetap harus mencari prinsip material sebagai landasannya, sehingga perlakuan yang tidak sama tadi tetap dapat dipertanggungjawabkan, karena tetap dalam kerangka keadilan.

B. Pembagian Keadilan

Keadilan dapat dibagi dengan berbagai cara, namun pembagian yang banyak itu tidak kita utarakan di sini. Dalam pemaparan berikut kita hanya menyajikan pembagian yang kiranya cukup relevan untuk diketahui.

1. Pembagian klasik

Disebut klasik karena mempunyai sejarah yang cukup panjang, dan memiliki akar kuat dalam zaman Romawi kuno. Pemikiran dari salah seorang pemikir besar Yunani, yakni Aristoteles, sangat besar pengaruhnya dalam pemahaman tentang keadilan, bukan saja pada zaman klasik, namun juga sampai pada abad modern ini. Pembagian tersebut menyangkut tiga bagian penting, berupa tiga jenis kewajiban yang dikaitkan dengan hak (pemenuhan hak). Keadilan di sini dapat menyangkut kewajiban individu-individu terhadap masyarakat, lalu kewajiban masyarakat terhadap individu, dan akhirnya kewajiban individu-individu satu sama lain. Ketiga jenis keadilan tersebut lazim disebut: keadilan umum, keadilan distributif dan keadilan komutatif.

a. Keadilan umum (*general justice*)

Keadilan ini dimaksudkan para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (negara) apa yang menjadi haknya. Hal mengutamakan kebaikan umum atau kebaikan bersama, mendapat landasannya dalam keadilan jenis ini. Kita harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi dasar dari kewajiban ini adalah keadilan.

Kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, kewajiban membela negara, dan lain-lain kewajiban terhadap negara, mendapat landasannya dalam keadilan umum ini. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, yang mengikat setiap warga secara hukum, maka keadilan umum kadang disebut juga keadilan legal (*legal justice*). Singkatnya, keadilan umum merupakan keadilan yang diberikan/dilaksanakan oleh warga masyarakat kepada negara.

b. Keadilan Distributif (*distributive justice*)

Keadilan distributif disebut juga “keadilan membagi”. Dengan keadilan ini dimaksud negara (pemerintah) harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Hal-hal yang dibagi oleh pemerintah kepada rakyatnya berkisar pada hal-hal yang mengenakan dan hal-hal yang tidak mengenakan (*benefits and burdens*). Sebagai contoh hal-hal yang mengenakan: perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan untuk karyawan dan sebagainya. Hal-hal yang tidak mengenakan: kewajiban kerja bakti, ikut dalam siskamling, besarkecilnya beban pajak, dan sebagainya. Tidak adil bila pemerintah mempraktekkan sikap “pilih kasih” dalam membagi hal-hal yang mengenakan dan hal-hal yang tidak mengenakan. Tidak adil bila pemerintah mengistimewakan orang tertentu yang tidak mempunyai hak khusus atau alasan yang masuk akal. Nepotisme dalam segala bentuknya merupakan salah satu contoh pelanggaran keadilan distributif.

c. Keadilan komutatif (*commutative justice*)

Berdasarkan keadilan ini setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Ini adalah keadilan yang berlaku antara satu individu dengan individu lain, maupun antara satu kelompok dengan kelompok lain. Keadilan ini disebut juga “keadilan tukar menukar”. Contoh keadilan ini tampak ketika orang mengadakan perjanjian atau kontrak. Dalam suatu kontrak tertera apa yang didapatkan oleh yang satu pihak kepada pihak yang lain. Apa yang mereka dapati itu tentu tidak sama, namun pertukaran itu sudah mereka sepakati, dan oleh karena itu, merupakan keadilan. Demikian juga halnya dengan prinsip etis, “janji harus ditepati”, mendapat landasannya dalam jenis keadilan ini. Keadilan komutatif dilanggar antara lain dengan mencuri, tidak mengembalikan apa yang dipinjam, menghancurkan nama baik seseorang, melukai atau membunuh seseorang. Disebut melanggar keadilan karena dengan semua perbuatan itu kita merampas apa yang menjadi hak seseorang.

2. Pembagian menurut pengarang-pengarang modern.

Pengarang-pengarang modern juga dapat dikatakan melanjutkan pemikiran atau gagasan kuat dari Aristoteles tentang keadilan. Dengan demikian maka tidaklah mengherankan apabila terdapat tumpang tindih antara pemikiran modern dengan pemikiran klasik tentang keadilan. Secara garis besar pengarang-pengarang modern membagi tiga jenis keadilan, yakni:

a. Keadilan distributif (*distributive justice*).

Keadilan ini pada prinsipnya sama dengan apa yang dimaksudkan dalam pembagian klasik di atas. Ini adalah suatu keadilan di mana hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak (*benefits and burdens*) harus dibagi dengan adil. Untuk lebih jelas, keadilan distributif ini akan dijelaskan secara khusus pada bagian berikut.

b. Keadilan retributif (*retributive justice*)

Keadilan ini berkaitan dengan terjadinya kesalahan, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Maksudnya adalah hukuman atau denda yang dikenakan kepada orang yang bersalah, haruslah bersifat adil. Umumnya keadilan retributive berlaku di bidang kehakiman, tapi juga dapat diterapkan pada bidang-bidang lain. Agar hukuman dapat dinilai adil maka penting memperhatikan tiga syarat berikut: Pertama, orang yang dihukum harus tahu apa yang dilakukannya dan bahwa itu dilakukannya dengan bebas. Tindakan yang dilakukan secara spontan, tanpa disadari atau tanpa melibatkan unsur-unsur kepribadian si pelaku, tidak adil untuk dikenakan hukuman. Jadi, syarat pertama adalah kesengajaan dan kebebasan. Kedua, harus dipastikan bahwa orang yang dihukum itu benar-benar melakukan perbuatan itu, dan bahwa dengan itu ia terbukti bersalah. Maka pembuktian bersalah atau tidak bersalah harus didahului dengan penyelidikan yang akurat. Dalam bidang yuridis, syarat ini membuahkan “azas praduga tak bersalah”. Artinya, selama seseorang belum terbukti bersalah, harus dianggap tidak bersalah. Ketiga, hukuman harus konsisten dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.

Syarat konsistensi dipenuhi jika semua orang atau kelompok diberikan hukuman yang sama untuk setiap pelanggaran yang sama. Sedangkan syarat proporsional dipenuhi

jika hukuman atau denda yang diberikan tidak melebihi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan salah itu (hukuman tidak lebih besar dari kesalahan).

- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*) Keadilan ini berkaitan juga dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi tidak dalam bentuk seperti keadilan retributif. Berdasarkan keadilan ini orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dia rugikan akibat perbuatannya. Agar kewajiban kompensatoris berlaku, perlu memperhatikan tiga syarat berikut: Pertama, tindakan yang menyebabkan kerugian harus merupakan tindakan salah atau disebabkan kelalaian. Kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang sah, tidak ada kewajiban kompensasi. Kedua, perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian. Misalnya, jika orang lain menyebabkan kecelakaan dengan mobil yang dia pinjam dari saya, saya tidak wajib memberikan ganti rugi kepada korban. Ketiga, kerugian harus disebabkan oleh tindakan orang yang bebas, atau setidaknya tidaknya ada unsur ketidakhati-hatian.

C. Keadilan Distributif Pada Khususnya

Keadilan distributif merupakan keadilan yang sedikit lebih rumit dan barangkali paling banyak kesulitan. Namun, di sisi lain, keadilan jenis ini merupakan keadilan yang memiliki relevansi sangat besar dan luas dalam kehidupan praktis manusia. Keadilan distributif sudah terdapat pada zaman klasik, dan pada zaman modern ini menjadi semakin urgen. Hal yang menyebabkan keadilan ini banyak kesulitannya adalah karena menyangkut masalah membagi. Persoalannya adalah, bagaimana membagi hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak (*benefits and burdens*) secara *fair*, sehingga tidak ada yang mendapat terlalu banyak dan tidak ada yang mendapat kurang.

1. Prinsip formal dan prinsip material

Berangkat dari pertanyaan penting di atas, orang akhirnya sampai pada pencarian prinsip apa yang dipakai agar pembagian bersifat adil. Penentuan prinsip tersebut penting agar pelaksanaan keadilan distributif dapat dipertanggungjawabkan. Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa keadilan merupakan salah satu tema utama dalam filsafat moral (etika), karena keadilan terutama merupakan masalah moral. Maka dalam teori etika modern kita kenal dua prinsip untuk keadilan distributif, yakni prinsip *formal* dan prinsip *material*. Prinsip formalnya hanya ada satu, sedangkan prinsip materialnya lebih dari satu. Prinsip formalnya memiliki tradisi yang cukup panjang, karena sudah ditemukan pada Aristoteles. Dalam bahasa Inggris prinsip ini dituliskan: "*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*". Kata *equals* dapat dimengerti sebagai "orang-orang yang sama", "kasus-kasus yang sama", dan sebagainya. Jadi, prinsip formal menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara tidak sama.

Dilihat dari bunyinya, prinsip ini memang bagus dan indah, namun dalam praktek tidak begitu bermanfaat. Prinsip ini disebut *formal*, karena hanya menyajikan bentuk dan tidak mempunyai "isi". Artinya, dalam praktek kita tidak segera tahu orang-orang atau kasus-kasus mana yang dapat dianggap sama, sehingga pantas diperlakukan

sama. Prinsip tersebut menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, tetapi tidak dijelaskan apa yang harus dimengerti dengan “kasus-kasus yang sama”. Prinsip ini tidak menunjukkan menurut aspek apa kasus-kasus harus dianggap sama atau tidak sama, serta aspek-aspek mana dalam hal ini relevan atau tidak. Oleh karena itu prinsip formal saja tidak cukup sebagai pegangan dalam praktek untuk membagi dengan adil.

Untuk melengkapi prinsip formal, kita perlu menggunakan prinsip material. Ada enam prinsip material yang biasa digunakan. Artinya, kalau kita membagi sesuatu, kita memberikan sesuatu kepada satu orang sedangkan yang lain tidak dapat apa-apa, bisa juga pembagian kita adil, asalkan kita membagi berdasarkan salah satu prinsip material. Kesulitan tetap bisa muncul, karena seringkali beberapa prinsip berlaku sekaligus. Untuk mengatasinya, apabila berhadapan dengan situasi semacam itu, kita perlu pertimbangkan prinsip mana paling cocok untuk situasi tertentu. Untuk lebih jelasnya, keenam prinsip material dalam keadilan distributif akan diutarakan berikut ini:

1) Kepada setiap orang bagian yang sama (*to each person an equal share*)

Menurut prinsip ini kita membagi dengan adil, jika kita membagi sama rata: kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama. Dalam lingkungan keluarga, umpamanya, kue atau makanan lainnya dibagi dengan adil, bila semua anggota keluarga mendapat bagian yang sama besarnya. Membagi atas dasar undian merupakan salah satu cara untuk mempraktekkan prinsip ini, karena dengan itu semua orang mendapat peluang yang sama.

2) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya (*to each person according to individual need*).

Prinsip kedua menekankan bahwa kita berlaku adil, bila kita membagi sesuai dengan kebutuhan. Ibu rumah tangga yang membagi nasi dengan memberi kepada semua anggota keluarga porsi yang sama, belum tentu berlaku adil, karena kebutuhan mereka tidak sama. Remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, membutuhkan porsi makanan lebih besar dari adik-adik kecil atau kakek. Keadilan terwujud, bila semua orang bisa makan sampai kenyang, dan dengan demikian kebutuhan terpenuhi.

3) Kepada setiap orang sesuai dengan haknya (*to each person according to that person's right*)

Salah satu makna dari keadilan adalah dengan memenuhi hak orang atau pihak lain. Karyawan yang dipekerjakan di suatu perusahaan, sebelum diterima kerja, lebih dahulu menandatangani semacam perjanjian kerja yang di dalamnya dituliskan mengenai gaji, hari cuti, tunjangan kesehatan, dan hal-hal lain yang sudah disepakati dengan jelas mengenai hak-haknya terhadap perusahaan. Ia diperlakukan dengan adil oleh perusahaan, jika ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja itu dilaksanakan.

4) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya (*to each person according to individual effort*) Prinsip ini mempertimbangkan bahwa mereka yang mengeluarkan banyak usaha dan keringat untuk mencapai tujuan, pantas diperlakukan dengan cara lain dari pada orang yang tidak berusaha. Di tempat kerja, uang lembur diberikan berdasarkan prinsip keempat ini. Karyawan yang bekerja lebih lama dari karyawan

lain mendapat uang lembur, walaupun hasil kerjanya belum tentu lebih baik dan lebih banyak dari karyawan lain. Jadi, usaha di sini harus dilihat terlepas dari berhasil atau tidaknya, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip keenam di bawah.

- 5) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat (*to each person according to special contribution*)

Pejabat tinggi negara boleh saja diperlakukan secara lain berdasarkan pertimbangan bahwa dia memiliki kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Jika tempat dalam pesawat terbang tidak cukup untuk semua calon penumpang, seorang menteri pantas didahulukan sedangkan orang biasa menunggu penerbangan berikutnya. Prinsip kelima ini menyatakan bahwa tindakan itu adil. Namun demikian, prinsip ini harus dipakai dengan ekstra hati-hati, karena terlalu banyak orang menganggap dirinya sangat penting dan dengan itu melanggar prinsip formal keadilan distributif.

- 6) Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*to each person according to merit*)

Menurut prinsip ini jasa menjadi alasan juga untuk memberikan sesuatu kepada satu orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Jasa di sini tampak dalam bentuk prestasi. Maka karyawan yang berprestasi khusus, umpamanya, diberi bonus akhir tahun, yang tidak diberikan kepada karyawan lain. Menurut prinsip keenam ini, pemberian bonus tersebut dianggap adil, walau tidak diberikan kepada semua karyawan lain.

2. Beberapa teori keadilan distributif

Berdasarkan prinsip-prinsip material di atas, telah dibentuk beberapa teori keadilan distributif, dengan mengambil salah satu atau beberapa dari prinsip material sebagai landasannya. Ada tiga teori akan diperkenalkan di sini:

a. Teori egalitarianistis

Teori ini mengambil prinsip pertama sebagai dasarnya. Kita membagi dengan adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (*equal*). Membagi dengan adil sama dengan membagi rata. “Sama rata, sama rasa”, itulah semboyan khas teori egalitarianistis.

Kekuatan teori ini terletak pada penegakkannya atas prinsip kesamaan antar manusia. Manusia semua sama, sederajat, semartabat. Satu manusia tidak pernah lebih manusia dari manusia lain, terlepas dari ciri-ciri yang tidak relevan, seperti kedudukan sosial, ras, jenis kelamin, agama, kekayaan, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, dalam bidang hukum, umpamanya, semua manusia harus diperlakukan dengan cara yang sama. Kelemahannya adalah, walaupun martabat manusia selalu sama, namun dalam banyak hal manusia tidak sama, umpamanya dalam hal inteligensi dan kemampuan atau keterampilan. Oleh sebab itu, dalam hal penggajian, umpamanya, penerapan prinsip ini terasa sulit. Namun, untuk hal-hal tertentu prinsip ini terasa cocok dan relevan. Umpamanya, antrian di loket-loket pengambilan tiket, di tempat pelayanan administrasi di berbagai instansi, dan sebagainya. Artinya, siapa yang datang kemudian, harus menunggu sampai gilirannya tiba, dan tidak boleh menerobos antrian untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.

b. Teori sosialis

Teori ini mengambil prinsip kedua (kebutuhan) sebagai dasarnya. Untuk mengimplementasikan prinsip kedua ini, mereka merumuskan sebuah prinsip yang

berbunyi: *“From each according to his ability, to each according to his needs”*. Prinsip ini berbicara mengenai bagaimana *burdens* dan *benefits* harus dibagi. Hal-hal berat harus dibagi sesuai dengan kemampuan dan hal-hal yang enak harus dibagi sesuai dengan kebutuhan. Atau dengan perkataan lain, berlaku adil mengandung makna: memberi sumbangan yang relatif sama terhadap kebahagiaan mereka diukur pada kebutuhan mereka, dan menuntut dari mereka pengorbanan yang relatif sama, diukur pada kemampuan mereka. Jadi teori sosialis menolak penerapan prinsip sama rata sebagai tidak adil, karena kemampuan dan kebutuhan orang tidak sama.

Kekuatan teori ini terletak pada kesediaannya menampung perbedaan kemampuan dan kebutuhan, sesuatu yang sangat riil dalam kehidupan manusia. Namun, kelemahan teori sosialis ada dua: Pertama, contoh dalam hal penggajian, jika kebutuhan dijadikan satu-satunya kriteria untuk melaksanakan keadilan di bidang penggajian, maka orang tidak akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan mereka akan bekerja bermalas-malas, karena bekerja keras atau bermalas-malas tidak akan mengubah pendapatannya. Tentu akibat lebih jauh dari hal tersebut tidak sulit ditebak, produktivitas akan menurun dan usaha bisa bangkrut. Kelemahan kedua, adalah, bila kemampuan sebagai alasan satu-satunya untuk membagi pekerjaan, maka kebebasan orang untuk memilih pekerjaan yang dia sukai menjadi terabaikan. Dia harus menerima penugasan yang diberikan kepadanya berdasarkan kemampuan yang dia miliki atas tugas itu.

c. Teori liberalistis

Teori ini menggarisbawahi pentingnya prinsip ketiga (hak), prinsip keempat (usaha), tapi secara khusus prinsip keenam (jasa atau prestasi). Mereka bertolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk bebas. Jadi, kita bertindak adil kalau kita membagi sesuatu menurut usaha-usaha bebas yang diperlihatkan oleh seseorang. Prestasi terutama mereka lihat sebagai perwujudan dari pilihan bebas seseorang.

Kekuatan teori ini terutama akan mendorong orang untuk bekerja keras dan berprestasi. Hasilnya, para pekerja akan mendapatkan imbalan yang semakin baik dan produktivitas juga meningkat. Kelemahannya adalah, berkaitan dengan orang yang tidak bisa berprestasi karena cacat fisik atau mental, orang yang menganggur di luar kemauannya sendiri, dan sebagainya. Orang-orang seperti ini langsung dianggap malas, dan dengan demikian tidak mendapat apa-apa. Apakah adil bertindak seperti itu?

Dari penjelasan di atas tampak bahwa teori keadilan distributif yang mutlak membatasi diri hanya pada satu prinsip saja, kelihatannya sulit dipertahankan. Untuk membagi dengan adil, kita harus memperhatikan semua prinsip material. Artinya ialah, dalam suatu keadaan konkret, kita harus mempertimbangkan prinsip mana yang paling penting.

D. Keadilan Sosial

1. Beda dengan keadilan individual

Kalau berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkannya sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama, memperlakukan siapa saja tanpa diskriminatif. Misalnya, seorang guru harus memberikan nilai sesuai dengan prestasi masing-masing muridnya, dengan memakai tolok ukur yang sama. Apabila dia memberikan nilai berbeda untuk prestasi yang sama, dengan pertimbangan, yang satu adalah keponakannya, maka guru tersebut berlaku tidak adil. Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh guru tersebut adalah ketidakadilan individual. Yang dia langgar adalah keadilan individual, dan bukan keadilan sosial. Dan pelanggaran yang dilakukan guru tersebut adalah tanggungjawabnya sepenuhnya, karena tindakannya itu sepenuhnya keluar dan ditentukan oleh kehendak pribadinya sendiri.

Di pihak lain, terwujud-tidaknya keadilan tidak hanya tergantung pada kehendak masing-masing individu saja, melainkan dari struktur-struktur ekonomis, sosial, politik dan budaya seluruh masyarakat. Ada banyak situasi ketidakadilan yang terjadi, yang berada di luar keinginan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Namun individu-individu tersebut tidak dapat berbuat banyak, karena mereka berada dalam sistem, di mana mereka sebagai pribadi, tidak kuasa untuk berbuat lain, walau mereka sebagai pribadi berkeinginan untuk melakukannya. Inilah yang disebut ketidakadilan sosial, yang jelas berbeda dengan keadilan individual. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur yang dimaksud di sini tidak lain adalah struktur-struktur kekuasaan dalam berbagai dimensi sosialnya. Maka ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat bersumber dari struktur-struktur kekuasaan tersebut. Itulah sebabnya ketidakadilan sosial disebut juga ketidakadilan struktural, yang menyebabkan sekelompok atau segolongan orang, atau kelas-kelas sosial tertentu, tertimpa ketidakadilan.

2. Mengusahakan keadilan sosial

Mengusahakan keadilan sosial tidak lain berarti mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Melihat lingkupnya yang bersifat struktural, maka keadilan sosial setepatnya hanya dapat diusahakan oleh negara. Alasannya adalah karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara (konkritnya: pemerintah) mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis suatu negara.

Jadi, dari perspektif ini, negaralah yang memikul tanggungjawab mengusahakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, pengakuan ini sifatnya teoretis saja, karena dalam kenyataannya negara tidak benar-benar mengusahakan hal itu. Alasannya, karena pembongkaran ketidakadilan struktural dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa. Golongan-golongan yang menguasai masyarakat tetap merasa diuntungkan dengan kondisi seperti itu, karena dengannya golongan-golongan lemah tidak sanggup untuk mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak mereka.

Dari pemikiran di atas, harapan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan semata-mata dari atas, tidaklah realistis. Maksudnya, bukan seakan-akan orang perorangan yang akan menduduki tempat-tempat kekuasaan niscaya bersikap acuh-tak-acuh terhadap nasib orang kecil dan tertindas, melainkan karena maksud baik mereka dengan sendirinya mesti kalah terhadap kepentingan-kepentingan golongan-golongan yang mereka wakili untuk mempertahankan kedudukan yang menguntungkan itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengharapkan ketidakadilan struktural sungguh-sungguh dapat dibongkar hanya dari atas saja. Pembongkaran ketidakadilan sosial harus diperjuangkan oleh mereka yang terkena sendiri. Caranya, tidak dengan cara yang sangat sugestif seperti dipelopori oleh Marx, dengan membagi kelas atas dan kelas bawah, di mana kelas bawah menentang kelas atas, dan akhirnya menumbangkannya secara revolusioner. Dalam negara demokratis seperti negara kita Indonesia, memperjuangkan keadilan sosial dari bawah jangan dipahami sebagai semacam konfrontasi antar dua bagian masyarakat. Konfrontasi semacam itu selalu bersifat ideologis, dan karena itu tidak akan menghasilkan keadilan. Yang perlu ialah agar golongan-golongan sosial yang lemah pun dapat menyuarakan harapan dan cita-cita mereka, agar suara mereka kedengaran, dan agar mereka berpartisipasi secara nyata dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, keadilan sosial mengandaikan demokratisasi. Tanpa demokrasi yang nyata, keadilan sosial cuma impian belaka. Hal yang perlu direalisasikan di dalamnya adalah hak-hak dasar untuk berkumpul dan berserikat, berpartisipasi dalam kehidupan politik, untuk menyatakan pendapatnya, untuk mengeritik, kebebasan pers, dan yang tidak kalah penting adalah usaha untuk semakin menjamin kepastian hukum. Realisasi dari hal-hal ini akan menyehatkan kehidupan politik yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang sebuah negara demokratis. Stabilitas nasional yang nyata hanya dapat didasarkan pada keadilan sosial, di mana keadilan sosial sendiri tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat.

Studi Kasus:

Ganti Rugi*

“Saudara-saudara, ganti rugi tanah dan bangunan milik Saudara sudah tersedia di kelurahan. Harap saudara-saudara segera menghubungi bendahara kelurahan untuk memperoleh pembayarannya! Perlu Saudara-saudara ketahui, bahwa Pemerintah meminta kesediaan dan kerelaan Saudara-saudara untuk menjual tanah dan bangunan tersebut demi kelancaran Pembangunan Nasional. Pemerintah bertekad untuk menyukseskan Pembangunan Nasional demi kesejahteraan para anak cucu kita. Karena tujuan pemerintah tersebut adalah baik, maka tidaklah pantas kalau kita tidak mendukungnya. Kami harap himbauan kami ini mendapat tanggapan positif dari Saudara-saudara”.

Itu tadi penggalan sambutan Kepala Desa sebuah kelurahan di Jawa Tengah, yang sebagian besar wilayahnya terkena proyek Bendungan Raksasa untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan pengairan ribuan hektar sawah. Terhadap himbauan itu, Pak Kromo dengan berapi-api mengutarakan kepada Pak Karto, tetangganya, seperti berikut: “Pak Karto, coba bayangkan! Kita ini mau dikemanakan?”. Pak Karto menjawab: “Sudahlah, kita ini kan rakyat kecil. Ikuti saja perintah Pak Lurah tadi!”. Mendengar jawaban itu, Pak Kromo semakin berang. “Apa? ... apa ... ikuti saja perintah Pak Lurah? Uh, tidak ... sekali-kali tidak. Sebab saya sudah tinggal di sini sejak Mbah buyut saya. Bahkan lebih dari tujuh keturunan saya sudah mengolah tanah ini. Lagi pula ganti rugi yang dibayarkan pemerintah tak seimbang dengan harga tanah dan bangunan rumah

saya. Kalau kita harus meninggalkan kampung halaman kita ini, kita mau disuruh kemana? Suruh transmigrasi? Aku, istri dan anak-anak tidak akan pernah mau transmigrasi. Hidup mati kami harus di kampung halaman ini. Saya sekeluarga hanya mau pindah kalau pemerintah mau menyediakan tempat". Pak Karto terdiam mendengarkan pembelaan Pak Kromo. Dalam hati kecil ia setuju dengan pendapat tetangganya itu, tetapi ia tidak berani mengatakannya dan ia hanya pasrah akan nasib yang menimpanya ...

* Sumber: Drs. Nursal Luth (1992)

E. Tugas

Coba cari 1 kasus di internet terkait sikap/perilaku tidak adil dalam bidang apa saja? Lalu bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah itu secara adil dalam semangat Pancasila? Jelaskan!

Kepustakaan:

Antonius Atosokhi Gea dkk (2002). Character Building II: Relasi dengan Sesama. Jakarta: Elex Media Komputindo.